

**KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KETERGANTUNGAN NEGARA-  
NEGARA ASEAN KE TIONGKOK DALAM KERJA SAMA  
*ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA***

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDIKA PRASETYA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KETERGANTUNGAN NEGARA- NEGARA ASEAN KE TIONGKOK DALAM KERJA SAMA *ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA***

*Oleh*

**Andika Prasetya**

*ASEAN – China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan salah satu kerja sama pasar bebas dengan populasi dan nilai ekonomi terbesar di dunia. ACFTA menciptakan ruang kompetisi yang semakin terbuka bagi negara-negara ASEAN dan Tiongkok sehingga kedua pihak idealnya mengedepankan keunggulan komparatifnya masing-masing. Perkembangan ACFTA akan tetapi justru memperlihatkan kondisi yang menimbulkan indikasi adanya ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan untuk ini mengkaji pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Penelitian ini juga menghitung tingkat keunggulan komparatif dan ketergantungan masing-masing negara-negara ASEAN ke Tiongkok, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data analisis data skunder dan teknik analisis data regresi linier berganda.

Penelitian ini menemukan bahwa empat faktor pembangun keunggulan komparatif berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok, yaitu: pasar tenaga kerja, iklim bisnis, ketersediaan kredit, dan faktor *endowment*. Sementara dua faktor lainnya yaitu modal manusia dan kebijakan tarif impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat materil dan paling dekat dengan keuntungan. Penelitian ini lebih lanjut menciptakan dan membuktikan teori baru mengenai pengaruh keunggulan komparatif terhadap ketergantungan suatu negara yang dijelaskan melalui beberapa tahapan.

Kata kunci : Keunggulan Komparatif, Ketergantungan, ACFTA.

## **ABSTRACT**

### **COMPARATIVE ADVANTAGE AND DEPENDENCY OF ASEAN COUNTRIES TO CHINA IN COOPERATION OF ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA**

*Oleh*

**Andika Prasetya**

ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) is one of the biggest free trade in terms of population and economic value. ACFTA created more intense competition between countries of Association of Southeast Asia nations (ASEAN) and People's Republic of China so that both parties ideally prioritize their respective comparative advantage. However, the development of ACFTA actually lead to the conditions that give indication of dependence situation between ASEAN countries to China. Based in these problem, this research aims to examine the influence of comparative advantage using it's aspects on dependency of ASEAN countries to China. This research also calculates the level of comparative advantage and dependency of each ASEAN countries to China, and uses a quantitative approach with analysis secondary data and multiple linier regression analysis.

The result of this research found that there is four aspect of comparative advantage that have a signifikan effect to ASEAN countries dependence to China, i.e: labour maket, bussiness climate, availability of credit, and factor endowment. While two other aspect: human capital and tariff import policy have no significant effect. These finding show that economic relation among ASEAN countries and China are determined by material and closest to profit factors. This reserach furthermore create and prove theory about the effect of comparative advantage on state's dependency that explained through several stages.

Key words : Comparative Advantage, Dependence, ACFTA.

**KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KETERGANTUNGAN NEGARA-  
NEGARA ASEAN KE TIONGKOK DALAM KERJA SAMA  
*ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA***

**Oleh**

**ANDIKA PRASETYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi** : **Keunggulan Komparatif dan  
Ketergantungan Negara-negara ASEAN  
ke Tiongkok dalam Kerja Sama ASEAN -  
China Free Trade Area**

**Nama Mahasiswa** : **Andika Prasetya**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1416071011

**Jurusan** : Hubungan Internasional

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Drs. Agus Hadiawan, S. IP., M. Si**  
NIP 119580109 198603 1 002

**Fahmi Tarumanegara, S. IP., M.Si., M.B.A**  
NIP 19800825 201404 1 001

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

**Drs. Aman Toto Dwijono, M.H**  
NIP 19570728 198703 1 006

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadlawan, S. IP., M. SI**

Sekretaris : **Fahmi Tarumanegara, S. IP., M. Si., M.B.A**

Penguji : **Dr. Supto S.Sos., M.A.B**

### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 April 2018**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 April 2018  
Yang membuat pernyataan,



Andika Prasetya  
NPM. 1416071011

## RIWAYAT HIDUP



Andika Prasetya lahir di desa Wates, Way Ratai pada tanggal 07 September 1996. Andika merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan bapak Sutrisno dan Ibu Hartati. Andika menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD N 1 wates dan lusus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 2 Padang Cermin yang diselesaikan pada tahun 2011. Andika kemudian berpindah domisili ke kota Bandar Lampung untuk menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 8 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, Andika berhasil di terima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Andika aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) dengan pernah menjabat sebagai anggota departemen pengembangan mahasiswa pada tahun 2014-2015, anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Hubungan Internasional (MPM HI) pada tahun 2015-2016, dan sekertaris umum pada tahun 2016-2017.



## *Motto*

Selalu akan ada keajaiban yang dapat kita ciptakan, berdoa, berbuat baik, dan berusaha keras menjadi kuncinya.

Bertindak sesuai sebagaimana keinginan kita atas berjalannya dunia.

Persembahkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:**

Bapak Sutrisno dan Ibu Hartati;  
Abang Dian Irawan, Mba Fitriana Fauziah, dan Khanza  
Zaina Areta Fian;  
Mas Fahmi Tarumanegara;  
Dwi Putri Anggraini;  
Serta  
Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung

## *Sarwacana*

Puji syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga saya diberikan kesahatan dan kemudahan jalan dalam menyelesaikan karya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga tak lepas kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan do'a selama proses penyusunan, terkhusus terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Sutrisno dan Ibu Hartati, atas kasih, do'a, dukungan, dan kepercayaan yang tak pernah henti diberikan. Terima kasih sedalam-dalamnya atas segala hal yang tak mungkin dapat terbalas. Terima kasih telah menjadi teladan yang baik, yang selalu mendidik dengan kebaikan dan ketulusan. Terima kasih telah mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, kesopanan, dan kedisiplinan. Terima kasih telah menjadi sosok bapak, ibu, dan rumah yang selalu menyambut kala lelah. Terima kasih karena selalu memaafkan.
2. Abang Dian Irawan S.Pd dan keluarga, atas segala dukungan dan bantuan yang tak ternilai. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menjadi kakak yang selalu mengerti dan memaafkan kekurangan adiknya. Terima kasih atas bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak akan dapat terbalaskan. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu dapat diandalkan.

3. Mas Fahmi Tarumanegara, S.Ip., M.Si., M.B.A., sebagai sahabat, kakak, dan dosen pembimbing. Terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bantuan, ide, dan pelajaran berharga yang selalu diberikan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih selalu memaksa saya melewati batas yang saya ciptakan sendiri. Terima kasih menjaga saya tetap bermimpi sekaligus berusaha mewujudkan. Terima kasih menginspirasi saya untuk menjadi pribadi yang Insya Allah lebih baik.
4. Bapak Agus Hadiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas masukan, saran, dan kebaikan yang selalu bapak Agus berikan. Terima kasih banyak atas saran dan masukan penambahan berbagai ide dalam skripsi ini. Serta terima kasih telah menjadi dosen pembimbing akademik yang selalu mendukung mahasiswanya.
5. Bapak Dr. Suropto, S. Sos., M.A.B., selaku dosen pembahas skripsi. Terima kasih atas segala pelajaran, masukan dan ide yang telah diberikan.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
8. Seluruh jajaran dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
9. Seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

10. Dimas Dwi Santoto S. Hub. Int, atas sumbangsih ide dan masukan yang menginspirasi lahirnya ide untuk meneliti ketergantungan dalam skripsi ini.
11. Albertus Banu Laksana S. Hub. Int., atas karyanya “Pengaruh Kekuatan Negara Mitra Terhadap Keeratan Kerja sama OBOR”, yang memudahkan saya dalam memahami logika dan pembacaan analisis regresi linier berganda.
12. Chandra Anwar, Dimas Dwi Santoso, Christine Nainggolan, Endani Agustina, Tia Panca Rahmadhani, Wilma Dewastuti, dan Rima Silviana Azizah yang telah membantu kelancaran seminar proposal dan hasil.
13. Rima Silviana Azizah, Anika Ayu Puspita, Dimas Dwi Santoso, M. Reza Renaldi, Ria Mediana, Nurika Amalia dan teman-teman *Masterpiece* lainnya.
14. Sahabat-sahabat Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2014. Khususnya Deni Ramadhan, M. Zaim Rozaan, M. Gustian Alfarizi, M. Adam Malik, Wilma Dewastuti, Sheila Magdalena, dan Hanifah Az-zahra.
15. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJ HI) Universitas Lampung periode 2016/2017. Khususnya Amelia Rizky Palendra sebagai partner *Governance*.
16. Dwi Putri Anggraini. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan do’a yang selalu diberikan. Terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu hadir. Terima kasih telah mengerti dan memaksa untuk berhenti ketika saya mulai terlalu memaksakan diri. Terima kasih kerana selalu ada ketika saya membutuhkan.

17. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang belum disebutkan namanya, terima kasih atas segala dukungan dan do'a yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik.

Bandarlampung, 27 April 2018

Andika Prasetya

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	14
2.2. Landasan Teoritis .....	23
2.2.1 Kerja sama Internasional .....	23
2.2.2 Pasar Bebas .....	27
2.2.3 Keunggulan Komparatif .....	30
2.2.4 Ketergantungan .....	34
2.3 Kerangka Pemikiran .....	38
2.4 Hipotesis .....	41
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	44
3.2. Variabel dan Operasionalisasi .....	45
3.2.1. Variabel Penelitian .....	45
3.2.2. Operasionalisasi Penelitian .....	46
3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4. Teknis Analisis Data .....	59
3.4.1. Uji Asumsi Klasik .....	50
3.4.1.1. Uji Normalitas .....	50
3.4.1.2. Uji Multikolinieritas .....	51
3.4.1.3. Uji Heteroskedastitas .....	52
3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
3.4.3. Uji Hipotesis .....	54
3.4.3.1. Uji F .....	54

3.4.3.2. Uji T .....	55
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>56</b>
4.1. Kerja Sama ACFTA .....	56
4.1.1. Kerja sama Perdagangan Barang dalam ACFTA.....	62
4.1.2. Kerja sama Perdagangan Jasa dalam ACFTA.....	71
4.1.3. Kerja sama Peningkatan Investasi dalam ACFTA.....	73
4.2. Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	76
4.2.1. Faktor <i>Endowment</i> .....	79
4.2.2. Modal Manusia .....	81
4.2.3. Energi .....	84
4.2.4. Iklim Bisnis .....	86
4.2.5. Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja .....	88
4.2.6. Kebebasan Hambatan Tarif Impor .....	90
4.2.7. Ketersediaan Kredit .....	92
4.3. Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya.....	94
4.3.1. Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	96
4.3.1.1. Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya.....	99
4.3.1.2. Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	102
4.3.2. Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya.....	104
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
5.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Faktor-faktor Pembangun Keunggulan Komparatif Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	107
5.1.1. Uji Simultan .....	107
5.1.2. Uji Parsial .....	108
5.2. Hasil Pengujian Hipotesis .....	112
5.2.1. Uji F.....	112
5.2.2. Uji T .....	112
5.3. Pembahasan .....	115
5.3.1. Pengaruh Faktor <i>Endowment</i> Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	115
5.3.2. Pengaruh Iklim Bisnis Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	125
5.3.3. Pengaruh Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	129
5.3.4. Pengaruh Ketersediaan Kredit Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	133
5.3.5. Pengaruh Modal Manusia Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	138



3.5.6. Pengaruh Kebebasan Hambatan Tarif Impor Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok .....	142
3.5.7. Pengaruh Enam Faktor Pembangun Keunggulan Komparatif Terhadap Ketergantungan ASEAN ke Tiongkok.....	145
3.5.8. Dinamika Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	153
3.5.8 Keunggulan Komparatif, Ketergantungan, dan Keilmuan Hubungan Internasioan .....	169
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>176</b>
6.1. Kesimpulan .....	176
6.2. Saran .....	178
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	21
3.1 Operasionalisasi Penelitian .....	47
3.2 Sumber Data Penelitian .....	49
3.3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	50
3.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	51
3.5 Hasil Uji Multikolinieritas Baru .....	52
3.6 Hasil Uji Heteroskedastitas .....	53
4.1 Jadwal Penurunan Tarif EHP .....	63
4.2 Jumlah Produk Terdaftar EHP ASEAN dan Tiongkok .....	63
4.3 Jadwal Pengurangan Tarif <i>Normal Track</i> antara ASEAN 6 dan Tiongkok	64
4.4 Jadwal Pengurangan Tarif <i>Normal Track</i> antara Vietnam dan Tiongkok ...	64
4.5 Jadwal Pengurangan Tarif <i>Normal Track</i> antara Kamboja, Laos, Myanmar dan Tiongkok .....	65
4.6 Jumlah Barang Terdaftar dalam <i>Normal Track</i> .....	66
4.7 Jadwal Pengurangan Tarif dan Jumlah Produk Kategori <i>Sensitive List</i> .....	67
4.8 Jadwal Pengurangan Tarif dan Jumlah Produk Kategori <i>Highly Sensitive List</i> .....	69
4.9 Jumlah Produk ASEAN dan Tiongkok dalam ACFTA .....	70
4.10 Indeks Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN dan Tiongkok ..	77
4.11 Jenis Barang Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok dan Sebaliknya.....	78
4.12 Indeks Indikator Faktor <i>Endowment</i> Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	80
4.13 Indeks Faktor <i>Endowment</i> Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	81
4.14 Indeks Indikator Modal Manusia Negara-negara ASEAN dan Tiongkok..	83
4.15 Indeks Modal Manusia Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	84
4.16 Indeks Energi Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	85
4.17 Indeks Indikator Iklim Bisnis Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	87
4.18 Indeks Indikator Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	89
4.19 Indeks Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	90

4.20 Indeks Kebebasan Hambatan Tarif Impor Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	92
4.21 Indeks Ketersediaan Kredit Negara-negara ASEAN dan Tiongkok .....	93
4.22 Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2015 .....	95
4.23 Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016 .....	98
4.24 Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016 .....	100
4.25 Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016 .....	102
4.26 Indeks Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	106
5.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda secara Simultan .....	107
5.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda secara Parsial .....	108
5.3 Hasil Penghitungan Uji F .....	112
5.4 Hasil Penghitungan Uji T .....	113
5.5 Perbandingan Luas Daratan dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	116
5.6 Perbandingan Total Angkatan Kerja dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	119
5.7 Perbandingan Cadangan Energi dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	122
5.8 Perbandingan nilai endowment dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	124
5.9 Perbandingan Iklim Binsis, Nilai Ekspor ke Dunia dan Tiongkok, serta Persentase Ekspor Terhadap PDB Negara-negara ASEAN 2016 .....	126
5.10 Perbandingan nilai Iklim Bisnis dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	128
5.11 Perbandingan Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	130
5.12 Perbandingan nilai Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	132
5.13 Perbandingan Ketersediaan Kredit dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	134
5.14 Perbandingan nilai Ketersediaan Kredit dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	137
5.15 Perbandingan Modal Manusia dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	139
5.16 Perbandingan nilai Modal Manusia dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	142
5.17 Perbandingan <i>MFN Simple Average</i> dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	143
5.18 Perbandingan nilai <i>endowment</i> dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	145

5.19	Perbandingan Indeks Keunggulan Komparatif dan Nilai Perdagangan serta Investasi Negara-negara ASEAN 2016 .....	147
5.20	Perbandingan Indeks Keunggulan Komparatif dan Jumlah Mitra Perdagangan serta Investasi Negara-negara ASEAN 2016 .....	149
5.21	Perbandingan Jumlah Mitra Ekonomi dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	151
5.22	Perbandingan nilai Keunggulan Komparatif dan ketergantungan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	152
5.23	Perbandingan Karakteristik Produk Ekspor dan Impor Terbesar Negara-negara ASEAN ke/dari Tiongkok 2016 .....	158
5.24	Perbandingan Nilai Ketergantungan dan Karakteristik Produk Ekspor Terbesar Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	159
5.25	Perbandingan Nilai Selisih Ketergantungan dan Karakteristik Produk Ekspor Terbesar Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2015 .....	159
5.26	Jenis Barang Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok dan Sebaliknya.....	160
5.27	Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2010 – 2016 .....	165
5.28	Pemetaan Ketergantungan Negara-negara ASEAN 2010 – 2016 .....	166
5.29	Perbandingan Jumlah Mitra Ekonomi dan Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok 2016 .....	170

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Jumlah Perjanjian Pasar Bebas di Benua Asia (dibawah naungan WTO) .....	3
1.2 Perbandingan Ekspor ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	7
1.3 Perbandingan PDB dan PDB <i>Growth</i> ASEAN dan Tiongkok .....	8
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	40
2.2 Model Penelitian .....	41
3.1 Proses penelitian kuantitatif W. Lawrence Newman.....	44
4.1 Model Kerangka Kesepakatan Kerja sama ACFTA.....	57
4.2 Infografis ACFTA .....	61
4.3 Perbandingan Ekspor ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	71
4.4 Perbandingan FDI ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	75
4.5 Indeks Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	76
4.6 Indeks Faktor <i>Endowment</i> Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 ....	79
4.7 Indeks Modal Manusia Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016.....	82
4.8 Indeks (Skala 1 -100) dan Data TPES (Satuan Mtoe) Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2015 .....	84
4.9 Indeks Iklim Bisnis Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	86
4.10 Indeks Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	88
4.11 Indeks (Skala 1 – 100) Kebebasan Hambatan Tarif Impor dan <i>MFN Simple Average</i> Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	91
4.12 Indeks (Skala 1 – 100) Ketersediaan Kredit dan <i>Domestic Credit to Private Sector</i> (% PDB) Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016 .....	93
4.13 Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	94
4.14 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	96
4.15 Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	97
4.16 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	98

4.17 Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	99
4.18 Perbandingan Rata-rata Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	101
4.19 Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	102
4.20 Perbandingan Rata-rata Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	104
4.21 Indeks Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	105
4.22 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	106
5.1 Perbandingan PDB dan PDB <i>Growth</i> ASEAN dan Tiongkok .....	155
5.2 Perbandingan Ekspor ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	156
5.3 Perbandingan Nilai Ekspor Negara-negara ASEAN ke Tiongkok .....	161
5.4 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	165
5.5 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Perdagangan dan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya .....	167
5.6 Perbandingan Rata-rata Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan dan Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok .....	168
5.7 Kerangka Pemikiran Penelitian / Teori Pengaruh Keunggulan Komparatif terhadap Ketergantungan .....	169

## DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: <i>ASEAN-China Free Trade Area</i>
ACFTA-JC	: <i>ASEAN-China Free Trade Area Joint Committee</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asia Nations</i>
CEFTA	: <i>Central European Free Trade Agreement</i>
CLMV	: <i>Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet nam</i>
DCPS	: <i>Domestic Credit To Private Sector</i>
DRC	: <i>Domestic Resource Cost</i>
ECLA	: <i>Economic Commission for Latin America</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
EHP	: <i>Early Harvest progamme</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FOCAC	: <i>Forum for China-Afrika Cooperation</i>
GATT	: <i>General Agreement in Tariffs and Trade</i>
GNI	: <i>Gross National Income</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
HSL	: <i>Highly Sensitive List</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
MFN	: <i>Most Favoured Nations</i>
NAFTA	: <i>North American Free Trade Area</i>
NT	: <i>Normal Track</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
PDB	: <i>Pendapatan Domestik Bruto</i>
RCA	: <i>Revealed Comparative Advantage</i>
SOME	: <i>Socialist-Oriented Market Economy</i>
SL	: <i>Sensitive List</i>
TPES	: <i>Total Primary Energy Supply</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan dinamika ekonomi dan politik global, telah tercipta berbagai sistem perekonomian negara-negara di dunia. Salah satu yang paling berkembang adalah sistem pasar bebas yang menjanjikan keuntungan di dalam penciptaan kompetisi yang semakin ketat. *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) menjadi salah satu sistem pasar bebas yang tercipta pada tahun 2002 dan mengikat populasi terbesar antara negara-negara *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) dan negara Tiongkok. Kedua pihak dalam kerja sama ini idealnya saling menggunakan keunggulan komparatifnya masing-masing untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Permasalahan kemudian muncul ketika kerja sama ini justru menimbulkan indikasi adanya ketergantungan ekonomi yang dimiliki negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok.

Pasar bebas merupakan sebuah konsep sistem perekonomian internasional yang dipopulerkan oleh Adam Smith melalui bukunya "*Wealth of Nations*" pada abad ke 18.<sup>1</sup> Adam Smith dalam buku tersebut menganalisis perdagangan yang dilakukan oleh Inggris dan menghasilkan pemikiran "*invisible hand*", dimana

---

<sup>1</sup> Dalam pemaparan: Susanda Sen, 2010, *International Trade Theory and Policy: A Review of The Literature. Working Paper* No. 635, New York: Levy Economics Institute of Bard College. Halaman 2



pemerintah idealnya tidak ikut campur dalam permasalahan perdagangan.<sup>2</sup> Dewasa ini, pasar bebas banyak didefinisikan sebagai keadaan perdagangan internasional tanpa tarif atau subsidi atas impor dan ekspor, juga tanpa pembatasan kuota atau lainnya. Hal ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh J. Black dan kawan-kawan dalam “*A Dictionary of Economics*”, yaitu:

*“Free trade is defined as a policy of unrestricted foreign trade with no tariffs or subsidies on imports or exports and no quotas or other trade restrictions. A free trade policy can be adopted unilaterally or on a bilateral basis by joining a free-trade area which is a group of countries without any tariffs or other trade restrictions between them, but remaining free to control their trade with non-members of the area.”*<sup>3</sup>

Pengimplementasian sistem pasar bebas di dunia kemudian banyak berkembang pasca perang dunia ke-dua, yang ditandai dengan terbentuknya *General Agreement in Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang menjadi landasan dalam kerja sama regional. Terbentuknya GATT kemudian memicu lahirnya kerja sama lain seperti *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1958 yang merupakan salah satu perjanjian pasar bebas pertama di era modern.<sup>4</sup> Perkembangan pasar bebas selanjutnya menyebar ke berbagai kawasan dengan munculnya kerja sama *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992, *Central European Free Trade Agreement* (CEFTA) pada tahun 1992, *North American Free Trade Area* (NAFTA) pada tahun 1994 dan lain sebagainya.

Pasar bebas terus mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah penerapannya. Pada tahun 2016, terdapat 331 perjanjian pasar bebas yang telah

---

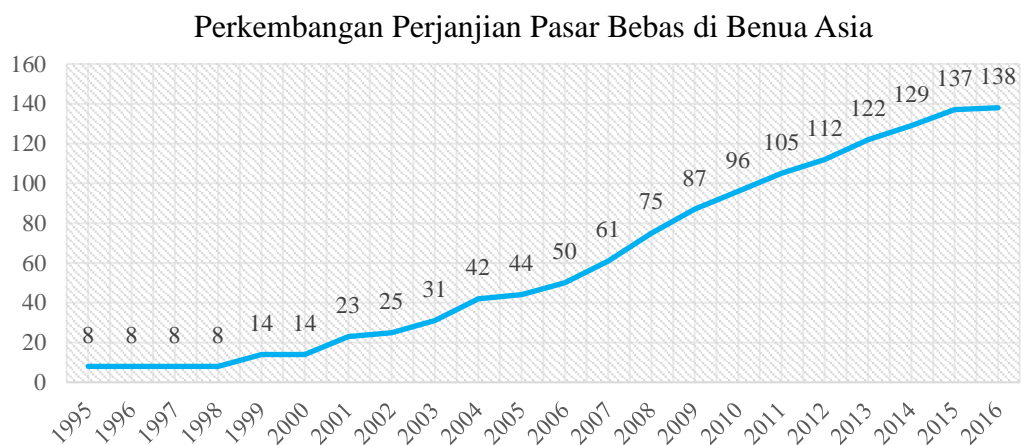
<sup>2</sup> Adam Smith, 1976, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Oxford: Oxford University Press. Halaman 347-361

<sup>3</sup> Jolanta Drozd dan Algirdas Miskinis, 2011, *Benefits and Threats of Free Trade*, Vilnius University: Ekonomika Economics. Halaman 41

<sup>4</sup> Shujiro Urata, 2002, *Globalization and the Growth in Free Trade Agreement*, *Asia-Pasific Review* Vol.9 No.1. Oxford: Routledge. Halaman 20-21

diterapkan dalam sistem internasional.<sup>5</sup> Jumlah tersebut mencakup pengimplementasian di hampir seluruh negara di dunia yang berlaku di berbagai kawasan. Dari seluruh pengimplementasian tersebut, sejumlah 245 kerja sama di antaranya berada di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO)<sup>6</sup> yang melibatkan setidaknya 164 negara.

Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan pesat dalam penerapan perjanjian pasar bebas adalah benua Asia. Penerapan pasar bebas di kawasan Asia mulai meningkat pesat sejak tahun 2000-an dan telah mencapai 147 perjanjian pada tahun 2016,<sup>7</sup> dimana 138 perjanjian diantaranya berada di bawah naungan WTO. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia telah tergabung dalam setidaknya 60% dari seluruh total perjanjian pasar bebas di dunia. Perkembangan pesat kemudian terjadi antara tahun 2000 – 2016 dimana terdapat 124 perjanjian baru atau sekitar 90% dari total seluruh perjanjian pasar bebas yang berlaku di Asia.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Perjanjian Pasar Bebas di Benua Asia (dibawah naungan WTO)<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Data diambil dari: <http://wits.worldbank.org/gptad/library.aspx> diakses pada 10 April 2017, pukul 19.45 WIB

<sup>6</sup> Data diambil dari: <http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx> diakses pada 10 April 2017, pukul 20.12 WIB

<sup>7</sup> Data diambil dari: <https://aric.adb.org/fta> diakses pada 10 April 2017, pukul 20.21 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

ACFTA menjadi salah satu perjanjian pasar bebas di kawasan Asia yang lahir pada era 2000-an. ACFTA resmi terbentuk pada *ASEAN-China Summit* ke-6 di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam pertemuan ini sepakat mengadopsi *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* yang menandai dimulainya kerja sama ACFTA.<sup>9</sup> Kerangka kerja sama tersebut kemudian terbagi atas tiga bidang yaitu: kerja sama peningkatan perdagangan barang yang berlaku sejak tahun 2004, perdagangan jasa yang berlaku sejak 2007, dan investasi yang berlaku sejak 2009.<sup>10</sup>

Pada bidang kerja sama perdagangan barang, setiap negara dalam ACFTA diwajibkan melakukan pengurangan tarif bea impor yang terbagi ke dalam tiga tahapan implementasi. Tahapan *pertama* yaitu *early harvest programme* berlaku atas produk-produk pertanian dan peternakan yang cenderung memiliki masa simpan relatif singkat. Tahapan *kedua* yaitu *normal track* berlaku atas produk-produk kimia, peralatan elektronik, hasil pertambangan, buku, bahan tekstil, dan lainnya. Sementara dalam tahapan *ketiga* yaitu *sensitive track* berlaku atas produk-produk hasil olahan industri pabrik, kebutuhan primer (makanan pokok dan pakaian), produk yang mudah pecah, dan produk terkait transportasi masyarakat.<sup>11</sup> Untuk perdagangan jasa, kerja sama ACFTA telah menghasilkan paket pertama dan kedua dalam *ASEAN – China Services Commitments* yang mencakup perluasan akses

---

<sup>9</sup> Di dapat dari data dokumen ACFTA [asean.org](http://asean.org) pada 23 Oktober 2017, pukul 11.25 WIB

<sup>10</sup> *ASEAN – China Free Trade Area: Building Strong Economic Partnership*. Diakses dari <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ACFTA.pdf> pada 11 Juni 2017, pukul 23.58 WIB

<sup>11</sup> Di olah dari seluruh dokumen pengurangan tarif dalam ACFTA, [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

pasar dan subsektor tambahan perdagangan jasa dari yang telah dikomitmenkan para pihak dalam WTO. Sedangkan untuk kerja sama peningkatan investasi, negara-negara ASEAN dan Tiongkok menyepakati bahwa masing-masing pihak berfungsi sebagai fasilitator yang berkewajiban mendukung jalannya arus investasi di antara kedua pihak.<sup>12</sup>

ACFTA kemudian tidak hanya menciptakan potensi keuntungan dalam perdagangan dan investasi antar negara-negara ASEAN dan Tiongkok, lebih dari itu telah membuka ruang kompetisi di antara kedua belah pihak yang semakin intensif. David Ricardo mengemukakan bahwa dalam kompetisi yang semakin terbuka di tengah pasar bebas, negara akan melakukan spesialisasi dan menemukan keunggulan komparatifnya sehingga pada akhirnya menguntungkan seluruh negara yang terlibat.<sup>13</sup> Keunggulan komparatif membuat beberapa negara mampu menghasilkan jenis barang atau jasa tertentu dengan lebih murah dan efisien. Sehingga meskipun tidak semua negara mendapat keuntungan yang sama, keunggulan komparatif tetap bermanfaat bagi kesejahteraan setiap individu atau negara dalam sistem internasional.<sup>14</sup>

Przemyslaw Kowalski dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membangun keunggulan komparatif suatu negara. Faktor-faktor tersebut dirangkumnya dari berbagai penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan sumber-sumber keunggulan komparatif pada level industri dan negara. Faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif tersebut pada level negara

---

<sup>12</sup> Di olah dari dokumen-dokumen perjanjian ACFTA dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2) diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 11.12 WIB.

<sup>13</sup> Susanda Sen, 2010, *International Trade Theory and Policy: A Review of The Literature. Working Paper* No. 635, New York: Levy Economics Institute of Bard College. Halaman 2

<sup>14</sup> Jill Steans dan kawan-kawan, 2010, *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, Third Edition*. London: Pearson education. Halaman 17

adalah: *endowment* (anugrah), modal manusia, ketersediaan kredit, suplai energi, pasar tenaga kerja, dan kebijakan tarif impor.<sup>15</sup>

Di tengah penerapan ACFTA yang telah secara optimal berlaku sejak 2010 untuk ASEAN 6 dan 2015 untuk ASEAN CLMV<sup>16</sup>, pada perjalanannya justru menimbulkan indikasi ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Situasi ketergantungan sendiri merupakan situasi dimana perekonomian negara-negara tertentu dikendalikan oleh pengembangan dan perluasan ekonomi negara-negara lain. Seperti yang dikemukakan oleh Dos Santos:

*“By dependence we mean a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected. The relation of interdependence between two or more economies, and between these and world trade, assumes the form of dependence when some countries (the dominant ones) can expand and can be self-sustaining, while other countries (the dependent ones) can do this only as a reflection of that expansion, which can have either a positive or a negative effect on their immediate development.”<sup>17</sup>*

Negara dominan dalam situasi ketergantungan tersebut mampu menciptakan aksi dalam memperluas ekonominya dan menjadi mandiri, sementara negara-negara yang bergantung hanya dapat mengembangkan ekonominya sebagai refleksi dari perluasan ekonomi negara dominan.

Indikasi ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dalam ACFTA kemudian didasari oleh beberapa indikator utama. *Pertama* – ketimpangan nilai ekspor dan pola pertumbuhan perdagangan barang di antara kedua pihak. Nilai ekspor dalam ACFTA menunjukkan bahwa jumlah keuntungan dan laju

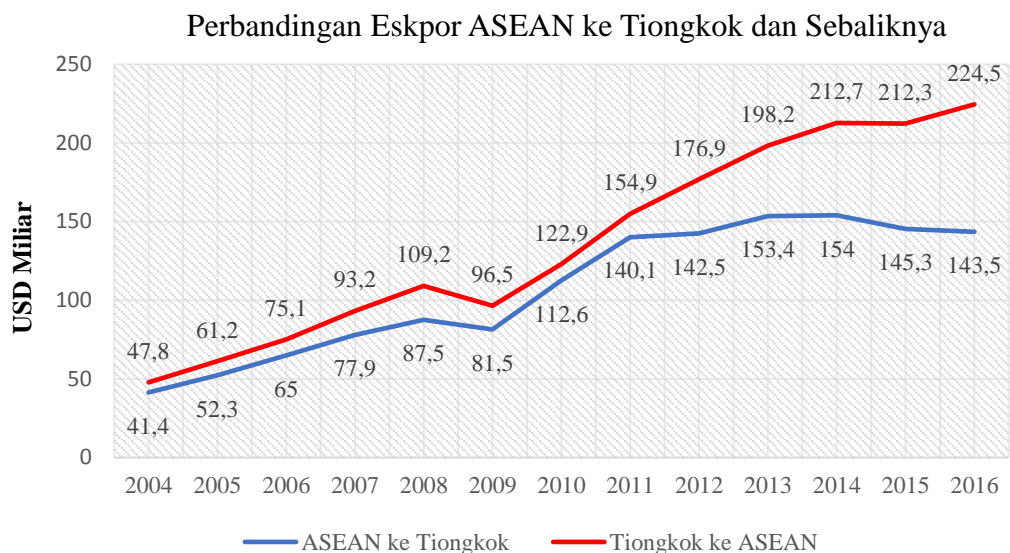
---

<sup>15</sup> Przemyslaw Kowalski, 2011, Comparative Advantage and Trade Performance, *OECD Trade Policy Paper* No. 121, OECD Publishing, Halaman 10-17

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Theotonio Dos Santos, 1970, The Structure of Dependence, *The American Economic Review* Vol. 60, No. 2, Tennessee: American Economic Association. Halaman 231

pertumbuhan yang terjadi lebih menguntungkan Tiongkok. Pada tahun 2016, total ekspor Tiongkok ke negara-negara ASEAN mencapai 224,5 miliar USD dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 11,5%. Sedangkan total ekspor seluruh negara-negara ASEAN ke Tiongkok lebih rendah atau hanya sejumlah 143,5 miliar USD dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sejumlah 9,1%. Ekspor Tiongkok ke ASEAN juga cenderung meningkat pesat pasca 2010 yang merupakan tahun berlaku secara optimalnya ACFTA untuk ASEAN 6. Di waktu yang sama, ekspor ASEAN ke Tiongkok justru tertahan dengan cenderung fluktuatif.



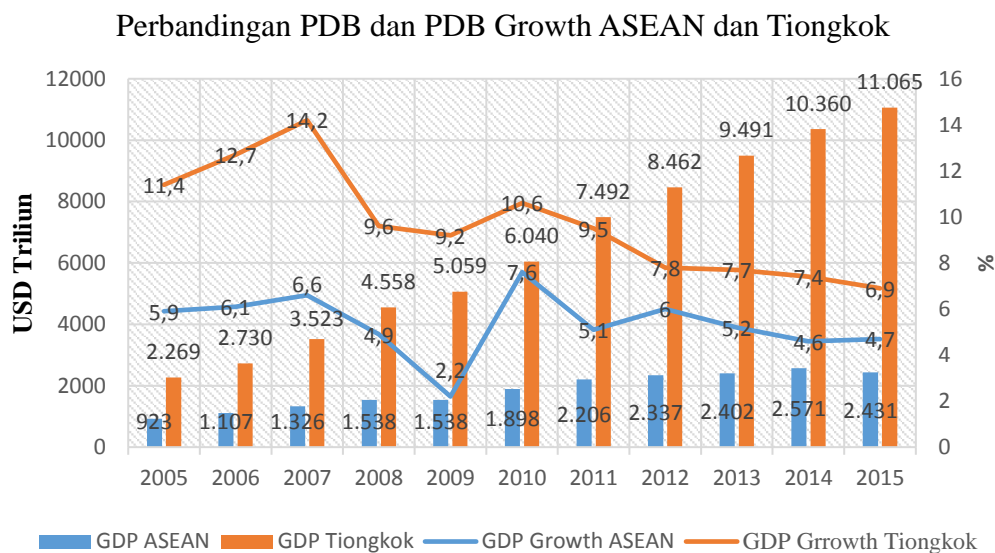
Gambar 1.2 Perbandingan Ekspor ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>18</sup>

Pola pertumbuhan ekspor di antara keduanya juga menunjukkan adanya kesamaan pola setiap tahunnya, dimana ketika Tiongkok mengalami peningkatan, ASEAN juga mengalami hal serupa. Sebaliknya ketika Tiongkok mengalami penurunan, ASEAN kembali menunjukkan hal yang sama. Pola pertumbuhan perdagangan yang sama setiap tahunnya, serta nilai ketimpangan keuntungan yang terjadi menunjukkan bahwa perkembangan ekspor ASEAN berpotensi menjadi

<sup>18</sup>Data di olah dari <http://www.aseanstats.org> Diakses pada 17 April 2017, pukul 21.12 WIB

refleksi dari pengembangan ekspor Tiongkok, yang mengindikasikan ketergantungan negara-negara ASEAN dalam ACFTA.

*Kedua* – ketimpangan nilai dan pola pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kedua pihak. Total PDB seluruh negara-negara ASEAN pada tahun 2015 adalah senilai 2.431 miliar USD, sedangkan total PDB Tiongkok mencapai 11.008 miliar USD (lebih dari 4 kali lipat PDB ASEAN). Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan dan perbandingan kekuatan ekonomi di antara keduanya bersifat asimetris atau tidak berimbang. Tiongkok dengan nilai PDBnya menjadi negara *superordinate* (dominan), sedangkan ASEAN menjadi negara *subordinate*.



Gambar 1.4 Perbandingan PDB dan PDB *Growth* ASEAN dan Tiongkok<sup>19</sup>

Pola pertumbuhan PDB diantara kedua pihak juga menunjukkan pola yang sama, dimana setiap kenaikan PDB Tiongkok dibarengi dengan kenaikan PDB ASEAN, sebaliknya penurunan PDB Tiongkok juga dibarengi dengan penurunan PDB ASEAN (kecuali pada tahun 2011). Hal ini ditambah fakta sebelumnya terkait

<sup>19</sup> Data PDB dan PDB Growth ASEAN & Tiongkok tahun 2005-2014 diperoleh dari <http://www.asean-cn.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=245&id=105> sedangkan data PDB dan PDB growth ASEAN tahun 2015 diperoleh dari <https://data.aseanstats.org> dan data PDB serta PDB Growth Tiongkok tahun 2015 diperoleh dari <https://data.worldbank.org>

ketimpangan kapabilitas ekonomi di antara kedua pihak, menambah indikasi bahwa pengembangan ekonomi ASEAN hanya menjadi refleksi dari perluasan ekonomi Tiongkok. Hal tersebut juga mengindikasikan situasi ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok.

*Ketiga* – pola kebijakan ASEAN dalam merespon dinamika hubungan ASEAN – Tiongkok. Di tengah kenyataan bahwa terjadi ketimpangan keuntungan dalam perdagangan barang, serta ketimpangan nilai PDB yang merepresentasikan perbedaan kapabilitas ekonomi, ASEAN justru menerima proposal Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ACFTA dan membuka ruang kompetisi dalam cakupan yang lebih luas dan kualitas yang lebih tinggi. Proposal yang diajukan oleh Tiongkok ditargetkan akan membuat total perdagangan kedua pihak mencapai 1 triliun USD dan investasi sejumlah 150 miliar USD pada tahun 2020.<sup>20</sup> ASEAN juga mendukung strategi kerja sama *inter-region* terbaru Tiongkok yaitu *One Belt One Road* (OBOR) dengan berjanji akan melakukan pertemuan secara reguler guna membahas kerja sama dalam peran OBOR terhadap pembangunan *ASEAN Connectivity*.<sup>21</sup> Kebijakan ini bertolakbelakang dengan kenyataan bahwa persaingan dengan Tiongkok masih berpotensi jauh lebih menguntungkan Tiongkok dibanding negara-negara ASEAN.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran dalam latar belakang sebelumnya menunjukkan bahwa keunggulan komparatif idealnya dikedepankan untuk bersaing di tengah kompetisi yang semakin terbuka dalam pasar bebas. Keunggulan komparatif tersebut

---

<sup>20</sup> Meredith Mille, 2015, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Zhao Hong, 2016, *Op. Cit.*



kemudian dibentuk oleh faktor-faktor pembangun yang mendukung kemampuan negara dalam menciptakan suatu jenis produk atau jasa tertentu dengan lebih murah dan efisien, yang akan membuat negara-negara di dunia mampu bersaing dan bertahan dalam persaingan global.

Kerja sama pasar bebas ACFTA kemudian justru mengindikasikan kondisi berbeda, yang memperlihatkan adanya ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Indikasi ketergantungan tersebut terlihat dari beberapa indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini kemudian menciptakan permasalahan penelitian yang berfokus pada pertanyaan: *Apakah faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif berpengaruh terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dalam kerja sama ACFTA?*

Masalah ini penting untuk diteliti karena ditakutkan melalui kerja sama ACFTA, negara-negara ASEAN justru bergantung terhadap Tiongkok sehingga kebijakan dalam dan luar negeri negara-negara ASEAN secara tidak langsung dikendalikan oleh Tiongkok. Masalah ini juga penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Hal ini diharapkan mampu menjadi rujukan kebijakan negara-negara ASEAN kedepannya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjadi arahan analisis lebih lanjut guna menjawab pertanyaan penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pembagian bidang, penurunan tarif, dan perkembangan dalam kerja sama ACFTA.

2. Mendeskripsikan tingkat keunggulan komparatif, faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif, serta ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan sebaliknya.
3. Mendeskripsikan pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dalam kerja sama ACFTA.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penjabaran analisis dan kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan Hubungan Internasional dengan mengisi kekosongan teori yang menjelaskan pengaruh keunggulan komparatif terhadap ketergantungan suatu negara. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menjelaskan gambaran pengaruh kerja sama dan keunggulan komparatif suatu negara terhadap pembangunan dan kesejahteraann, serta perdamaian dalam sistem internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, khususnya negara-negara ASEAN dalam menentukan kebijakan terkait ACFTA dan hubungan ASEAN – Tiongkok secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan negara-negara ASEAN dalam melihat seberapa parah ketergantungan yang terjadi antara negara-negara ASEAN ke Tiongkok

pada saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas tindakan apa yang secara umum dapat diambil oleh negara-negara dalam menyikapi ketergantungan terhadap Tiongkok.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi serangkaian penelitian terdahulu, landasan teoritis dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini dimulai dengan penjabaran mengenai beberapa penelitian terdahulu yang secara umum membahas tentang kerja sama, keunggulan komparatif, dan ketergantungan suatu negara. Landasan teoritis dalam penelitian ini akan menjabarkan beberapa teori dan konsep terkait kerja sama internasional, pasar bebas, keunggulan komparatif, dan ketergantungan. Bab ini kemudian ditutup dengan pemaparan kerangka berpikir dan hipotesis yang mengusung asumsi paham liberalisme interdependensi dimana keunggulan komparatif idealnya dikedepankan dalam pasar bebas dan lebih lanjut berpengaruh terhadap ketergantungan suatu negara.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dalam memulai penelitian, penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui gambaran hubungan antara kerja sama, keunggulan komparatif, dan ketergantungan. Hal ini dinilai penting dilakukan untuk memetakan keunikan serta pembaruan yang dimiliki oleh penelitian ini.

Penelitian pertama merupakan sebuah disertasi berjudul *“Understanding Africa’s China Policy: A Test of Dependency Theory and a Study of African*

*Motivations in Increasing Engagement with China*” karya Nkemjika E. Kalu.<sup>22</sup>

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya hubungan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya antara Afrika dan Tiongkok terutama melalui jembatan *Forum for China-Afrika Cooperation* (FOCAC). Peningkatan hubungan keduanya terjadi diiringi dengan perbedaan kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan. Hal ini menimbulkan asumsi adanya ketergantungan Afrika terhadap Tiongkok, sehingga hubungan keduanya disebabkan oleh keinginan Tiongkok dan ketidakmampuan Afrika untuk bertindak lain.

Penelitian tersebut mencoba menganalisis apakah terdapat ketergantungan yang signifikan di Afrika terhadap Tiongkok, dan apa yang menjadi motivasi sesungguhnya dibalik peningkatan kerja sama yang dilakukan oleh Afrika dengan Tiongkok. Sampel yang digunakan adalah negara Nigeria, dengan objek penelitian hubungan kerja sama antara Nigeria dan Tiongkok.

Nkemjika dalam penelitiannya cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan logika berfikir induktif, serta melibatkan beberapa konsep sebagai landasan alat bantu analisa, diantaranya: (1) konsep ketergantungan dan (2) *economic performance*, yang digunakan untuk melihat ketergantungan antara Nigeria dan Tiongkok serta menganalisis aksi peningkatan kerja sama keduanya. Indikator data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah PDB, *PDB growth*, *Gross National Income* (GNI), dan *Gross Natinal Product* (GNP) per kapita. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka.

---

<sup>22</sup> Nkemjika E. Kalu, 2012, *Understanding Africa's China Policy: A Test of Dependency Theory and a Study of African Motivations in Increasing Engagement with China*, Lincoln: University of Nebraska-Lincoln.

Penelitian Nkemjika menemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan keuntungan dan tren peningkatan keuntungan ekonomi yang diperoleh Nigeria dan Tiongkok. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan terdapatnya ketergantungan negara Nigeria ke Tiongkok. Penelitian ini juga menemukan bahwa alasan peningkatan hubungan antara Nigeria dan Tiongkok berdasarkan pada keuntungan bersama, bukan paksaan atau ketidakberdayaan akibat ketergantungan.

Penelitian karya Nkemjika kemudian berkontribusi terhadap peneliti dalam analisisnya terkait ketergantungan yang terjadi dari Nigeria ke Tiongkok. Latar penelitian yang berangkat dari terjadinya peningkatan hubungan antara dua negara di tengah perbedaan performa ekonomi memberikan gambaran baru terhadap peneliti bahwa perbedaan kapabilitas ekonomi tidak selamanya membuat suatu negara bergantung kepada negara lain. Penelitian tersebut juga unik karena menjadikan dua negara berbeda benua dan memiliki letak geografis yang sangat berjauhan sebagai objek dalam ketergantungan.

Penelitian kedua berjudul *“A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia”* Karya Ian Coxhead.<sup>23</sup> Penelitian tersebut berangkat dari pertumbuhan pesat dan integrasi Tiongkok dengan pasar global yang dinilai mempengaruhi keunggulan komparatif negara-negara Asia Tenggara yang lebih miskin. Pertumbuhan pesat dan integrasi Tiongkok dalam pasar global dinilai cenderung membuat keunggulan komparatif negara-negara Asia Tenggara hilang atau berkurang dalam industri manufaktur dan meningkat dalam sektor sumber daya alam.

---

<sup>23</sup> Ian Coxhead, 2007, A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia, *Journal of World Development* Vol. 35 No. 7. Amsterdam: Elsevier.

Penelitian tersebut kemudian mencoba menganalisis dampak pertumbuhan pesat Tiongkok terhadap keunggulan komparatif dan ketergantungan sumber daya di negara-negara Asia Tenggara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tiongkok dan delapan negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Singapura tidak disertakan karena dinilai tidak memenuhi syarat dalam latar penelitian, sedangkan Brunei tidak disertakan karena kurangnya data yang ada. Sampel data dalam penelitian adalah ekspor berbagai sektor industri yang ada di negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2004 (kecuali Thailand dan Vietnam pada rentang tahun 2000 hingga 2003).

Ian Coxhead dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan logika deduktif dan beberapa konseptual yang digunakan sebagai landasan pembentukan kerangka pemikiran. Beberapa konsep yang digunakan diantaranya: (1) konsep keunggulan komparatif, dan (2) *resource dependence*, keduanya digunakan dalam penelitian sebagai variabel dependen yang akan diteliti. Metode pengambilan data yang dilakukan adalah studi literatur yang berfokus pada pengambilan informasi data sekunder, seperti dari berbagai dokumen penelitian sebelumnya, situs resmi, dan lain-lain. Penelitian ini kemudian juga menggunakan metode *revealed comparative advantage* (RCA) untuk menganalisa keunggulan komparatif sektor-sektor industri di negara-negara Asia Tenggara.

Penelitian tersebut menemukan bahwa dampak dari peningkatan pesat dan integrasi Tiongkok dalam pasar global diprediksi hanya sedikit mempengaruhi keuntungan dan keunggulan komparatif negara-negara Asia Tenggara, bukan meniadakannya. Sementara kemungkinan akan terjadinya *resource curse* atau

kutukan sumber daya, dinilai bergantung pada koeksistensi pergeseran keunggulan komparatif dengan kegagalan pasar atau institusional yang melemahkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam dalam jangka panjang. Statistik menunjukkan bahwa Malaysia dan Thailand adalah negara yang membuat kemajuan positif dalam menuju institusi pemerintah yang kuat. Kamboja, Laos, Myanmar, dan lainnya sebaliknya cenderung memiliki institusi pemerintah yang lemah dan rentan dalam mengelola sumber daya alam.

Penelitian karya Ian Coxhead tersebut berkontribusi bagi penelitian ini dalam perhitungannya atas keunggulan komparatif negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok. Penelitian ini juga memberikan pandangan baru mengenai kutukan sumber daya dan ketergantungan yang dianalisis berdasarkan faktor institusi pemerintah. Keunikan dari penelitian tersebut sendiri terletak pada latar penelitian yang menganalisis dampak dari pertumbuhan pesat suatu negara terhadap negara-negara lain yang lebih miskin.

Penelitian ketiga berjudul *“The Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufactures Exports”* yang merupakan karya dari Siegfried Bender dan Kui-Wai Li.<sup>24</sup> Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa perubahan dalam keunggulan komparatif seharusnya merefleksikan perubahan dalam *endowment* suatu kawasan. Lebih lanjut, perubahan dalam kebijakan perdagangan juga dianggap mempengaruhi kinerja perdagangan suatu kawasan.

---

<sup>24</sup> Siegfried Bender dan Kui-Wai Li, 2002, *The Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufactures Exports*, *Cender Discussion Paper* No. 843, New Haven: Yale University.



Penelitian tersebut mencoba menganalisis kinerja ekspor manufaktur di sejumlah negara Asia dan Amerika Latin, serta menguji indeks keunggulan komparatif antara ekonomi negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika latin. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, diantaranya: Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Argentina, Chile, Kolombia, Meksiko, Peru, Venezuela, Bolivia dan Ekuador. Sampel negara tersebut dikombinasikan dengan berbagai data dalam rentang tahun 1981 sampai dengan tahun 1997.

Bender dan Li dalam penelitian nya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan logika deduktif dan beberapa konsep yang digunakan sebagai landasan pembentukan kerangka pemikiran, diantaranya: (1) keunggulan komparatif, (2) performa ekspor, dan (3) performa perdagangan, yang digunakan sebagai landasan serta alat analisis dalam menghasilkan kesimpulan. Penelitian Bender dan Li juga menggunakan metode RCA dalam menghitung tingkat keunggulan komparatif negara-negara sampel dalam industri manufaktur. Metode pengambilan data studi litelatur digunakan dalam penelitian tersebut, dimana peneliti berfokus untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber data sekunder.

Meskipun penelitian Bender dan Li mengakui bahwa metode RCA bukanlah ukuran yang sempurna karena tidak mampu menjelaskan perbedaan antara *endowment* dan perubahan kebijakan perdagangan, penelitian tersebut menganggap bahwa RCA masih dapat diterima karena dampak perubahan dalam kebijakan perdagangan dapat dilihat dari pergerakan RCA. Penelitian tersebut kemudian menemukan bahwa antara tahun 1980an dan 1990an terdapat pergeseran nilai keunggulan komparatif di Asia Timur yang mengarah pada sifat negatif. Pergeseran

yang negatif ini juga terjadi ditandai dengan peningkatan kekuatan ekspor negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin, sementara pergeseran nilai keunggulan komparatif di kawasan tersebut cenderung naik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengimplementasian NAFTA pada akhir 1980-an yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara-negara Amerika Latin.

Penelitian karya Bender dan Li berkontribusi terhadap penelitian ini dalam memberikan dasar perhitungan terkait pergeseran nilai RCA di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika latin yang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan perdagangan. Penelitian tersebut juga memberikan pemahaman mengenai kekurangan yang dimiliki oleh metode perhitungan RCA dalam menghitung keunggulan komparatif suatu industri di suatu negara, serta karena mampu membandingkan dan mengaitkan perubahan kebijakan perdagangan dengan keunggulan komparatif di tiga kawasan berbeda.

Penelitian keempat berjudul *“Comparative Advantage and Trade Performance: Policy Implications”* karya dari Przemyslaw Kowalski.<sup>25</sup> Penelitian tersebut berangkat dari perkembangan berbagai model dalam menghitung keunggulan komparatif suatu negara berdasarkan berbagai faktor yang digunakan. Penelitian tersebut disusun berdasarkan teori keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan, dengan faktor yang berfokus pada faktor kebijakan dan kelembagaan.

Penelitian kowalski bertujuan untuk menjelaskan apakah keunggulan komparatif masih relevan dalam menentukan nilai perdagangan dan untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi keunggulan komparatif suatu

---

<sup>25</sup> Przemyslaw Kowalski, 2011, *Comparative Advantage and Trade Performance: Policy Implication*, *OECD Trade Policy Paper* No. 121, OECD Publishing.

negara, khususnya pada area kebijakan dan kelembagaan. Sampel negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan sampel data tahun 1995 dan 2005.

Kowalski dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan logika deduktif dan beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi keunggulan komparatif untuk diuji pengaruhnya terhadap arus perdagangan. Beberapa faktor tersebut diantaranya: modal fisik, modal manusia, perkembangan finansial, penyediaan energi, iklim usaha, institusi pasar tenaga kerja dan kebijakan tarif. Penelitian tersebut kemudian menggunakan metode analisa regresi, serta menggunakan metode studi literatur yang berfokus dalam pencarian data serta informasi melalui berbagai sumber sekunder.

Penelitian Kowalski kemudian menemukan bahwa keunggulan komparatif tetap menjadi penentu nilai perdagangan. Pengaruh keunggulan komparatif tetap penting bagi perdagangan meskipun telah berubah seiring berjalannya waktu, termasuk sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan institusi. Analisa regresi yang dilakukan menemukan bahwa faktor area kebijakan dan kelembagaan merupakan yang paling signifikan keunggulan komparatif dan perdagangan, meliputi: akumulasi modal fisik dan manusia, perkembangan finansial, iklim usaha, serta sejumlah aspek institusi pasar kerja. Penelitian Kowalski juga berkontribusi terhadap penelitian ini dalam konteks analisisnya menentukan faktor yang mempengaruhi perbedaan keunggulan komparatif di suatu negara. Penelitian tersebut juga memberikan pemahaman bahwa keunggulan komparatif masih menjadi penentu perdagangan negara-negara di dunia.

Keempat penelitian terdahulu sebelumnya kemudian dipetakan dalam tabel

komparasi berikut:

Tab 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

	<b>Nkemjika E. Kalu</b>	<b>Ian Coxhead</b>	<b>Siegfried Bender dan Kui-Wai Li</b>	<b>Przemyslaw Kowalski</b>
<b>Topik Penelitian</b>	<i>Dependency</i> Nigeria ke Tiongkok dan motivasi sesungguhnya dibalik peningkatan kerja sama yang dilakukan kedua negara	Dampak pertumbuhan pesat Tiongkok terhadap keunggulan komparatif dan ketergantungan sumber daya alam negara-negara Asia Tenggara	Perubahan kinerja ekspor manufaktur dan keunggulan komparatif diantara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin .	Generalisasi teori empiris keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan, dengan faktor yang berfokus pada faktor kebijakan dan kelembagaan.
<b>Objek Penelitian</b>	Kerja sama Nigeria dan Tiongkok	Keunggulan komparatif dan ketergantungan sumber daya alam negara-negara Asia Tenggara	Kinerja ekspor manufaktur dan keunggulan komparatif kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika latin	Faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif dan arus perdagangan
<b>Metode</b>	Pendekatan: Kualitatif Sumber data: Sekunder Metode data: Studi Literatur	Pendekatan: Kuantitatif Sumber data: Sekunder Metode data: Studi Literatur	Pendekatan: Kuantitatif Sumber data: Primer dan sekunder Metode data: Studi Literatur	Pendekatan: Kuantitatif Sumber data: Sekunder Metode data: Studi Literatur
<b>Teori/Konsep</b>	1. <i>Dependency</i> 2. <i>Economic Performance</i>	1. Keunggulan Komparatif 2. <i>Resource Dependence</i>	1. Keunggulan Komparatif 2. Performa Ekspor 3. Performa Perdagangan	1. Keunggulan Komparatif 2. <i>Trade Flows</i>
<b>Kesimpulan</b>	Tidak terdapatnya ketergantungan negara Nigeria ke Tiongkok dan hubungan keduanya berdasarkan pada keuntungan bersama, bukan paksaan atau ketidakberdayaan akibat ketergantungan.	Peningkatan pesat dan integrasi Tiongkok dalam pasar global hanya sedikit mempengaruhi keunggulan komparatif Asia Tenggara dan terjadinya resource curse bergantung pada koeksistensi pergeseran keunggulan komparatif dengan kegagalan pasar atau institusional.	Antara tahun 1980an dan 1990an terdapat pergeseran nilai keunggulan komparatif di Asia Timur yang mengarah pada sifat negatif. Sementara pergeseran nilai keunggulan komparatif di negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin cenderung naik.	Keunggulan komparatif tetap menjadi penentu penting dalam perdagangan dan faktor area kebijakan serta kelembagaan yang paling menjadi penentu keunggulan komparatif dan perdagangan meliputi: akumulasi modal fisik dan manusia, perkembangan finansial, iklim usaha, serta sejumlah aspek institusi pasar kerja
<b>Kontribusi Penelitian</b>	Memberikan gambaran baru terhadap peneliti mengenai perbedaan kapabilitas ekonomi yang tidak selamanya membuat suatu negara bergantung kepada negara lain.	Penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai kutukan sumber daya dan ketergantungan yang dapat dianalisis berdasarkan faktor institusi pemerintah.	Memberikan pemahaman bahwa keunggulan komparatif dapat dihitung dengan dikaitkan terhadap perubahan kebijakan perdagangan. Juga memberikan pemahaman tentang kekurangan yang dimiliki oleh metode perhitungan RCA	Menjadi bahan pertimbangan terkait menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan keunggulan komparatif di suatu negara..

Secara umum, empat penelitian terdahulu sebelumnya memberikan gambaran dan pandangan baru mengenai kompleksitas kerja sama, keunggulan komparatif dan ketergantungan dalam tataran internasional. Masing-masing memiliki keunikan dan kontribusi tersendiri bagi berkembangnya penelitian peneliti, khususnya dalam aspek perhitungan keunggulan komparatif dan ketergantungan suatu negara. Masing-masing penelitian juga memberikan pemahaman baru bagi peneliti mengenai konsep-konsep dan teori yang digunakan.

Terdapat beberapa perbedaan antara empat penelitian terdahulu sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa perbedaan tersebut di antaranya: *objek penelitian*, berbeda dengan keempat penelitian terdahulu sebelumnya, objek penelitian ini adalah kerja sama yang dilakukan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam ACFTA. Perbedaan lain adalah *model penelitian*, penelitian ini bersifat analisis pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dalam kerja sama ACFTA, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.

Penelitian ini juga membawa beberapa pembaruan yang tidak terdapat di penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menghitung seberapa besar pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap tingkat ketergantungan yang terjadi antara negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini mengombinasikan dua konsep keunggulan komparatif dan ketergantungan dengan menghitung faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif dan indikator ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok, serta melakukan uji pengaruh keduanya. Hal ini tidak

dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang hanya menghitung masing-masing tingkat keunggulan komparatif dan ketergantungan suatu negara saja. Penelitian ini juga menganalisis ketergantungan pada level *Regional to State*, khususnya mengenai bagaimana satu negara dapat mempengaruhi suatu kawasan. Hal ini juga tidak terlihat dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu.

## **2.2 Landasan Teoritis**

Dalam menyusun landasan teoritis, penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang digunakan sebagai pengganti ketidakadanya teori yang lugas menjelaskan hubungan antara keunggulan komparatif dan ketergantungan. Beberapa konsep yang digunakan tersebut diantaranya adalah: kerjasama internasional dan pasar bebas yang digunakan sebagai landasan latar penelitian, konsep keunggulan komparatif dan konsep ketergantungan yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kerangka berpikir dan menjelaskan indikator untuk menghitung nilai serta pengaruh keduanya.

### **2.2.1 Kerja sama Internasional**

Kerja sama dideskripsikan oleh Robert O. Keohane sebagai keadaan yang terjadi ketika aktor internasional mampu menyesuaikan perilaku mereka terhadap keadaan aktual atau kecenderungan antisipasi dari aktor lain melalui proses koordinasi kebijakan. Kerja sama mensyaratkan adanya aksi dari aktor internasional yang terpisah dan dihubungkan satu sama lain melalui suatu proses negosiasi.<sup>26</sup> Kerja sama oleh Keohane juga dikatakan dapat berlaku dalam kondisi

---

<sup>26</sup> Robert O. Keohane, 1984, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, New Jersey: Princenton University Press. Hal. 51

tertentu berdasarkan kepentingan yang sudah ada sebelumnya dan saling melengkapi diantara negara-negara di dunia.<sup>27</sup>

James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. mendefinisikan kerja sama sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau kekerasan dan delegitimasi, dengan persetujuan bersama dari negara yang terlibat. Kerja sama dikatakan dapat terjadi sebagai hasil penyesuaian perilaku oleh aktor sebagai tanggapan terhadap dan atau untuk mengantisipasi preferensi aktor lainnya. Selain itu, kerja sama dapat timbul baik dari komitmen individu aktor terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai hasil dari persepsi kepentingan pribadi.<sup>28</sup>

Kerja sama juga didefinisikan oleh Lauri Siitonen sebagai segala bentuk interaksi sosial antara aktor yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela dengan berbagi sumber daya tertentu bersama-sama. Kerja sama tidak boleh dilihat sebagai hubungan yang harmonis dimana tidak ada konflik. Sebaliknya, kerja sama memungkinkan keterlibatan perebutan kekuasaan tersembunyi diantara para aktor, dan mungkin bekerja berdasarkan cara dominasi suatu aktor terhadap aktor lainnya.<sup>29</sup>

Helen Milner mengemukakan bahwa kerja sama dapat tercapai dalam beberapa cara. Pertama, kerja sama dapat terjadi secara diam-diam dan tanpa komunikasi atau kesepakatan secara eksplisit. Kedua, kerja sama dapat terbentuk secara eksplisit berdasarkan negosiasi dan proses tawar-menawar antar aktor

---

<sup>27</sup> Anne L. Herbert, 1996, *Cooperation in International Relation: A Comparison of Keohane, Haas and Franck*, *Berkeley Journal of International Law* Vol. 14 Issue 1. California: University of California. Hal. 225

<sup>28</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., 2001, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Fifth Edition*. New York: Addison Wesley Longman, Inc. Hal. 505-506

<sup>29</sup> Lauri Siitonen, 1990, *Political Theories of Development Cooperation – A study of Theories of International Cooperation*, *Wider Working Papers* No. 86, Helsinki: World Institute for Development Economics Research of the United Nations University. Hal. 7

internasional. Ketiga, kerja sama dapat terjadi dengan cara dipaksakan oleh suatu aktor internasional kepada aktor lainnya.<sup>30</sup>

Beberapa konsep kerja sama di atas memperlihatkan bahwa kerja sama tidak dapat lepas dari kepentingan nasional suatu negara. Kerja sama idealnya dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinir kepentingan masing-masing negara agar saling melengkapi satu sama lain dan mencapai tujuan bersama. Kerja sama juga dapat terjadi dalam keadaan damai maupun konflik, bergantung kepada kepentingan nasional yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, kerja sama juga tidak dapat berjalan tanpa terdapat kesepakatan antar aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, meskipun kerja sama dapat terbentuk karena keterpaksaan. Sehingga dengan demikian keuntungan yang didapat dari kerja sama tidak selamanya bersifat adil.

Hal tersebut sejalan dengan sifat kerja sama yang dapat bersifat *zero-sum game* maupun *positive-sum game*. *Zero-sum game* oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi didefinisikan sebagai keadaan dimana keuntungan yang diperoleh suatu aktor akan menyebabkan kerugian di aktor lain. Sehingga agregat keuntungan yang terjadi dalam keseluruhan kerja sama hanya akan bersifat *zero* atau nol.<sup>31</sup> Sedangkan, *positive-sum game* didefinisikan oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen sebagai keadaan dimana keuntungan yang ditimbulkan bersifat timbal-balik. Sehingga seluruh aktor akan mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang

---

<sup>30</sup> Helen Milner, 1992, Review of International Theories of Cooperation among Nations and Saving the Mediterranean, *Journal of World Politics* Vol. 44 No. 3. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 469

<sup>31</sup> Paul R. Viotti dan Mark. V Kauppi. 2012. *International Relations Theory: Fifth Edition*. Glenview: Pearson Education, Inc. Hal. 55



dilakukan.<sup>32</sup> Keuntungan yang ditimbulkan *positive-sum game* bukan berarti berlaku dalam konteks yang sama. Suatu negara dapat untung dengan jumlah yang besar, sedangkan negara lain untung dengan jumlah yang berbeda. Namun, perbedaan keuntungan tersebut tidak akan mengakhiri kerja sama asalkan terpenuhinya kepentingan masing-masing negara yang terlibat.

Konsep kerja sama menurut Helen Milner memiliki dua elemen penting, yaitu: elemen perilaku dan elemen keuntungan. Elemen perilaku dalam kerja sama mengasumsikan bahwa setiap perilaku negara tertuju kepada beberapa tujuan. Di dalam kerja sama tidak diharuskan terdapat kesamaan tujuan bagi setiap aktor yang terlibat, namun tujuan-tujuan yang ada harus memiliki rasionalitas yang diterima oleh setiap aktor. Elemen keuntungan mengatakan bahwa kerja sama memberikan keuntungan atau penghargaan terhadap aktor yang terlibat. Keuntungan yang diterima tidaklah harus sama bagi setiap negara, namun harus bersifat menyeluruh sehingga tidak ada negara yang benar-benar dirugikan.<sup>33</sup> Ketiadaan salah satu elemen kerja sama dengan demikian akan berdampak signifikan dalam proses kerja sama yang terjadi. Negara-negara yang terlibat akan memiliki rasa curiga masing-masing dan ketidakpuasan akibat hasil kerja sama yang tidak menguntungkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap *outcome* yang muncul dalam kerja sama tersebut.

Bentuk dari kerja sama internasional juga dapat berupa kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua aktor internasional yang memiliki kesamaan tujuan atau perbedaan tujuan namun masih dalam satu rasionalitas. Sementara kerja sama multilateral merupakan

---

<sup>32</sup> Robert Jacson dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 166

<sup>33</sup> Helen Milner, *Op. Cit.* Hal. 468

kerja sama yang dilakukan oleh tiga atau lebih aktor internasional. Kerja sama internasional juga dapat dilakukan secara langsung diantara aktor internasional maupun melalui pembentukan institusi atau organisasi yang mempermudah berjalannya kerja sama tersebut. Pembentukan institusi atau organisasi dalam kerja sama internasional biasanya berupa kerja sama multilateral yang memiliki kesamaan tujuan atau kawasan yang berdekatan.

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang berpengaruh dalam sektor ekonomi adalah perdagangan serta investasi. Perdagangan dan investasi yang terjadi dalam kerja sama internasional banyak dilandasi perjanjian pasar bebas antar negara. David Ricardo melalui pemikirannya mengatakan bahwa setiap negara dalam perdagangan internasional pada dasarnya memiliki keunggulan komparatif dan akan mencapai kesejahteraan melalui spesialisasi produksi barang ataupun jasa berdasarkan keunggulan komparatif tersebut.

### **2.2.2 Pasar Bebas**

Pasar bebas didefinisikan oleh J. Black dan kawan-kawan sebagai sebuah kebijakan perdagangan luar negeri yang tidak dibatasi oleh tarif atau subsidi impor dan ekspor, serta tidak terdapat kuota atau pembatasan perdagangan lainnya. Kebijakan pasar bebas dapat diadopsi suatu negara secara unilateral atau bilateral dengan bergabung ke dalam wilayah pasar bebas yang berisikan kelompok negara dengan perdagangan tanpa tarif atau pembatasan lain, negara yang bergabung dalam wilayah tersebut masih bebas untuk mengendalikan kebijakan perdagangan mereka dengan negara-negara bukan anggota wilayah pasar bebas yang diikuti.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Jolanta Drozd dan Algirdas Miskinis, 2011. *Op. Cit.*.

Pasar bebas juga didefinisikan oleh Regine Adele N. F. sebagai sistem dimana perdagangan barang dan jasa antar negara atau dalam negara itu sendiri mengalir tanpa hambatan oleh pembatasan dan intervensi yang dipaksakan pemerintah. Intervensi tersebut mencakup pajak dan tarif, hambatan non-tarif seperti peraturan perundang-undangan dan kuota, bahkan perjanjian perdagangan yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri.<sup>35</sup>

Dari dua definisi tersebut kita dapat memaknai bahwa syarat utama berjalannya sistem pasar bebas adalah hilangnya hambatan dan intervensi dari pemerintah atas perdagangan yang dilakukan. Dengan demikian, peran pemerintah secara tidak langsung diminimalisir dalam perdagangan pasar bebas, serta akan membuat peluang keuntungan dan kompetisi yang terjadi antar aktor-aktor yang terlibat menjadi meningkat. Meskipun hambatan dan intervensi yang biasanya membatasi dan mengatur kerjasama perdagangan diminimalisir bahkan dapat dihilangkan, pada praktiknya pasar bebas masih diatur atau dibatasi sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan.

Perkembangan konsep pasar bebas sendiri pada awalnya populer berkat karya Adam Smith yang berjudul "*Wealth of Nations*" pada tahun 1776. Adam Smith melalui karyanya tersebut mengeluarkan konsep "*invisible hand*" yang mengatur dinamika pasar dan menggerus peran pemerintah.<sup>36</sup> Di dalam sistem pasar bebas yang menghasilkan peluang serta kompetisi, David Ricardo menambahkan dalam karyanya dengan mengemukakan bahwa setiap negara akan mencapai keuntungan dengan melakukan spesialisasi produk barang atau jasa. Spesialisasi

---

<sup>35</sup> Regine Adele N. F., 2012, Protectionism and Free Trade: A Country's Glory or Doom?, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 3, No. 5. [www.ijtef.org](http://www.ijtef.org) Hal. 351

<sup>36</sup> Adam Smith, 1976, *Op. Cit.*

produk tersebut akan membuat setiap aktor dalam kompetisi mengalami keuntungan dengan efisiensi biaya produksi yang lebih baik. Konsep ini kemudian dikenal dengan *comparative advantage* atau keunggulan komparatif.

Beberapa ahli ekonomi dunia kemudian menegaskan bahwa pasar bebas dapat berdampak pada kesejahteraan suatu negara, khususnya terhadap kemiskinan melalui tiga cara yaitu: <sup>37</sup>

1. Melalui pengaruhnya terhadap harga barang (dan jasa). Pasar bebas dengan sistem yang menghilangkan batasan perdagangan seperti tarif, kuota, dan lainnya akan membuat biaya produksi termasuk transportasi bea cukai ke suatu negara lebih murah. Dengan demikian harga dipasaran tentunya juga lebih murah dan berdampak pada daya beli masyarakat yang meningkat. Harga barang di dalam sistem pasar bebas juga di dukung dengan spesialisasi produk yang dapat dilakukan oleh suatu negara.
2. Melalui dampaknya terhadap keuntungan, pekerjaan dan remunerasi. Pengaruh pasar bebas terhadap perdagangan barang dan jasa kemudian akan meningkatkan keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara. Keuntungan tersebut akan berpengaruh positif terhadap jumlah lapangan pekerjaan dan kompensasi yang diterima oleh pekerja dari pekerjaannya.
3. Melalui pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Keterbatasan pemerintah dalam intervensi di perdagangan pasar bebas,

---

<sup>37</sup> Cephas Lumina, 2008, Free Trade or Just Trade? The World Trade Organisation, Human Rights and Development (Part 1), *African Journals Online (AJOL)*, Vol. 12, No. 2. Grahamstown: African Journals Online. Hal. 25

akan membuat peningkatan kebijakan fiskal yang menguntungkan masyarakat. Hal tersebut membuat belanja pemerintah banyak tersalurkan kedalam pembangunan dan penambahan lapangan pekerjaan.

Jolanta Drozd dan Algirdas Miskinis dalam karyanya mengemukakan bahwa salah satu manfaat dari terbentuknya sistem pasar bebas bagi suatu negara adalah meningkatnya spesialisasi atau keunggulan komparatif negara-negara di dunia. Hal ini dinilai akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi suatu negara karena berkurangnya biaya imbalan dan produksi.<sup>38</sup> Keunggulan komparatif dengan demikian selain dianggap sebagai salah satu solusi dalam kompetisi pasar bebas, juga dianggap menjadi hasil dan manfaat dari pasar bebas itu sendiri.

### **2.2.3 Keunggulan Komparatif**

Keunggulan komparatif pertama kali populer dari buah pikiran David Ricardo pada awal abad ke 19. Ricardo berpendapat bahwa masing-masing negara dalam perdagangan internasional memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beberapa jenis barang dan jasa. Keunggulan komparatif ini dapat dipengaruhi oleh sumber daya alam, atau komposisi dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh pekerja. Keunggulan komparatif membuat beberapa negara selalu dapat menghasilkan jenis barang atau jasa tertentu dengan lebih murah dan efisien. Sehingga meskipun tidak semua negara mendapat keuntungan yang sama, memiliki keunggulan komparatif tetap bermanfaat untuk mendorong kesejahteraan setiap individu atau negara dalam sistem internasional.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Jolanta Drozd dan Algirdas Miskinis, 2011. *Op. Cit.*. Hal. 41-43

<sup>39</sup> Jill Steans dan kawan-kawan, 2010. *Op. Cit.*

Ricardo mencontohkan negara Inggris dan Portugal yang memproduksi pakaian kain dan anggur dengan menggunakan tenaga kerja sebagai input penjualan dalam produksi. Ricardo berasumsi bahwa produktivitas tenaga kerja yang bervariasi antara industri dan antar negara mempengaruhi keunggulan komparatif.<sup>40</sup> Keunggulan komparatif menurut pendapat Ricardo tersebut banyak menjadi pemikiran utama dari perkembangan teori keunggulan komparatif berikutnya.

Teori keunggulan komparatif selanjutnya dikembangkan oleh G. Haberler yang mengatakan bahwa dalam memandang dan menentukan keunggulan komparatif, teori biaya imbalan (*theory opportunity cost*) dinilai akan lebih relevan. Argumentasi dasar dari pendapat tersebut adalah bahwa harga relatif dari suatu komoditas ditentukan berdasarkan perbedaan dengan biaya produksi komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan komoditas yang bersangkutan.<sup>41</sup> Heckscher dan Ohlin juga mengembangkan teori yang mengatakan bahwa keunggulan komparatif tidak lagi dipandang berdasarkan perbedaan teknologi, tapi juga atas perbedaan *factor endowment* suatu negara.<sup>42</sup>

Alan V. Deardorff dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat dua hukum keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, yaitu hukum positif dan hukum normatif. Deardorff berargumen bahwa dalam hukum positif keunggulan komparatif, jika suatu negara diizinkan melakukan perdagangan, maka negara tersebut akan mengeksport barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif.

---

<sup>40</sup> Zulkifli Mantau, 2009, Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Tani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, Bogor, Tesis Institut Pertanian Bogor. Hal. 9-10

<sup>41</sup> Supena Friyatno, Saptana, dan Sumaryanto, 2012, Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Komoditas Kentang dan Kubis di Wonosobo Jawa Tengah, Jurnal SOCA (*Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol 2 No. 1, Bali: Universitas Udayana. Hal. 3

<sup>42</sup> Takashi Negishi, 2014, *Development of International Trade Theory: Second Enhanced Edition*, Tokyo: Springer. Hal. 75

Sedangkan hukum normatif mengatakan bahwa jika suatu negara diizinkan melakukan perdagangan, maka suatu negara akan memperoleh keuntungan yang melebihi biaya perdagangan. Hal tersebut berdasarkan keunggulan komparatif negara yang membuat produksi lebih efisien dibandingkan negara-negara lain.<sup>43</sup>

Teori keunggulan komparatif dalam perkembangannya kemudian menghasilkan keunggulan kompetitif di dalam persaingan pasar. Keunggulan komparatif yang berfokus pada sumber daya negara dalam menghasilkan efisiensi produk pada akhirnya dinilai akan menjadi senjata bagi negara untuk menghasilkan posisi kompetitif yang lebih unggul dalam persaingan. Keunggulan kompetitif yang dimaksud pada level mikro atau perusahaan dapat berupa performa finansial yang lebih superior. Sedangkan pada level ekonomi makro dapat berupa kualitas produksi yang superior, lebih efisien, dan berinovasi.<sup>44</sup>

Keunggulan komparatif juga kemudian menghasilkan keunggulan distingtif (*distinctive advantage*) yang berfokus pada faktor pembeda produk dalam persaingan pasar. Keunggulan kompetitif dinilai mudah ditiru sehingga tidak memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, keunggulan distingtif muncul dengan membuat ide dan gagasan produk yang berbeda dan sulit ditiru sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Beberapa peneliti telah mengembangkan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghitung keunggulan komparatif. Salah satu yang paling umum adalah indeks Ballasa (1965) yang biasa disebut *Revealed Comparative Advantage*

---

<sup>43</sup> Alan V. Deardoff, 1998, Benefits and Cost of Following Comparative Advantage, *Research Seminar in International Economics Discussion Paper* No. 423, Michigan: University of Michigan. Hal. 7

<sup>44</sup> Shelby D. Hunt dan Robert M. Morgan, 1995, The Comparative Advantage Theory of Competition, *Journal of Marketing* Vol. 59 No. 2, Chicago: The American Marketing Association. Hal. 7-9

(RCA). RCA menghitung keunggulan komparatif berdasarkan kesuksesan ekspor suatu jenis barang atau jasa di negara-negara dalam perdagangan internasional,<sup>45</sup> namun metode ini banyak dikritik karena dianggap lebih menghitung daya saing dibandingkan keunggulan komparatif.

Metode lain yang dikembangkan dalam menghitung nilai keunggulan komparatif suatu negara adalah metode *Domestic Resource Cost* (DRC) yang diusulkan pertama kali oleh Bruno (1965). DRC menghitung keunggulan komparatif berdasarkan nilai biaya domestik yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah produk. Metode ini banyak dipakai oleh peneliti dan dianggap lebih relevan dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menghitung keunggulan komparatif.<sup>46</sup>

Przemyslaw Kowalski dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membangun keunggulan komparatif suatu negara. Faktor-faktor tersebut diambil dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan sumber-sumber keunggulan komparatif pada level industri dan level negara yang telah diuji secara kuantitatif. Dalam level negara, faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif tersebut di antaranya:

1. *ndowment* : dihitung dari nilai rasio modal terhadap tenaga kerja.
2. Modal manusia : dihitung dari total tenaga kerja yang telah meneyam *secondary* (di Indonesia setingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas) dan *tertiary education* (dunia perkuliahan), serta total rata-rata waktu sekolah masyarakat

---

<sup>45</sup> Eckhard Siggel, 2006, International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and proposal for Measurement. *Journal of Industry, Competition, and Trade*, Vol. 6 Issue 2. US: Springer. Hal. 3

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal. 17-18



3. Ketersediaan kredit : dihitung dari nilai rasio kredit domestik untuk sektor privat terhadap PDB negara.
4. Energi suplai : dihitung dari nilai *total primary energy suply*.
5. Iklim bisnis : dihitung dari indeks kualitas pengarturan, pengendalian hukum, dan kontrol korupsi
6. Pasar tenaga kerja : dihitung dari biaya terhadap kerja di jam tambahan, biaya dalam pemecatan, prosedur pemecatan, dan alternatif kontrak.
7. Kebijakan tarif impor : dihitung dari nilai rata-rata tarf impor yang ditetapkan.<sup>47</sup>

#### **2.2.4 Konsep Ketergantungan**

Isu *dependency* atau ketergantungan suatu negara pertama kali muncul sebagai respon dari kegagalan program *Economic Commission for Latin America* (ECLA) yang lahir pada tahun 1948 dan berada di bawah naungan PBB. Awalnya, program ini ditujukan sebagai strategi untuk mewakili keberadaan kelompok negara *periphery* (miskin) dalam menolak hegemoni intelektual Amerika mengenai modernisasi. Strategi proteksi dan industrialisasi yang ECLA lakukan pada saat itu justru menghasilkan pengangguran, inflasi, devaluasi mata uang, penurunan perdagangan, dan masalah ekonomi lainnya. Konsep ketergantungan kemudian muncul dengan asumsi bahwa ketergantungan dihasilkan melalui pertukaran ekonomi yang tidak merata. Beberapa pemikir seperti Baran (1957) dan Prebisch (1959) telah mengarahkan para peneliti untuk memeriksa dimensi ketergantungan

---

<sup>47</sup> Przemyslaw Kowalski, 2011, *Comparative Advantage and Trade Performance*, *OECD Trade Policy Paper* No. 121, OECD Publishing. Hal. 10-17

ekonomi dalam menganalisis penyebab ketergantungan. Sedangkan dimensi lain khususnya ketergantungan politik dan budaya dianggap sebagai produk alami.<sup>48</sup>

Ketergantungan sendiri oleh Theotonio Dos Santos (1970) didefinisikan sebagai situasi dimana perekonomian negara-negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan ekonomi negara-negara lain. Hubungan saling-ketergantungan di antara negara-negara di dunia dianggap sebagai bentuk ketergantungan ketika beberapa negara (dominan) mampu menciptakan aksi dalam memperluas ekonominya dan menjadi mandiri, sementara negara-negara lainnya (yang bergantung) hanya dapat mengembangkan ekonominya sebagai refleksi dari perluasan ekonomi negara dominan.<sup>49</sup>

Tidak semua negara akan gagal mengalami pertumbuhan ekonomi dalam keadaan ketergantungan. Negara-negara di dunia tetap akan mengalami pertumbuhan meskipun pertumbuhan negara-negara berkembang cenderung hanya terjadi jika negara maju memiliki kebutuhan akan bahan baku atau produk pertanian tertentu.<sup>50</sup> Makna dari penjelasan tersebut menyiratkan ketergantungan adalah keadaan yang dapat terjadi pada saat adanya perbedaan kapabilitas ekonomi diantara negara-negara. Perbedaan kapabilitas ekonomi akan membentuk struktur internasional yang membuat negara dominan dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi dan membatasi perkembangan negara lain. Situasi ketergantungan juga memungkinkan negara-negara yang bergantung untuk mengalami pertumbuhan

---

<sup>48</sup> Jie Huang dan Kazimer M. Stomezynski, 2004, *The Dimensionality and Measurement of Economic Dependency*. *International Journal of Sociology* Vol. 33 No. 4, Abingdon: Taylor and Francis Group. Hal. 83

<sup>49</sup> Theotonio Dos Santos. *Op. Cit.*

<sup>50</sup> Paul R. Viotti dan Mark. V Kauppi, *Op. Cit.* Hal. 200

ekonomi, meskipun pertumbuhan yang terjadi cenderung dikarenakan kebutuhan negara maju akan bahan baku atau produk pertanian tertentu.

Teori ketergantungan melihat bahwa keterbelakangan (*underdevelopment*) negara disebabkan oleh faktor-faktor eksternal terutama faktor ekonomi. Negara-negara berkembang didominasi kepentingan asing yang berasal dari negara dominan. Keterbelakangan juga dianggap bukan sebagai sebuah proses menuju negara maju yang dialami oleh semua negara, melainkan merupakan hasil dari proses perkembangan kapitalis global.<sup>51</sup> Teori ketergantungan juga melihat bahwa faktor eksternal negara dalam keterbelakangan bersifat intrinsik di dalam sistem kapitalis. Faktor intrinsik ini beragam dan kadang tersembunyi secara politik, finansial, ekonomi, teknis dan efek budaya dalam negara terbelakang.<sup>52</sup>

Untuk menghitung tingkat ketergantungan suatu negara, para peneliti ketergantungan lintas generasi telah mengembangkan berbagai metode dan indikator yang merefleksikan ketergantungan. Salah satu penelitian awal mengenai konseptualisasi dalam menghitung ketergantungan adalah karya Robert R. Kaufman dan kawan-kawan (1975) yang berpendapat bahwa ketergantungan ekonomi dapat dihitung berdasarkan *trade dependency* dan *capital dependency*. Kaufman dan kawan-kawan dalam penelitian ini menganalisis dampak dari ketergantungan ekonomi terhadap stratifikasi sosial yang dihitung melalui *gini indices of land* dan *sectoral income inequality*, performa ekonomi yang dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan GNP, infrastruktur politik yang dihitung berdasarkan presentasi jumlah voting presiden dari jumlah pemilih terdaftar dan

---

<sup>51</sup> Robert Jacson dan Georg Sorensen. *Op. Cit.* Hal. 190

<sup>52</sup> Osvaldo Sunkel, 1972, Big Business "Dependencia": A Latin American View, *Journal of Foreign Affairs* Vol. 50 No.3, Tampa: Foreign Affairs. Hal. 519

data *union membership* dari total aktif populasi ekonomi negara, serta karakteristik sistem politik yang dihitung berdasarkan ranking dari *cross-polity time series data* dan putnam's *militarism index*.<sup>53</sup>

Penelitian lain mengenai konseptualisasi dalam menghitung ketergantungan ekonomi dilakukan oleh Christopher Chase-Dunn pada tahun 1975. Chase-Dunn menghitung ketergantungan ekonomi berdasarkan variabel ketergantungan investasi per kapita dan ketergantungan hutang per kapita. Chase-Dunn dalam penelitian ini menganalisis efek dari ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan penghasilan.<sup>54</sup> Jacques Delacroix dan Charles C. Ragin (1981) juga memberikan tambahan konseptualisasi dalam menghitung ketergantungan ekonomi berdasarkan dua variabel, yaitu: besarnya partisipasi (perdagangan dan Investasi) dan bentuk partisipasi (spesialisasi dan konsentrasi ekspor) suatu negara. Kedua variabel tersebut didukung oleh indikator: rasio perdagangan luar negeri negara atas GNP-nya (ketergantungan perdagangan), rasio saham investasi asing atas GNP (ketergantungan investasi), dan tingkat spesialisasi dari produk utama serta tingkat konsentrasi komoditas ekspor.<sup>55</sup>

York W. Bradshaw (1985) dalam karyanya meneliti ketergantungan di Afrika dan menghitung tingkat ketergantungan berdasarkan tiga variabel: ketergantungan investasi, besaran ketergantungan perdagangan, dan bentuk

---

<sup>53</sup> Robert R. Kaufman, Harry I. Chernotsky, dan Daniel S. Geller, 1975, A Preliminary Test of the Theory of Dependency, *Journal of Comparative Politics* Vol. 7 No. 3. New York: City University of New York. Hal. 315-316

<sup>54</sup> Christopher Chase-Dunn, 1975, The effect of International Dependence on Development and Inequality: A Cross-National Study, *American Sociological Review* Vol. 40 No. 6. Washington D.C.: American Sociological Association. Hal. 727-728

<sup>55</sup> Jacques Delacroix dan Charles C. Ragin, 1981, A Cross-nation Study of Economic Dependency, State Efficacy, and Underdevelopment, *American Journal of Sociology* Vol. 86 NO. 6. Chicago: American Journal of Sociology. Hal. 1321-1323

ketergantungan perdagangan.<sup>56</sup> Pada tahun 1990, Bradshaw kembali melakukan penelitian bersama Zwelakhe Tsandu mengenai dampak ketergantungan terhadap berbagai aspek di Afrika. Variabel yang digunakan oleh Bradshaw dan Tsandu dalam menghitung ketergantungan ekonomi adalah ketergantungan terhadap investasi dan ketergantungan terhadap hutang.<sup>57</sup>

Salah satu penelitian terbaru mengenai konseptualisasi dalam menghitung ketergantungan ekonomi adalah karya Jie Huang dan Kazimierz M. Stomezynski. Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi utama yaitu: perdagangan internasional, hutang luar negeri, dan investasi dari luar negeri. Sementara pembeda yang dibawa penelitian ini terletak pada berbagai indikator yang digunakan.<sup>58</sup>

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan asumsi liberalisme interdependensi dimana pada ruang kompetisi yang semakin terbuka dalam pasar bebas, negara-negara akan membentuk situasi saling ketergantungan dan idealnya mengedepankan keunggulan komparatifnya masing-masing. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara kemudian didasari oleh beberapa faktor pembangun keunggulan komparatif tersebut. Berlandaskan pada pengkajian konsep keunggulan komparatif dan ketergantungan yang telah dilakukan, serta tidak ditemukannya teori yang dengan lugas menjabarkan pengaruh keunggulan komparatif terhadap ketergantungan

---

<sup>56</sup> York W. Bradshaw, 1985, *Dependent Development in Black Afrika: A Cross-Nation Study*, *American Sociological Review*, Vol. 50 No. 2, Washington D.C.: American Sociological Association. Hal. 199-200

<sup>57</sup> York. W. Bradshaw dan Zwelakhe Tsandu, 1990, *Foreign Capital Penetration, State Intervention, and Development in Sub-Saharan Afrika*, *International Studies Quarterly* Vol. 34 No. 2. Storrs: The Internatioinal Studies Association. Hal. 239-240

<sup>58</sup> Jie Huang dan Kazimer M. Stomezynski. *Op. Cit.* Hal. 87-89

suatu negara, penelitian ini mengasumsikan bahwa keunggulan komparatif berpengaruh terhadap ketergantungan suatu negara ke negara lainnya. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan kerangka pikir dibawah ini.

Keunggulan komparatif yang bersumber dari faktor-faktor pembangunnya membuat negara memiliki kemampuan dalam menciptakan suatu komoditas dengan biaya produksi yang lebih murah dan efisien.<sup>59</sup> Negara dengan kemampuan tersebut akan lebih mudah menciptakan keunggulan kompetitif yang menjadikan produknya cenderung memiliki kualitas yang lebih superior, efisien, dan berinovasi.<sup>60</sup> Negara-negara dengan kemampuan tersebut juga lebih mudah menciptakan keunggulan distingtif yang membuat produknya cenderung memiliki gagasan ide berbeda dan sulit ditiru sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Biaya produksi yang lebih murah serta penciptaan keunggulan kompetitif dan distingtif yang lebih mudah, kemudian menjadikan negara memiliki daya saing dan daya tarik yang lebih tinggi. Daya saing dan daya tarik membuat produk-produk negara lebih diminati dalam pasar internasional dan negara lebih dikedepankan oleh pihak asing dalam penanaman investasi. Hal ini terjadi karena negara memberikan potensi keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara mitra untuk menjalin hubungan ekonomi, baik di bidang perdagangan (khususnya pembelian produk ekspor) maupun penanaman investasi.

Potensi keuntungan yang diberikan suatu negara membuat negara-negara di dunia berlomba untuk menjalin kerja sama. Hal ini didasari karena negara sebagai aktor yang rasional akan lebih memilih mitra kerja sama dengan potensi keuntungan

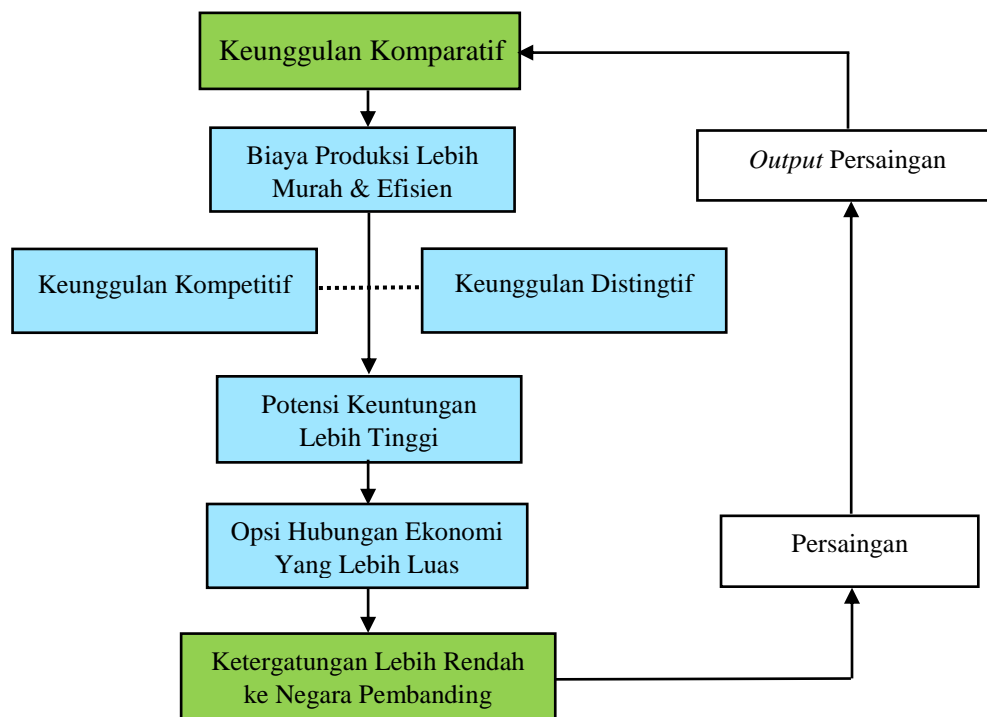
---

<sup>59</sup> Jill Steans dan kawan-kawan, 2010. *Op. Cit.*

<sup>60</sup> Shelby D. Hunt dan M. Morgan, 1995. *Op. Cit.*

paling tinggi. Negara dengan keunggulan komparatif dan potensi keuntungan yang tinggi kemudian lebih memiliki opsi dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Hal ini membuat aspek-aspek ekonomi negara berpotensi lebih tersebar ke seluruh dunia. Sehingga, ketergantungan negara terhadap negara lain menjadi lebih merata dan tidak terfokus ke satu atau sedikit negara.

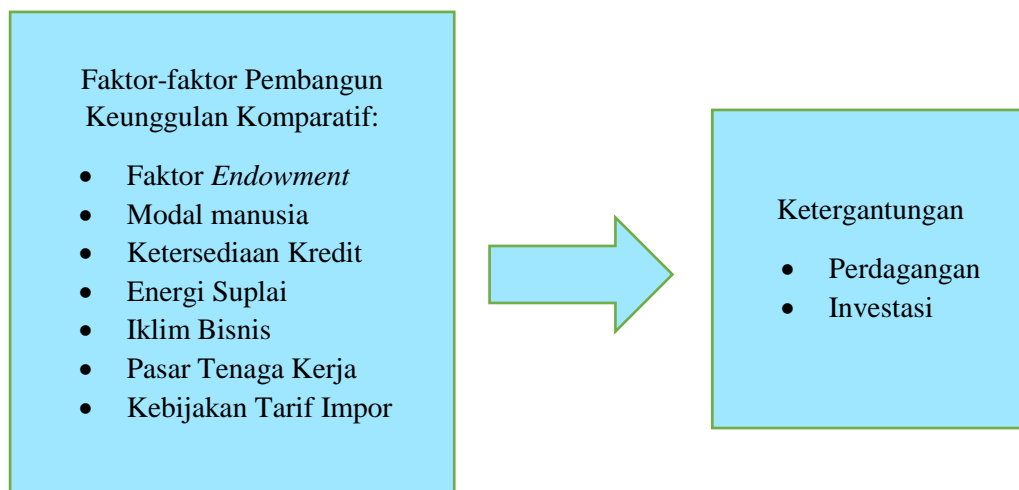
Secara garis besar, kerangka pemikiran yang dibentuk oleh penelitian ini terangkum seperti dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam menyusun kerangka pemikiran ini, peneliti memilih faktor dan indikator yang digunakan berdasarkan relevansi dengan *setting* penelitian dan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan langsung menganalisis pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif berdasarkan pemikiran

Przemyslaw Kowalski (2011) terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta jawaban yang lebih dalam terkait pengaruh yang diberikan keunggulan komparatif terhadap ketergantungan suatu negara. Penelitian ini juga akan menggunakan faktor dan indikator dalam menentukan nilai ketergantungan negara berdasarkan ketergantungan ekonomi dari pemikiran Robert R. Kaufman (1975). Hal ini karena pemikiran dari Kaufman banyak dijadikan landasan bagi peneliti-peneliti setelahnya dan merupakan salah satu yang di nilai paling tepat oleh peneliti. Dengan demikian, model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki beberapa hipotesis yang akan dijadikan rujukan dalam analisis kedepannya. yaitu:



1. Pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif secara simultan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $f_{hitung} > f_{tabel}$ ,  $R^2 \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $f_{hitung} > f_{tabel}$ ,  $R^2 \neq 0$ )
2. Pengaruh *endowment* terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
3. Pengaruh faktor modal manusia terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
4. Pengaruh faktor ketersediaan kredit terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
5. Pengaruh faktor energi suplai terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
6. Pengaruh faktor iklim bisnis terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
  - $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )

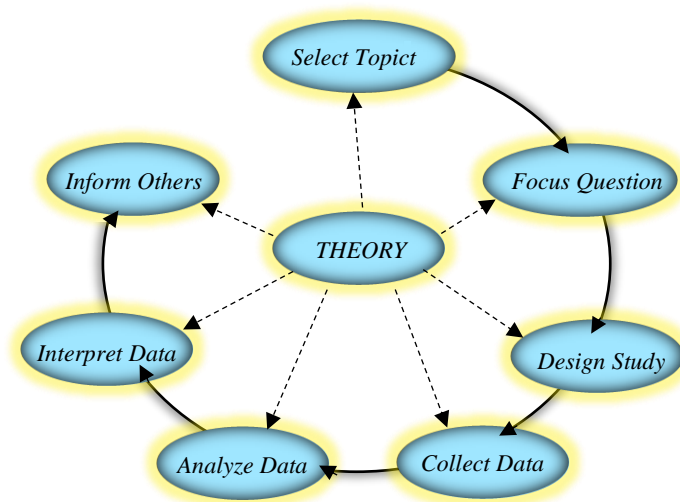
- $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
7. Pengaruh faktor pasar tenaga kerja terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
- $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
8. Pengaruh faktor kebijakan tarif impor terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dengan kondisi:
- $H_1$  : Berpengaruh signifikan ( $p \leq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )
  - $H_0$  : Berpengaruh tidak signifikan ( $p \geq 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $B \neq 0$ )

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang erat dengan logika berpikir deduktif. Penelitian dengan logika berpikir deduktif umumnya dimulai dengan pernyataan umum (premis), kemudian melalui argumen logis dan sampai pada kesimpulan yang spesifik.<sup>61</sup> Proses penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis. Menurut Lawrence Newman proses penelitian dengan pendekatan kuantitatif dimulai dari pemilihan topik, fokus pertanyaan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan menyebarkan ke orang lain.<sup>62</sup>



Gambar 3.1 Proses penelitian kuantitatif W. Lawrence Newman

<sup>61</sup> Nicholas Walliman, 2011, *Research Methods: The Basics*, London: Routledge. Hal. 18

<sup>62</sup> W. Laurence Neuman, 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seven Edition*, Edinburgh: Pearson. Hal. 17-18

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif merupakan data yang bersifat *numerical* atau data yang dapat dihitung. Hal ini berdasarkan logika analisis kuantitatif yang bersifat empiris dan menggunakan pengujian statistik.<sup>63</sup> Sebagaimana hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis pengaruh faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara ASEAN ke Tiongkok dalam kerja sama ACFTA dengan menghitung variabel-variabel penelitian secara empiris, objektif, terstruktur dan sistematis. Variabel-variabel yang dihitung akan dirumuskan berdasarkan seperangkat indikator yang dibangun dari konsep keunggulan komparatif dan ketergantungan negara. Sehingga pada analisis ke depannya dinamika ketergantungan ASEAN ke Tiongkok dapat dihitung dan dipetakan secara komprehensif.

## **3.2 Variabel dan Operasionalisasi**

### **3.2.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah satuan data yang dapat berubah diantara kasus yang berbeda. Perbedaan nilai yang dapat mempengaruhi variabel dapat mempengaruhi jenis analisis yang mungkin dilakukan. Variabel dapat dianalisis secara mandiri (*univariate analysis*), dengan satu variabel lain (*bivariate analysis*) atau dengan beberapa variabel lainnya (*multivariate analysis*).<sup>64</sup> Variabel juga menjelaskan karakteristik dari sesuatu hal. Variabel penelitian dapat dikategorikan bergantung pada lokasi mereka dalam hubungan kausal atau rantai kausalitas. Variabel yang menjadi penyebab, mempengaruhi, atau kondisi yang bekerja pada sesuatu yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal. 9-17

<sup>64</sup> Victor Jupp, 2006, *The Sage Dictionary of Social Research Methods*, London: SAGE Publication Ltd. Hal. 316

lain, disebut variabel independen. Sedangkan variabel yang menjadi efek, hasil, atau pengaruh dari variabel lain disebut variabel dependen.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji relasi kausalitas diantara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

1. **Variabel dependen:** Ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok.
2. **Variabel independen:** Keunggulan komparatif negara-negara ASEAN, yang dilihat dari tujuh faktor pembangun keunggulan komparatif (aspek-aspek keunggulan komparatif), yaitu:
  - a. *Endowment*
  - b. Modal manusia
  - c. Ketersediaan kredit
  - d. Energi suplai
  - e. Iklim bisnis
  - f. Kebebasan biaya tambahan tenaga kerja (pasar tenaga kerja).
  - g. Kebebasan hambatan tarif impor (kebijakan tarif impor)

### 3.2.2 Operasionalisasi Penelitian

Operasionalisasi penelitian adalah proses perpindahan dari konstruksi definisi konseptual ke aktivitas spesifik atau penghitungan yang akan memungkinkan peneliti menganalisis secara empiris.<sup>66</sup> Operasionalisasi penelitian dijabarkan melalui deskripsi operasional yang terangkum sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> W. Laurence Neuman. *Op. Cit.* Hal. 180-181

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 207

Tabel 3.1 Operasionalisasi penelitian

No	Variabel	Deskripsi Operasional	Indikator	Rumus	Skala ukur
1	<b>Dependen:</b> Ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dalam kerja sama ACFTA	Nilai Ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok dalam kerja sama ACFTA	<b>Ketergantungan Perdagangan</b> Besaran ketergantungan perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok atas Ekspor negara-negara ASEAN ke dunia</li> <li>- Persentase ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok atas Nilai PDB negara-negara ASEAN</li> <li>- Persentase impor negara-negara ASEAN dari Tiongkok atas Impor negara-negara ASEAN dari dunia</li> </ul>	(Ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok / ekspor negara-negara ASEAN ke seluruh dunia) * 100 (Ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok / nilai PDB negara-negara ASEAN) * 100 (Impor negara-negara ASEAN dari Tiongkok / Impor negara-negara ASEAN dari seluruh dunia) * 100	Rasio 1-100
			<b>Bentuk ketergantungan perdagangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesialisasi ekspor produk negara-negara ASEAN ke Tiongkok</li> <li>- Konsentrasi Komoditas Ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok</li> </ul>	(Ekspor produk terbesar negara-negara ASEAN ke Tiongkok / total seluruh ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok) * 100 (Total 5 produk ekspor terbesar negara-negara ASEAN ke Tiongkok / total seluruh ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok) * 100	
			<b>Ketergantungan Investasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Investasi masuk ke negara-negara ASEAN dari Tiongkok atas investasi masuk ke negara-negara ASEAN dari seluruh dunia</li> <li>- Persentase Investasi masuk dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN atas total PDB negara-negara ASEAN</li> </ul>	(Nilai investasi masuk ke negara-negara ASEAN dari Tiongkok / Total nilai investasi masuk ke negara-negara ASEAN dari seluruh dunia) * 100 (Nilai investasi masuk ke negara-negara ASEAN dari Tiongkok / Total PDB negara-negara ASEAN) * 100	
No	Variabel	Deskripsi Operasional	Indikator	Skala ukur	
2	<b>Independen:</b> Keunggulan Komparatif  Dihitung dari berbagai aspek yang dijadikan sebagai <b>Sub-Variabel</b> , yaitu:	Kemampuan negara dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai lebih	<b>Endowment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan sumber daya yang bersifat 'given'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total angkatan kerja</li> <li>- Luas wilayah (km<sup>2</sup>)</li> <li>- Cadangan minyak (barrel), gas (m<sup>3</sup>), dan batubara (ton)</li> </ul>	Rasio 1-100
			<b>Modal manusia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan sumber daya manusia dalam aspek terkait pendidikan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase populasi di atas 25 tahun yang mengenyam <i>secondary education</i></li> <li>- Persentase populasi di atas 25 tahun mengenyam <i>tertiary education</i></li> </ul>	

			- Rata-rata waktu sekolah masyarakat	
	- Ketersediaan kredit	- Besaran ketersediaan kredit bagi pelaku usaha yang ada di negara	- Nilai <i>Domestic credit to private sector</i> (% PDB)	
	- Energi suplai	- Besaran ketersediaan suplai energi yang dimiliki negara	- <i>Total Primary Energy Supply</i> (Mtoe)	
	- Iklim bisnis	- Kemudahan dalam menjalankan proses bisnis dan perekonomian	- Indeks kualitas pengurusan - Indeks pengendalian hukum - Indeks kontrol korupsi	
	- Kebebasan biaya tambahan tenaga kerja	- Keterjangkauan biaya ekstra yang dibutuhkan untuk menggaji tenaga kerja	- biaya tambahan kerja malam* - biaya tambahan kerja akhir* pekan* - pesangon pemecatan*	
	- Kebebasan hambatan tarif impor	- Kerendahan biaya dalam mengimpor suatu produk dari luar negara.	- <i>MFN Simple average</i> (%)*	

Ket:

\* = Semakin rendah nilai indikator, maka nilai rasio semakin tinggi

Rasio nilai berdasarkan perbandingan indikator data negara-negara di seluruh dunia

Penelitian ini menggunakan sejumlah 30 populasi yang didapat dari total 10 negara-negara ASEAN dalam rentang data tiga tahun yaitu tahun 2010, 2014, dan 2016. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih besar tingkat kebenarannya. Sedangkan rentang data tahun yang digunakan, diambil karena pertimbangan ketersediaan data variabel. Selain itu, penelitian ini menggunakan skala rasio 1 – 100 yang digunakan karena perbedaan satuan antar indikator dan faktor sehingga tidak dapat dioperasikan secara langsung.

### 3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data terbagi dalam dua bentuk utama, tergantung dalam kedekatannya dengan pengambilan data tersebut. Data yang telah di observasi, dialami atau tercatat dekat dengan penelitian disebut data primer. Sedangkan data yang berasal dari sumber tertulis dan hasil dari interpretasi data primer disebut data sekunder.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di olah dari berbagai sumber, diantaranya:

Tabel 3.2 Sumber Data Penelitian

No.	Variabe	Sumber data
1	Ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok	Aseanstats.org dan trademap.org
2	<i>Endowment</i>	Worldbank.org dan <i>BP Statistical Review of World Energy</i> .
	Modal manusia	Barro R. & J. W. Lee dan Human Capital Report hrd.undp.org
3	Ketersediaan Kredit	Worldbank.org
4	Energi suplai	Iea.org dan aseanenergy.org.
5	Iklm bisnis	<i>World Government Index</i> , worldbank.org.
6	Kebeasan biaya tambahan tenaga kerja	<i>Doing Business Report</i> .
7	Kebebasan hambatan tarif impor	<i>World Tariff Profiles</i> Wto.org/statistics dan data wits.worldbank.org

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, dimana peneliti mencari berbagai referensi untuk digunakan sebagai landasan pembentukan pemikiran, analisis, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data sekunder untuk mendapatkan data-data dari berbagai sumber yang telah disebutkan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting yang tidak dapat terlewat dalam penelitian. Analisis data dilakukan agar data yang telah terkumpul memiliki makna dan dapat ditarik kesimpulannya sehingga pertanyaan dan permasalahan penelitian dapat dijawab. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



### 3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang akan dilakukan. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastitas.

#### 3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah sebaran data dalam variabel atau faktor terdistribusi secara normal. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan model hasil analisis regresi dibangun secara baik atau tidak.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan pengujian kolmogorov smirnov dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai *sig.* yang lebih dari 0,05. Hasil uji kolmogorov smirnov pada penelitian ini terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		30
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.95451647
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.159
	<i>Positive</i>	.159
	<i>Negative</i>	-.134
<i>Test Statistic</i>		.159
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.051 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil olahan SPSS

Dari hasil uji kolmogorov smirnov di atas, kita mendapatkan angka *sig.* 0,051 > dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun terdistribusi secara normal.

<sup>67</sup> Andy Field, 2013, *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*, Sage Publication : London, hal 229.

### 3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang digunakan. Dalam melihat hal tersebut, digunakan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dan toleransi setiap variabel bebas. Jika model regresi bebas multikolinieritas, nilai VIF yang muncul berada di bawah 10, dan nilai toleransi mendekati 1.<sup>68</sup> Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas di dalamnya.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)		
<i>Endowment</i>	.087	11.536
Modal Manusia	.088	11.376
Energi	.042	23.952
Iklim Bisnis	.047	21.373
Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja	.284	3.527
Kebebasan Hambatan Tarif Impor	.209	4.784
Ketersediaan Kredit	.074	13.533

Sumber : Hasil olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, dapat terlihat bahwa dalam model regresi ini terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi uji multikolinieritas. Oleh sebab itu, peneliti kemudian menghapus satu variabel yang memiliki nilai VIF paling jauh dari batas pengujian yaitu variabel energi. Dengan demikian, variabel energi tidak lagi dicantumkan dalam analisis regresi dan pembahasan yang dilakukan, namun masih disajikan datanya sebagai faktor pembangun keunggulan komparatif pada bab IV sebagai sumber informasi untuk pembaca.

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 405.

Hasil uji multikolinieritas dengan penghapusan variabel energi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolinieritas Baru

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
<i>Endowment</i>	.809	1.236
Modal Manusia	.271	3.691
Iklim Bisnis	.120	8.354
Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja	.611	1.636
Kebebasan Hambatan Tarif Impor	.211	4.732
Ketersediaan Kredit	.278	3.600

Sumber: Hasil olahan SPSS

Berdasarkan uji multikolinieritas di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi mendekati 1. Maka disimpulkan model baru dalam analisis regresi yang dibangun tidak terdapat korelasi antar variabel. Lebih lanjut, uji normalitas sebelumnya dan uji statistik lainnya setelah ini, telah dan akan menggunakan model baru ini sebagai model dalam uji statistik yang dilakukan.

### 3.4.1.3 Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda yang digunakan terdapat kesamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Hal ini penting dilakukan untuk melihat validnya model regresi dalam memprediksi variabel-variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastitas menggunakan uji Glejser antara residual sebagai variabel dependen dan enam faktor pembangun keunggulan komparatif sebagai variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari variabel-variabel independen yang diuji, memiliki nilai *sig.* lebih besar dari 0,05.

Tabel 3.6 Hasil Uji Heteroskedastitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22.137	6.530		3.390	.003
<i>Endowment</i>	-.171	.151	-.183	-1.131	.270
Modal Manusia	.007	.056	.033	.117	.908
Iklim Bisnis	.064	.045	.601	1.431	.166
Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja	-.148	.040	-.685	-3.686	.001
Kebebasan Hambatan Tarif Impor	-.115	.085	-.426	-1.347	.191
Ketersediaan Kredit	-.070	.040	-.482	-1.747	.094

Sumber : Hasil olahan SPSS

Berasarkan hasil uji heteroskedastitas pada tabel 3.6, didapatkan lima variabel independen memiliki nilai *sig.* lebih dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas heteroskedastitas.

### 3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah sekumpulan teknik statistik yang mencoba menentukan bentuk hubungan antar variabel dependen dengan satu atau dua variabel independen.<sup>69</sup> Analisis ini secara statistik merupakan metode untuk menghitung hubungan sebab-akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang merupakan salah satu bentuk analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Adapun rumus statistik dan model yang dihasilkan dari analisis regresi linier berganda adalah:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$ <sup>70</sup>

<sup>69</sup> Victor Jupp, *Op. Cit.* Hal. 259

<sup>70</sup> Andy field, *Op. Cit.*, hal 372.

Keterangan:

- $Y$  = Variabel dependen (Ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok)
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_1$  = *Endowment*
- $X_2$  = Iklim bisnis
- $X_3$  = Kebebasan biaya tambahan tenaga kerja
- $X_4$  = Ketersediaan kredit
- $X_5$  = Modal manusia
- $X_6$  = Kebebasan hambatan tarif impor
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$  = Koefisien Regresi

### 3.4.3 Uji Hipotesis

#### 3.4.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat sebagai berikut.

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , nilai  $p > 0,05$  dan nilai  $R^2 = 0$  maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , nilai  $p \leq 0,05$  dan nilai  $R^2 \neq 0$  maka terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam menentukan nilai F tabel, digunakan rumus **F Tabel = (K ; n-K)**, dengan K = jumlah variabel bebas dan n = jumlah populasi. Uji dalam model penelitian ini menghasilkan nilai F tabel senilai 2,510.

### 3.4.3.2 Uji T

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara pasial (tersipah) terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat sebagai berikut.

1. Jika  $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , nilai  $p > 0,05$  dan nilai  $b = 0$  maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika  $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , nilai  $p \leq 0,05$  dan nilai  $b \neq 0$  maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam menentukan nilai T tabel, digunakan rumus  **$T\text{-tabel} = (\alpha/2 ; n-K-1)$**  dengan  $\alpha$  = nilai derajat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini (0,05), K = jumlah variabel bebas dan n = jumlah populasi. Uji dalam model penelitian ini menghasilkan nilai T tabel senilai 2,068

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Kerja sama ACFTA**

ACFTA merupakan kerja sama pasar bebas antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok yang telah terjalin cukup lama. Pembentukan ACFTA pada perjalanannya dimulai dari pertemuan kepala negara-negara ASEAN dan Tiongkok pada 6 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan *ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* yang menjadi ide dasar tewujudnya ACFTA bagi kedua belah pihak.<sup>71</sup> ACFTA kemudian secara resmi terbentuk pada *ASEAN-China Summit* ke-6 di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Pada pertemuan ini, perwakilan negara-negara ASEAN dan Tiongkok sepakat mengadopsi kesepakatan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* yang menandai dimulainya kerja sama ACFTA bagi kedua belah pihak.<sup>72</sup>

ACFTA dalam proses pembentukannya diproyeksikan menjadi wadah penciptaan hubungan ekonomi yang lebih baik antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. *ASEAN-China Expert Group*<sup>73</sup> pada tahun 2001 mengemukakan bahwa

---

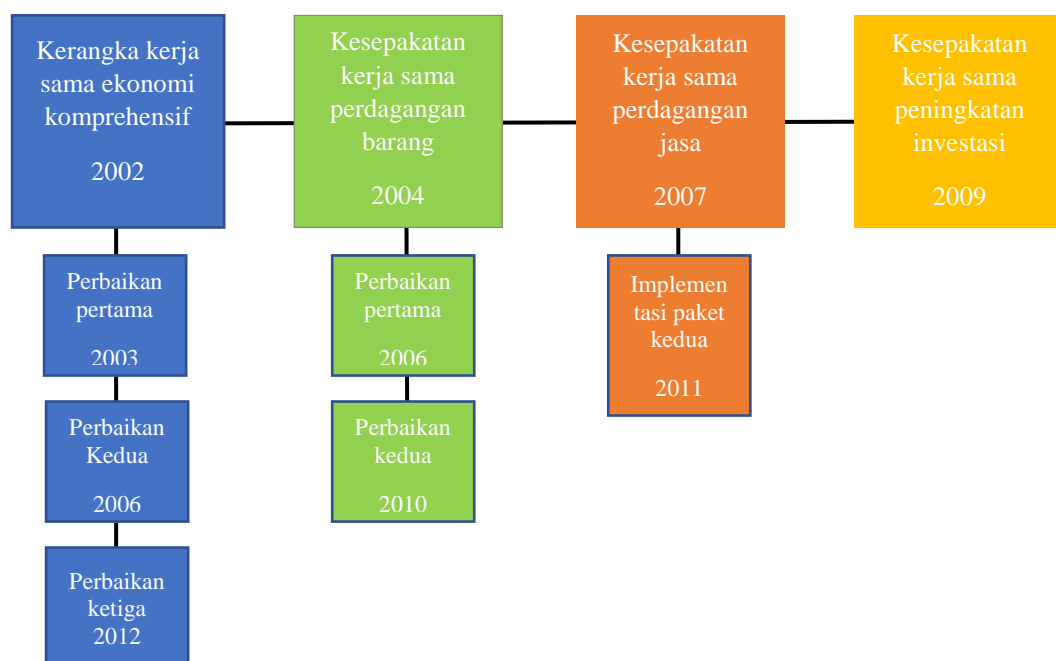
<sup>71</sup> Sigit Setiawan, 2012. *Op. Cit.* .

<sup>72</sup> Di dapat dari data dokumen ACFTA asean.org pada 23 Oktober 2017, pukul 11.25 WIB

<sup>73</sup> Kelompok ahli bentukan ASEAN dan Tiongkok yang bertugas untuk mempelajari kemungkinan terbentuknya ACFTA.

pembangunan ACFTA dalam jangka 10 tahun akan menciptakan kawasan ekonomi dengan total 1,7 milyar penduduk, PDB regional mencapai 2,0 triliyun USD, dan total perdagangan antara kedua pihak mencapai 1,23 triliyun USD.<sup>74</sup> ACFTA juga ditargetkan berjalan maksimal pada tahun 2010 untuk ASEAN – 6 (Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pada 2015 untuk ASEAN – CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam).<sup>75</sup>

Untuk mencapai proyeksi tersebut, kerja sama ACFTA terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Negara-negara anggota ACFTA setidaknya telah menyetujui sepuluh kesepakatan baru yang disusun secara terstruktur dan sistematis hanya dalam rentang tahun 2002 – 2015. Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin mengatur berbagai pokok bahasan berbeda yang secara umum berkiblat pada pengelolaan tiga bidang, yaitu: perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perhatikan gambar berikut.



Gambar 4.1 Model Kerangka Kesepakatan Kerja Sama ACFTA

<sup>74</sup> ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation Report, 2001, *Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century*. Asean.org

<sup>75</sup> *Ibid.* Hal. 44



Berdasarkan gambar 4.1, terlihat perkembangan kesepakatan dalam ACFTA yang jika diurutkan berdasarkan tahun tersusun sebagai berikut:

1. Persepakatan kerangka kerja sama ekonomi komprehensif untuk mengadopsi ACFTA (04 November 2002, Phnom Penh).
2. Perbaikan protokol kerangka kerja sama ACFTA, penambahan *Rule of Origin*<sup>76</sup> dan daftar barang yang termasuk / tidak termasuk dalam jenis *Early Harvest Programme*<sup>77</sup> (06 Oktober 2003, Bali).
3. Persepakatan perjanjian perdagangan barang yang didalamnya mencakup aturan pengurangan dan penghapusan tarif dalam jenis *normal track*<sup>78</sup> dan *sensitive track*<sup>79</sup>, serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara kedua pihak (29 November 2004, Vientiane).
4. Perbaikan kedua dalam protokol kerangka kerja sama ACFTA dan perbaikan kerangka perjanjian perdagangan barang (08 Desember 2006, Cebu).
5. Persepakatan perjanjian perdagangan jasa yang didalamnya termasuk pemberlakuan paket pertama dalam *ASEAN-China Services Commitments* (14 Januari 2007, Cebu).
6. Persepakatan perjanjian terkait investasi, kekayaan intelektual, dan penguatan standar teknis regulasi serta kesesuaian terkait hal tersebut (15 Agustus 2009, Bangkok).

---

<sup>76</sup> Ketentuan terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produk dalam ACFTA.

<sup>77</sup> Salah satu tahapan dalam implementasi pengurangan tarif ACFTA.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

7. Perbaikan kedua dalam kerangka perjanjian perdagangan barang, yang mencakup penyempurnaan daftar barang di antara kedua pihak (29 Oktober 2010, Kuala Lumpur).
8. Persepakatan komitmen implementasi paket kedua dalam perdagangan jasa ACFTA (16 November 2011, Bali).
9. Persepakatan perbaikan ketiga kerangka kerja sama ACFTA, dan persepakatan pembangunan *ASEAN-China Free Trade Area Joint Committee* (ACFTA-JC) sebagai badan permanen untuk mendukung *ASEAN Economic Ministers* dan *Minister of Commerce of China*, termasuk memasukan protokol hambatan teknis perdagangan dan sanitasi serta fitosanitasi kedalam perjanjian perdagangan barang (19 November 2012).<sup>80</sup>
10. Perbaikan protokol kerangka kerja sama ekonomi komprehensif dan kesepakatan tertentu dibawahnya, serta persepakatan peningkatan kerja sama ACFTA dalam cakupan yang lebih luas dan kualitas yang lebih tinggi<sup>81</sup> (2015).

Perkembangan kesepakatan dalam kerja sama ACFTA di atas kemudian menunjukkan bahwa ACFTA dijalankan dengan menjunjung tinggi tujuan pembentukan kerja sama ini, yaitu:<sup>82</sup>

1. Penguatan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota;

---

<sup>80</sup> Di olah dari dokumen-dokumen perjanjian ACFTA dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2) diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 11.12 WIB.

<sup>81</sup> Meredith Mille, 2015. *Op. Cit.* Hal. 3.

<sup>82</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 1.* Hal. 3

2. Liberalisasi yang progresif, peningkatan perdagangan barang dan jasa, serta penciptaan rezim investasi yang transparan, baik, dan fasilitatif;
3. Penggalan bidang-bidang kerja sama baru serta pengembangan kebijakan yang tepat untuk kerja sama ekonomi yang lebih erat antara seluruh pihak; dan
4. Fasilitator integrasi ekonomi yang lebih efektif untuk negara-negara anggota ASEAN yang lebih baru (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) dan menjembatani kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota.

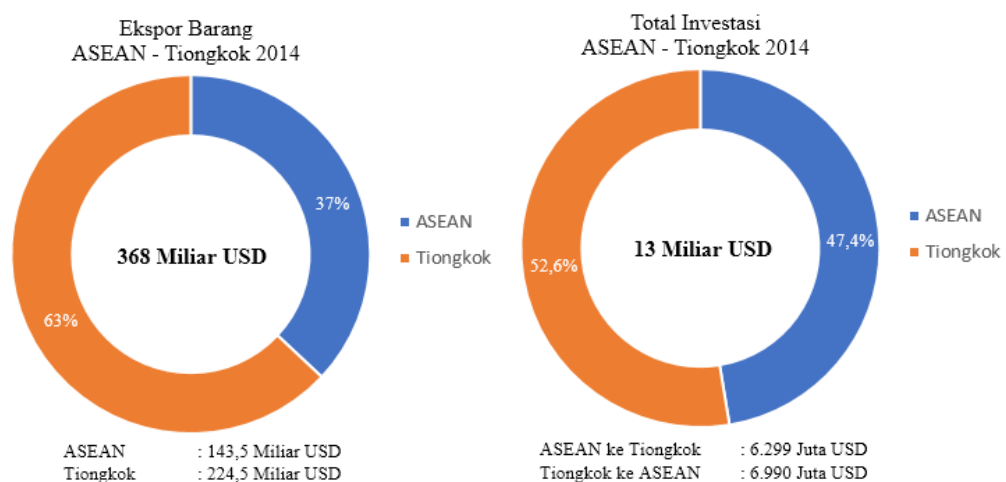
Tujuan-tujuan tersebut turut merefleksikan ACFTA sebagai kerja sama yang diharapkan menjadi landasan penciptaan integrasi ekonomi di antara negara-negara yang terlibat. Kerja sama ini juga diharapkan mampu menjembatani ketidaksetaraan pembangunan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif untuk negara-negara ASEAN yang lebih baru.

Seiring perjalanan ACFTA yang telah lebih dari satu dekade, ACFTA saat ini menjadi salah satu pasar bebas dengan nilai perekonomian terbesar di dunia. Total PDB ASEAN dan Tiongkok<sup>83</sup> pada tahun 2014 menjadikan kawasan ini sebagai kerja sama regional dengan nilai PDB terbesar ke tiga di dunia. ACFTA juga menjadi kerja sama regional dengan jumlah populasi terbesar (lebih dari dua miliar). Selain itu, perdagangan barang dalam ACFTA telah mencapai nilai 368 Miliar USD pada tahun 2016, perdagangan jasa sebesar 22 Miliar USD pada tahun 2014, dan nilai investasi yang beredar pada 2014 sebesar 13 Miliar USD.

---

<sup>83</sup> PDB ASEAN sebesar 2,57 Triliun USD, sementara PDB Tiongkok sebesar 10,36 Triliun USD Data diperoleh dari asean-cn.org

Meski demikian, perkembangan ekonomi dalam ACFTA nyatanya tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan nilai yang telah di proyeksikan. Di tengah nilai PDB regional dan penduduk yang jauh melebihi ekspektasi, total perdagangan di antara kedua pihak masih jauh lebih kecil. Perkembangan ekonomi ACFTA lebih lanjut juga menunjukkan ketimpangan yang cukup besar di antara tiga bidang kerja sama. Dari tiga bidang yang terbentuk, perdagangan barang menjadi bidang dengan nilai perekonomian tertinggi disusul perdagangan jasa dan investasi. Ketimpangan kemudian terlihat dari total nilai perdagangan barang yang hampir sepuluh kali lipat dari total nilai perdagangan jasa ditambah investasi. Selain itu, perdagangan barang juga menjadi bidang yang paling menunjukkan ketimpangan keuntungan di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok.



Pencapaian pendapatan  
perdagangan jasa ASEAN dan  
Tiongkok 2014

**22 Miliar USD**

Gambar 4.2 Infografis ACFTA<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Diolah dari data aseanstats.org dan asean-cn.org

#### 4.1.1 Kerja sama Perdagangan Barang dalam ACFTA

Kerja sama perdagangan barang dalam ACFTA mulai berlaku sejak tahun 2004 dan terus berjalan sampai saat ini. Dalam kerja sama ini, negara-negara ACFTA diwajibkan memberlakukan pengurangan tarif terhadap produk-produk tertentu yang masuk dan berasal dari negara lain. Hal tersebut dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disusun untuk melindungi industri dalam negeri agar bertahan menghadapi persaingan yang lebih erat.

Berdasarkan perbedaan mekanisme skema pengurangan tarif dan kategorisasi produk yang berlaku, kerja sama perdagangan barang dalam ACFTA terbagi menjadi tiga tahapan implementasi, yaitu: *Early Harvest Programme* (EHP), *Normal Track*, dan *Sensitive Track*.

##### 1. *Early Harvest Programme* (EHP)

*Early Harvest programme* (EHP) merupakan tahapan implementasi dengan skema jadwal pengurangan tarif paling cepat (dimulai sejak 1 Januari 2004 dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006). Pengurangan tarif dalam kategori EHP hanya berlaku untuk beberapa jenis produk, yaitu: binatang hidup, daging dan jeroan, ikan, susu, produk binatang lainnya, pohon hidup, sayuran, dan buah-buahan serta kacang-kacangan.<sup>85</sup> Dengan kata lain, produk dalam kategori EHP secara umum merupakan produk-produk pertanian dan peternakan yang cenderung memiliki masa simpan relatif singkat.

Jadwal pengurangan tarif dan besaran pasti jumlah produk dalam kategori ini kemudian terangkum sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 6*. Hal. 6-12

Tabel 4.1 Jadwal Penurunan Tarif EHP

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Besaran Tarif		
	2004	2005	2006
$X \geq 15\%$	10%	5%	0%
$5\% \leq X < 15\%$	5%	0%	0%
$X < 5\%$	5%	0%	0%

Tabel 4.2 Jumlah Produk Terdaftar dalam EHP ASEAN dan Tiongkok

No.	Negara	Jumlah
1	Brunei D.	600
2	Kamboja	0
3	Indonesia	846
4	Laos	590
5	Malaysia	0
6	Myanmar	815
7	Filipina	322
8	Singapura	Tidak ada data
9	Thailand	745
10	Vietnam	714
11	Tiongkok	755

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA dalam asean.org<sup>86</sup>

Tabel di atas menunjukkan jadwal pengurangan seluruh tarif dalam kategori EHP, baik dari tingkat di bawah 5% sampai di atas 15% diharuskan telah memenuhi besaran tarif 0% sebelum tahun 2006. Sementara itu, masing-masing negara mencantumkan jumlah produk yang bervariasi namun tidak jauh berbeda. Indonesia menjadi negara dengan daftar produk EHP terbanyak, sementara Kamboja dan Malaysia tidak mencantumkan daftar barang EHP. Di sisi lain, tidak terdapat daftar penurunan tarif Singapura dalam daftar penurunan tarif ACFTA karena hampir seluruh tarif di Singapura telah menjadi 0%.

## 2. *Normal Track*

Produk-produk yang termasuk ke dalam kategori *normal track* adalah segala produk yang tidak termasuk ke dalam cakupan EHP dan *sensitive track*. Secara umum, produk-produk tersebut meliputi: produk

<sup>86</sup> Di olah dari data-data dokumen dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

pertanian yang diawetkan atau memiliki masa simpan cukup lama, produk kimia, peralatan elektronik, hasil pertambangan, buku, bahan tekstil, dan lain-lain. Produk-produk *normal track* juga dapat ditentukan oleh masing-masing negara dengan syarat besaran tarif menjadi 0% pada tahun 2010 untuk ASEAN 6 – Tiongkok dan 2015 untuk ASEAN CLMV – Tiongkok.<sup>87</sup> Jadwal pengurangan tarif dalam kategori *normal track* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Pengurangan Tarif *Normal Track* antara ASEAN 6 dan Tiongkok.<sup>88</sup>

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Besaran Tarif			
	2005*	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20%	12%	5%	0%
$15\% \leq X < 20\%$	15%	8%	5%	0%
$10\% \leq X < 5\%$	10%	8%	5%	0%
$5\% < X < 10\%$	5%	5%	0%	0%
$X \leq 5\%$	Tetap		0%	0%

\*pengimplementasian pertama pada 1 Juli 2005.

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

Tabel 4.4 Jadwal Pengurangan Tarif *Normal Track* antara Vietnam dan Tiongkok<sup>89</sup>

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Besaran tarif							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
$X \geq 60\%$	60%	50%	40%	30%	25%	15%	10%	0%
$45\% \leq X < 60\%$	40%	35%	35%	30%	25%	15%	10%	0%
$35\% \leq X < 45\%$	35%	30%	30%	25%	20%	15%	5%	0%
$30\% \leq X < 35\%$	30%	25%	25%	20%	17%	10%	5%	0%
$25\% \leq X < 30\%$	25%	20%	20%	15%	15%	10%	5%	0%
$20\% \leq X < 25\%$	20%	20%	15%	15%	15%	10%	0-5%	0%
$15\% \leq X < 20\%$	15%	15%	10%	10%	10%	5%	0-5%	0%
$10\% \leq X < 15\%$	10%	10%	10%	10%	8%	5%	0-5%	0%
$7\% \leq X < 10\%$	7%	7%	7%	7%	5%	5%	0-5%	0%
$5\% \leq X < 7\%$	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0-5%	0%
$X < 5\%$	Tetap							0%

\*pengimplementasian pertama pada 1 Juli 2005.

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

<sup>87</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 3*. Hal. 4-5

<sup>88</sup> *Annex 1, Modality for Tariff Reduction and Elimination for tariff Lines Placed in the Normal Track*. Hal. 14

<sup>89</sup> *Ibid*

Tabel 4.5 Jadwal Pengurangan Tarif *Normal Track* antara Kamboja, Laos, Myanmar dan Tiongkok<sup>90</sup>

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Besaran tarif							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
$X \geq 60\%$	60%	50%	40%	30%	25%	15%	10%	0%
$45\% \leq X < 60\%$	40%	35%	35%	30%	25%	15%	10%	0%
$35\% \leq X < 45\%$	35%	35%	30%	30%	20%	15%	5%	0%
$30\% \leq X < 35\%$	30%	25%	25%	20%	20%	10%	5%	0%
$25\% \leq X < 30\%$	25%	25%	25%	20%	20%	10%	5%	0%
$20\% \leq X < 25\%$	20%	20%	15%	15%	15%	10%	0-5%	0%
$15\% \leq X < 20\%$	15%	15%	15%	15%	15%	5%	0-5%	0%
$10\% \leq X < 15\%$	10%	10%	10%	10%	8%	5%	0-5%	0%
$7\% \leq X < 10\%$	7%**	7%**	7%**	7%**	7%**	5%	0-5%	0%
$5\% \leq X < 7\%$	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0-5%	0%
$X < 5\%$	Tetap							0%

\*pengimplementasian pertama pada 1 Juli 2005.

\*\*Myanmar diizinkan untuk mempertahankan tarif ACFTA tidak lebih dari 7,5 sampai 2010.

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

Perbedaan jadwal penurunan tarif di atas terjadi berdasarkan pertimbangan kesiapan negara-negara ACFTA dalam menghadapi persaingan yang lebih erat. ASEAN 6 yang merupakan negara-negara dengan tingkat perekonomian lebih baik, menyepakati jadwal penurunan tarif yang lebih cepat dan sederhana. Sementara ASEAN CLMV yang cenderung memiliki tingkat perekonomian lebih rendah, menyepakati jadwal penurunan tarif yang lebih lama dan detail.

Jumlah produk yang termasuk ke dalam kategori ini kemudian juga berbeda-beda ditentukan oleh masing-masing negara. Malaysia menjadi negara dengan jumlah produk terbanyak. Sementara Singapura tidak mencantumkan daftar penurunan tarif karena hampir seluruh tarif telah menjadi 0%. Adapun rincian jumlah produk yang termasuk dalam kategori *normal track* adalah sebagai berikut:

<sup>90</sup> *Ibid.* Hal. 15



Tabel 4.6 Jumlah Barang Terdaftar dalam *Normal Track* ASEAN - Tiongkok<sup>91</sup>

Tingkat tarif bea masuk (=X) (2004)	Jumlah Barang Tiap Negara										
	Kam	Lao	Myan	Viet*	Bru	Ind	Mal	Fil	Sin	Tha	Tio
$X \geq 60\%$	0	0	0		**	**	**	**	**	**	**
$45\% \leq X < 60\%$	0	0	0						***		
$35\% \leq X < 45\%$	1340	267	0								
$30\% \leq X < 35\%$	0	332	36								
$25\% \leq X < 30\%$	0	0	0								
$20\% \leq X < 25\%$	0	670	321								
$15\% \leq X < 20\%$	2476	8	742								
$10\% \leq X < 15\%$	0	2752	0								
$7\% \leq X < 10\%$	3435	0	921								
$5\% \leq X < 7\%$	0	4778	747								
$X < 5\%$	408	0	5294								
Total	7659	8772	8061	9588	7236	7881	11279	7404	-	7773	7659

\*Berdasarkan data jumlah penurunan tarif 2015

\*\* Termasuk ke dalam ASEAN 6: Memiliki aturan penurunan tarif yang berbeda

\*\*\* Singapura tidak mencantumkan data penurunan tarif (hampir seluruh telah 0%)

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

### 3. *Sensitive Track*

Kategori *sensitive track* berisikan produk-produk yang paling membutuhkan penyesuaian terhadap pengurangan tarif dalam ACFTA. Sehingga, kategori ini menjadi kategori dengan skema pengurangan tarif paling lambat. Jadwal pengurangan tarif dan jenis produk dalam kategori ini kemudian dibagi menjadi *sensitive list* dan *highly sensitive list*.

#### - *Sensitive List (SL)*

Produk-produk yang termasuk ke dalam kategori *sensitive list* meliputi beberapa jenis produk seperti: bahan kimia yang telah diolah, barang jadi kulit (tas, dompet), alas kaki (spatu sport, casual, kulit), mainan (boneka), alat olah raga, alat tulis, besi dan baja,

<sup>91</sup> Di olah dari data-data dokumen dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

*sparepart*, antibiotik, barang-barang plastik, dan lain-lain.<sup>92</sup> Dengan demikian, produk-produk dalam kategori ini secara umum merupakan produk yang dihasilkan melalui industri pabrik.

Jumlah produk yang dimasukkan ke dalam kategori ini kemudian dapat ditentukan oleh masing-masing negara. Namun hal tersebut harus sesuai dengan syarat pengurangan tarif yaitu: menjadi 20% sebelum tahun 2012 dan 0-5% sebelum 2018 (untuk ASEAN 6 – Tiongkok), serta menjadi 20% sebelum tahun 2015 dan 0-5% sebelum 2020 (untuk ASEAN CLMV – Tiongkok).<sup>93</sup>

Tabel 4.7 Jadwal Pengurangan Tarif dan Jumlah Produk dalam Kategori *Sensitive List* ASEAN dan Tiongkok<sup>94</sup>

ASEAN 6			
Negara	Tarif yang harus dicapai		Jumlah Produk
	2011	2017	
Brunei D.	≤ 20%	≤ 0-5%	148
Indonesia	≤ 20%	≤ 0-5%	820
Malaysia	≤ 20%	≤ 0-5%	1106*
Filipina	≤ 20%	≤ 0-5%	939
Singapura	≤ 20%	≤ 0-5%	**
Thailand	≤ 20%	≤ 0-5%	604
ASEAN CLMV			
Negara	Tarif yang harus dicapai		Jumlah Produk
	2014	2019	
Kamboja	≤ 20%	≤ 0-5%	782
Laos	≤ 20%	≤ 0-5%	36
Myanmar	≤ 20%	≤ 0-5%	875
Vietnam	≤ 20%	≤ 0-5%	475
Tiongkok			
Tarif yang harus dicapai			Jumlah Produk
Menyesuaikan ASEAN 6 dan ASEAN CLMV			475

\*Malaysia mencantumkan data *sensitive track* secara umum

\*\*Singapura tidak mencantumkan data penurunan tarif (hampir seluruh telah 0%)

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

<sup>92</sup> Ali Fikri Wibowo, 2011, Skripsi: Pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area (AFCTA) dan Hubungan Ekonomi ASEAN-Cina (2003-2009), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 45-46

<sup>93</sup> *Annex 2, Modality for Tariff Reduction and Elimination for tariff Lines Placed in the Sensitive Track*. Hal. 86-87

<sup>94</sup> Di olah dari data-data dokumen dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah produk dalam kategori *sensitive list* bervariasi dan memiliki perbedaan cukup besar. Malaysia menjadi negara dengan total produk tertinggi, sementara Laos menjadi negara terendah. Perbedaan antara Malaysia dan Laos sangat terlihat dari jumlah produk *sensitive list* Malaysia yang mencapai nyaris 30 kali lipat produk *sensitive list* Laos.

- ***Highly Sensitive List (HSL)***

Produk-produk dalam kategori *highly sensitive list* meliputi beberapa jenis produk seperti: Produk pertanian (beras, gula, jagung, dan kedelai), produk tekstil, produk otomotif, dan produk keramik.<sup>95</sup> Berdasarkan hal tersebut, secara umum produk dalam kategori ini merupakan produk-produk kebutuhan primer (makanan pokok dan pakaian), produk yang mudah pecah, dan produk terkait transportasi masyarakat.

Total produk dalam kategori ini sama seperti kategori sebelumnya, dapat ditentukan masing-masing negara dengan syarat pengurangan tarif yang berbeda. Pengurangan tarif untuk ASEAN 6 - Tiongkok harus menjadi kurang dari 50% sebelum tahun 2015, sementara untuk ASEAN CLMV-Tiongkok harus menjadi kurang dari 50% sebelum tahun 2018.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ali Fikri Wibowo, 2011. *Op. Cit.*

<sup>96</sup> *Annex 2, Modality for Tariff Reduction and Elimination for tariff Lines Placed in the Sensitive Track.* Hal. 86-87

Tabel 4.8 Jadwal Pengurangan Tarif dan Jumlah Produk dalam Kategori *Highly Sensitive List* ASEAN dan Tiongkok<sup>97</sup>

ASEAN 6		
Negara	Tarif yang harus dicapai	Jumlah Produk
	2014	
Brunei D.	< 50%	219
Indonesia	< 50%	369
Malaysia	< 50%	*
Filipina	< 50%	298
Singapura	< 50%	**
Thailand	< 50%	653
ASEAN CLMV		
Negara	Tarif yang harus dicapai	Jumlah Produk
	2017	
Kamboja	< 50%	300
Laos	< 50%	72
Myanmar	< 50%	0
Vietnam	< 50%	376
Tiongkok		
Tarif yang harus dicapai		Jumlah Produk
Menyesuaikan ASEAN 6 dan ASEAN CLMV		146

\*Malaysia mencantumkan data *sensitive track* secara umum (dimasukan ke dalam data SL)

\*\*Singapura tidak mencantumkan data penurunan tarif (hampir seluruh telah 0%)

Sumber: Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah produk dalam kategori *highly sensitive list* kembali bervariasi dan kembali memiliki perbedaan cukup besar. Thailand menjadi negara dengan total produk tertinggi. Sementara Myanmar mencantumkan produk dengan jumlah terendah.

Tahapan implementasi perdagangan barang di atas, disertai dengan kecenderungan daftar produk yang berpusat di kategori *normal track*. Hal tersebut terlihat dari jumlah daftar produk *normal track* yang mencapai lebih dari 10 kali lipat di banding kategori lainnya.. Jumlah seluruh daftar produk dalam negara-negara ACFTA disisi lain juga tidak jauh berbeda antar negara. Nyaris seluruh anggota ACFTA memiliki daftar yang berada di kisaran 8 hingga 9 ribu-an, kecuali Malaysia dan Thailand yang memiliki daftar dikisaran 11 ribu.

<sup>97</sup> Di olah dari data-data dokumen dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

Tabel 4.9 Jumlah Produk ASEAN dan Tiongkok dalam ACFTA<sup>98</sup>

Negara	Jumlah Produk				Total
	EHP	NT	ST		
			SL	HSL	
Brunei D.	600	7236	148	219	8203
Kamboja	0	7659	782	300	8741
Indonesia	846	7881	820	369	9916
Laos	590	8772	36	72	9470
Malaysia	0	11279	1106*	*	11279
Myanmar	815	8061	875	0	9751
Filipina	322	7404	939	298	8963
Singapura	**	**	**	**	**
Thailand	745	7773	604	653	9775
Vietnam	714	9588	475	376	11153
Tiongkok	755	7659	286	146	8846

Ket : :

\*Malaysia mencantumkan data *sensitive track* secara umum

\*\*Singapura tidak mencantumkan data penurunan tarif (hampir seluruh telah 0%)

Sumber : Dokumen kerja sama dan penurunan tarif ACFTA

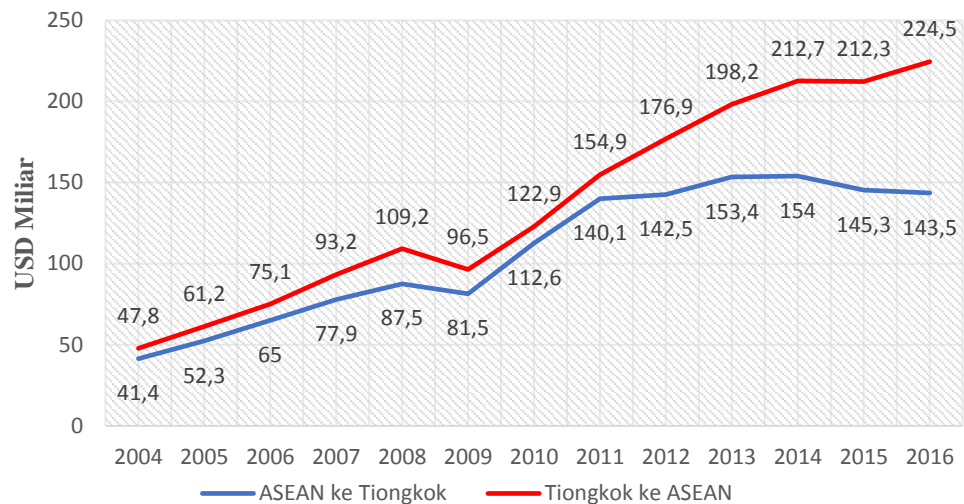
Tidak berhenti di tahapan pengimplementasian tarif produk, produk yang diperdagangkan dalam kerja sama ACFTA juga harus memenuhi syarat barang yang setidaknya mengandung 40% bahan atau material yang berasal dari negara anggota ACFTA.<sup>99</sup> Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan demikian, skema pengurangan tarif dan aturan syarat kandungan dalam barang yang disepakati, diharapkan mampu menunjang kesiapan dan persaingan yang sehat antara ASEAN dan Tiongkok dalam persaingan yang lebih erat.

Meski demikian, pada dewasa ini perkembangan arus perdagangan barang diantara kedua pihak nyata-nyata kontras dengan harapan tersebut. Meskipun perdagangan barang berjalan dengan baik dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan perdagangan barang menunjukkan bahwa peningkatan pesat berjalan satu arah di perdagangan Tiongkok ke ASEAN. Terdapat

<sup>98</sup> Di olah dari data-data dokumen dalam [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2), diakses pada 20 Desember 2017, pukul 18.30

<sup>99</sup> *Annex 3. Rules Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, Rule 4.* Hal. 263

kesenjangan nilai perdagangan yang cukup tinggi di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Hal tersebut terutama terjadi pasca tahun 2010 setelah berlaku secara maksimalnya perjanjian barang di ACFTA.



Gambar 4.3 Perbandingan Ekspor ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>100</sup>

#### 4.1.2 Kerja sama Perdagangan Jasa dalam ACFTA

Kerja sama perdagangan jasa dalam ACFTA telah resmi terjalin sejak tahun 2007 melalui *Agreement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the Peoples's Republic of China*. Melalui kerja sama tersebut, setiap negara memiliki kewajiban untuk mendukung jalannya perdagangan jasa di antar negara-negara yang terlibat. Dukungan tersebut diantaranya berupa:<sup>101</sup>

1. Tranparasi serta pengungkapan data-data rahasia terkait perdagangan jasa antar pihak.

<sup>100</sup>Data di olah dari <http://www.aseanstats.org> Diakses pada 17 April 2017, pukul 21.12 WIB

<sup>101</sup> *Agreement on Trade of Services of The framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the Peoples's Republic of China*. Hal. 9-21

2. Pembangunan kebijakan domestik yang mendukung perdagangan jasa antar pihak.
3. Pengakuan terhadap pendidikan, pengalaman, atau sertifikat jasa yang diberikan oleh pihak lain.
4. Pengaturan dan pemastian kebijakan terkait monopoli dan eksklusivitas suplai jasa oleh suatu badan dalam negeri, serta persaingan badan monopoli jasa di sektor yang sama antara ke dua pihak.
5. Pemastian praktik bisnis jasa berjalan sehat dan sesuai aturan.
6. Pemastian keamanan dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan perdagangan jasa.
7. Pemastian tidak adanya pembatasan dalam transfer transaksi pembayaran perdagangan jasa antar pihak.

Berdasarkan paparan di atas, negara-negara dalam ACFTA secara umum berkewajiban menjadi ‘pengawas’ dan fasilitator dalam berjalannya perdagangan jasa di kerja sama ini, khususnya menjaga persaingan (yang semakin erat) tetap berjalan sehat dan tidak menimbulkan konflik-konflik antar pihak. Negara-negara dalam ACFTA juga wajib bersikap netral dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pelaku jasa dari negara tertentu.

Untuk meningkatkan perdagangan jasa di antara para pihak, negara-negara ACFTA telah sepakat dalam mengadopsi paket pertama persetujuan jasa yang menghasilkan perluasan akses pasar mencakup 60 subsektor tambahan dari komitmen para pihak di WTO. Paket pertama dinilai telah mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh empat moda penyediaan jasa baik: *cross-border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence*, dan *movement of*

*natural person*.<sup>102</sup> Selain itu, kerja sama ini juga tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan arus perdagangan jasa diantara kedua pihak, namun juga diharapkan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang dikomitmenkan oleh anggota ACFTA, yaitu:<sup>103</sup>

1. Bisnis jasa semacam pelayanan terkait komputer, jasa dibidang perumahan, riset pasar, konsultasi manajemen;
2. Bisnis jasa terkait mesin dan konstruksi;
3. Bisnis jasa terkait pariwisata dan travel;
4. Bisnis jasa pengangkutan dan layanan pendidikan;
5. Bisnis jasa telekomunikasi;
6. Bisnis jasa dibidang kesehatan dan layanan sosial;
7. Bisnis jasa dibidang rekreasi, olahraga dan kebudayaan;
8. Bisnis jasa lingkungan; dan
9. Bisnis jasa di bidang energi.

#### **4.1.3 Kerja sama Peningkatan Investasi dalam ACFTA**

Kerja sama dalam bidang investasi di ACFTA telah resmi berlaku sejak tahun 2009 melalui *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan arus investasi dan menciptakan rezim investasi yang liberal,

---

<sup>102</sup> Asean – China Free Trade Area, diakses dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf> pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 07.54

<sup>103</sup> *Ibid*



fasilitatif, transparan, dan kompetitif antara ASEAN dan Tiongkok, melalui beberapa langkah, yaitu:<sup>104</sup>

1. Meliberalisasi rezim investasi secara progresif antara ASEAN dan Tiongkok;
2. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi investor suatu negara untuk berinvestasi ke wilayah negara lain;
3. Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara dengan investor yang memiliki investasi di wilayah negara tersebut;
4. Mendorong dan meningkatkan arus investasi serta kerja sama terkait investasi antar negara;
5. Meningkatkan transparansi atas aturan investasi yang berlaku untuk meningkatkan arus investasi antar negara; serta
6. Memberikan perlindungan investasi di ASEAN dan Tiongkok.

Lebih lanjut, perjanjian dalam bidang investasi di ACFTA diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat lainnya bagi para investor, diantaranya;

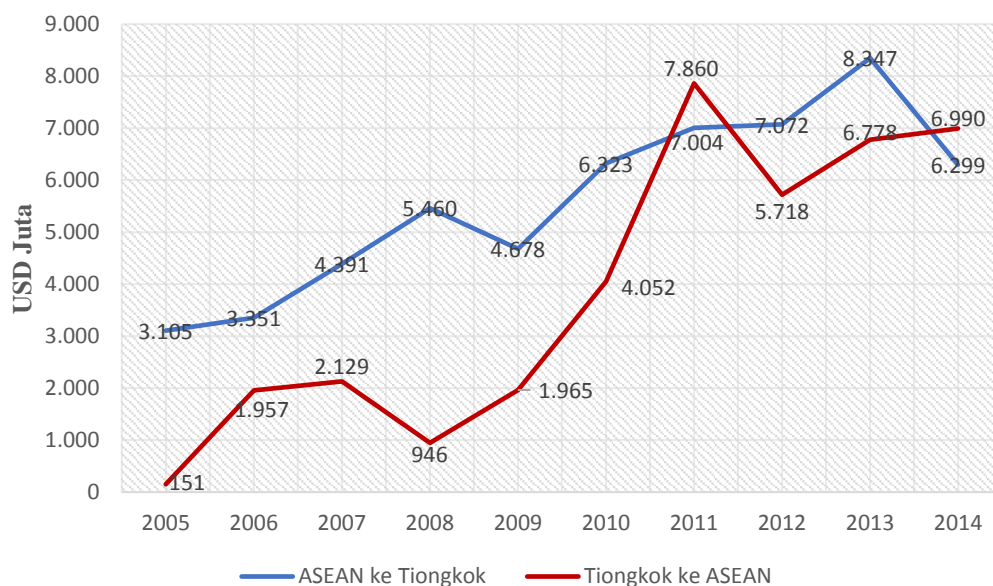
1. Jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal Tiongkok ataupun ASEAN dalam hal manajemen, operasi, dan likuidasi;
2. Pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan;
3. Kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*. Hal. 6

<sup>105</sup> *Asean – China Free Trade Area, Op. Cit.*

Hal-hal di atas kemudian dinilai telah berdampak positif terhadap arus investasi yang berjalan. Penilaian tersebut terlihat dari perkembangan nilai investasi dalam ACFTA yang terus berkembang positif sejak berlakunya kerja sama ini. Pada tahun 2014, nilai investasi yang beredar antar negara-negara anggota ACFTA telah mencapai 13 miliar USD. Nilai ini berkembang sekitar 400% dibanding tahun 2005 yang hanya sejumlah 3 miliar. Investasi yang masuk diantara kedua pihak pun hampir selalu menunjukkan perkembangan positif di setiap tahunnya. Meskipun, perkembangan yang terjadi menunjukkan jauh lebih berkembangnya investasi Tiongkok ke ASEAN dibandingkan sebaliknya. Hal tersebut terutama terjadi pasca tahun 2009 ketika perjanjian investasi dalam ACFTA mulai di adaptasikan.



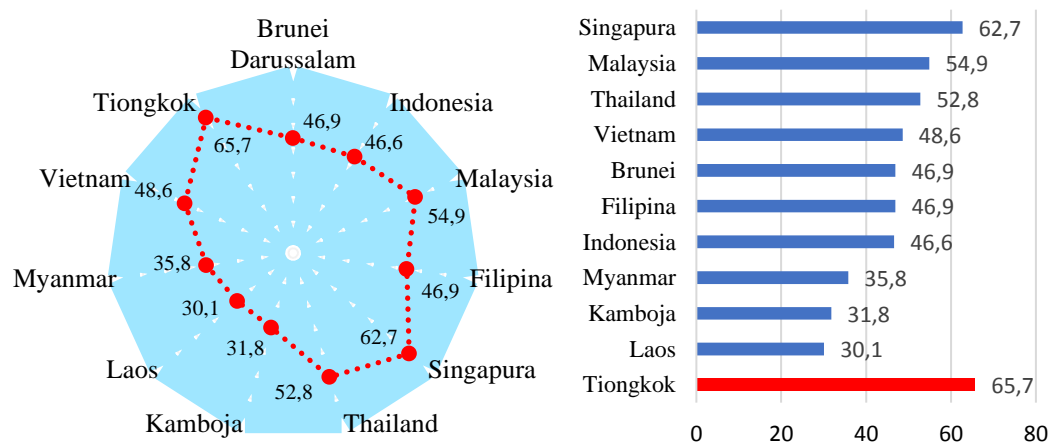
Gambar 4.4 Perbandingan FDI ASEAN ke Tiongkok dan sebaliknya<sup>106</sup>

<sup>106</sup> Data di olah dari situs

<http://www.asean-cn.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=245&id=105>  
diakses pada 10 April 2017, pukul 00.36 WIB

## 4.2 Keunggulan Komparatif negara-negara ASEAN dan Tiongkok

Dalam persaingan ekonomi antar negara di dunia, keunggulan komparatif menjadi salah satu hal paling penting karena memberikan kemampuan bagi suatu negara untuk menghasilkan produk ekonomi tertentu dengan biaya yang lebih murah dan efisien dibandingkan negara lainnya. Keunggulan komparatif negara-negara di dunia juga berbeda-beda bergantung kepada berbagai faktor pembangun keunggulan komparatif yang dimiliki negara tersebut. Keunggulan komparatif kemudian dapat dihitung menggunakan faktor-faktor pembangun dan menghasilkan suatu indeks keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara.



Ket: Indeks skala 1 - 100

Gambar 4.5 Indeks Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>107</sup>

Pada tahun 2016, indeks keunggulan komparatif di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok menunjukkan ketimpangan nilai yang cukup besar. Tiongkok menjadi negara dengan nilai keunggulan komparatif tertinggi di antara negara-negara ACFTA. Sementara di intra ASEAN, Singapura menjadi negara dengan nilai keunggulan komparatif tertinggi dan Laos sebagai negara terendah. Ketimpangan nilai ini kemudian terlihat dari nilai Tiongkok dan Singapura yang

<sup>107</sup> Di olah dari berbagai indikator dan sumber, yang dijelaskan di halaman-halaman berikutnya.

mencapai dua kali lipat dari nilai Kamboja dan Laos sebagai negara-negara dengan nilai terendah.

Indeks Keunggulan komparatif negara-negara anggota ACFTA juga mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tiongkok menjadi negara dengan nilai keunggulan komparatif tertinggi dan stabil meningkat pada periode 2010, 2014, dan 2016. Sebagian besar negara-negara ASEAN juga mengalami peningkatan dengan Laos sebagai negara dengan peningkatan tertinggi, sementara Brunei dan Malaysia justru mengalami penurunan. Disisi lain, peningkatan nilai yang terjadi nyatanya dibarengi dengan ketimpangan nilai antara rata-rata ASEAN dan Tiongkok yang semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan peningkatan Tiongkok masih lebih besar dibandingkan sebagian negara-negara ASEAN.

Tabel 4.10 Index Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN dan Tiongkok

Negara	Keunggulan Komparatif			% Perubahan 2010-2016
	2010	2014	2016	
Singapura	60,3	61,6	62,7	4,0
Malaysia	55,7	58,2	54,9	-1,5
Thailand	50,8	51,8	52,8	4,0
Vietnam	44,3	46,1	48,6	9,7
Brunei	48,3	46,5	46,9	-2,7
Filipina	44,5	46,9	46,9	5,4
Indonesia	45,7	47,0	46,6	1,9
Myanmar	30,5	33,9	35,8	17,5
Kamboja	28,8	32,0	31,8	10,4
Laos	24,8	27,9	30,1	21,1
Tiongkok	60,5	61,6	65,7	8,6

Sumber: Di olah dari berbagai faktor dan sumber yang dijelaskan di halaman berikutnya

Selanjutnya, keunggulan komparatif negara-negara ASEAN dan Tiongkok juga berbeda yang dapat dilihat dari jenis produk eksor terbesar kedua pihak. Negara-negara ASEAN memiliki produk ekspor terbesar ke Tiongkok yang cenderung merupakan bahan-bahan mentah dan bagian peralatan elektronik.

Sementara ekspor terbesar Tiongkok ke negara-negara ASEAN merupakan produk-produk olahan pabrik. Hal tersebut seperti terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.11 Jenis Barang Keunggulan Komparatif Negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok dan Sebaliknya

Negara	Ekspor Negara-negara ASEAN ke Tiongkok		Impor Negara-negara ASEAN dari Tiongkok	
	Jenis Barang	% Impor Tiongkok	Jenis Barang	% Impor Negara
Brunei	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral bitumen (mentah)	0,1%	Derek Kapal, Crane, Termasuk Kabel	64%
Kamboja	Kulit berbulu dan bulu tiruan	12%	Kain rajutan	59%
Indonesia	Batu bara	18%	Mesin pengolah data otomatis dan unit-unitnya	69%
Laos	Bijih tembaga	3%	Mesin dan peralatan listrik	97%
Malaysia	Sirkuit terpadu elektronik	3%	Sirkuit terpadu elektronik	12%
Myanmar	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya	6%	Kompresi-pembakaran mesin piston pembakara internal 'diesel atau mesin semi-diesel'	86%
Filipina	Sirkuit terpadu elektronik	6%	Set telepon	30%
Singapura	Sirkuit terpadu elektronik	6%	Set telepon	65%
Thailand	Karet	62%	Set telepon	68%
Vietnam	Sirkuit terpadu elektronik	2%	Set telepon	37%
	Rata-rata	12%	Rata-rata	59%

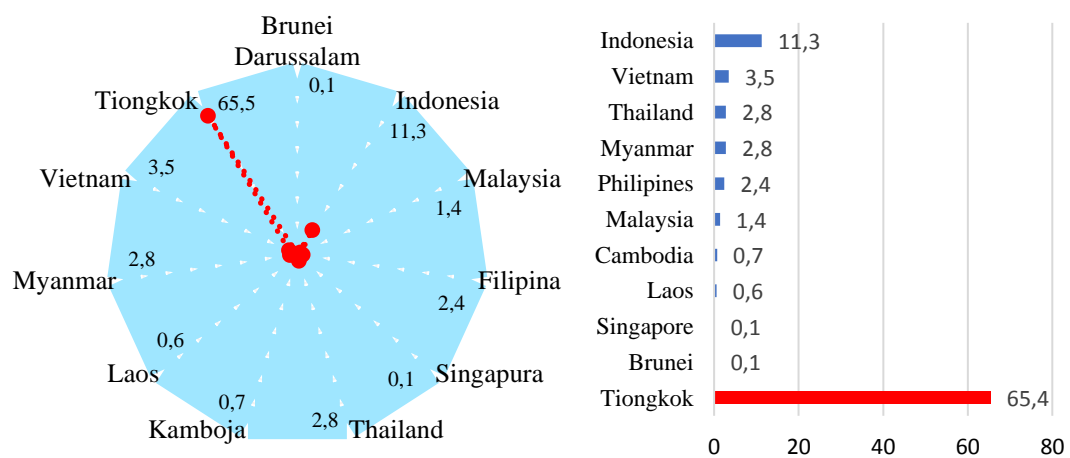
Ket:  : Bahan Baku Mentah  
 : Produk Olahan Pabrik

Sumber : Di olah dari data trademap.org

Penelitian ini dalam menentukan tingkatan keunggulan komparatif negara-negara ASEAN dan Tiongkok kemudian menggunakan faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif yang dikonseptualisasikan oleh Kowalski. Berdasarkan hal tersebut, terbentuk faktor-faktor yaitu: faktor *endowment*, modal manusia, energi suplai, iklim bisnis, kebebasan biaya tambahan tenaga kerja, kebebasan hambatan tarif impor, dan ketersediaan kredit. Faktor-faktor tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.2.1 Endowment

*Endowment* berkaitan dengan sumber daya yang bersifat 'given' dan dengan sendirinya menjadi faktor *pertama* pembangun keunggulan komparatif. Dalam menghitung nilai *endowment* negara-negara ASEAN dan Tiongkok, digunakan 3 indikator, yaitu: *Luas wilayah (daratan)*, *tenaga kerja (jumlah angkatan kerja)*, dan *sumber daya alam (total cadangan minyak, gas, dan batubara)*.



Ket : Indeks Skala 1 - 100

Gambar 4.6 Indeks *Endowment* Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>108</sup>

Indeks *endowment* di antara negara-negara ACFTA menunjukkan adanya ketimpangan nilai Tiongkok yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN. Di intra ASEAN sendiri, Indonesia menjadi negara dengan nilai tertinggi diikuti Vietnam. Ketimpangan nilai kemudian sangat terlihat dari jumlah nilai Indonesia yang mencapai 3 kali lipat nilai Vietnam. Di sisi lain, dibandingkan dengan nilai Tiongkok, Indonesia jauh tertinggal mencapai 54 poin. Lebih dari itu, seluruh penjumlahan nilai negara-negara ASEAN pun hanya mencapai 40% dari total nilai *endowment* Tiongkok.

<sup>108</sup> *Ibid.*

Ketimpangan lebih lanjut terlihat dari ketiga indikator yang digunakan baik dalam segi luas wilayah, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Tiongkok selalu menunjukkan nilai yang jauh lebih besar di setiap indikatornya. Sementara di intra negara-negara ASEAN, Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Rincian nilai ketiga indikator tersebut kemudian terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.11 Indek indikator *endowment* negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>109</sup>

Negara	Luas Wilayah		Tenaga Kerja		Sumber Daya Alam					
	Luas daratan (km <sup>2</sup> )		Total Angkatan Kerja		Minyak (miliar barrel)		Gas (triliun kubik meter)		Batu Bara (juta ton)	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Indonesia	1910931	11,18	125383640	15,93	3,3	1,1	2,9	8,66	25573	10,16
Vietnam	330967	1,94	55764751	7,08	4,4	1,46	0,6	1,79	3360	1,34
Thailand	513120	3	38995090	4,95	0,4	0,13	0,2	0,6	1063	0,42
Myanmar	676590	3,96	25085206	3,19	0	0	1,2	3,58	0	0
Philippines	300000	1,76	43754074	5,56	0	0	0	0	0	0
Malaysia	330800	1,94	15113523	1,92	3,6	1,2	0	0	0	0
Cambodia	181040	1,06	9125751	1,16	0	0	0	0	0	0
Lao PDR	236800	1,39	3524361	0,45	0	0	0	0	0	0
Singapore	719	0	3263578	0,41	0	0	0	0	0	0
Brunei	5770	0,03	217846	0,03	0,1	0,03	0,3	0,9	0	0
Tiongkok	9562911	55,93	787086139	100	25,7	8,54	5,4	16,12	244010	96,99

Ket:

Jumlah : Angka aktual sesuai dengan satuan

Nilai : Indeks skala rasio 1 - 100

Sumber : data *worldbank.org* dan *BP Statistical Review of World Energy*

*Endowment* negara-negara ACFTA juga mengalami perubahan karena adanya pergeseran jumlah penduduk, eksploitasi atau penemuan sumber daya alam, dan lain-lain. Di antara negara-negara anggota ACFTA, *endowment* Tiongkok telah stabil meningkat sejak tahun 2010 – 2016. Tiongkok juga telah menjadi negara dengan *endowment* terbesar dalam kerja sama ini selama periode tersebut. Senada dengan Tiongkok, Indonesia juga mengalami peningkatan positif dan telah

<sup>109</sup> Luas wilayah dan tenaga kerja diperoleh dari data *worldbank.org*, sumber daya alam diperoleh dari *Report BP Statistical Review of World Energy*.

memiliki *endowment* terbesar di intra negara-negara ASEAN pada periode yang sama.

Tabel 4.12 Indeks *endowment* Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>110</sup>

Negara	<i>Endowment</i>				% perubahan 2010 – 2016
	2010	2012	2014	2016	
Indonesia	9,9	10,2	11,3	11,3	13,3
Vietnam	3,2	3,3	3,3	3,5	11,0
Thailand	2,8	2,9	2,8	2,8	-1,8
Myanmar	2,4	2,4	2,5	2,8	15,8
Philippines	2,2	2,3	2,4	2,4	8,9
Malaysia	2,0	18	1,8	1,4	-29,4
Cambodia	0,7	0,7	0,7	0,7	5,7
Laos	0,6	0,6	0,6	0,6	3,4
Singapore	0,1	0,1	0,1	0,1	16,7
Brunei	0,1	0,2	0,2	0,1	-14,3
Tiongkok	58,7	59,0	59,2	65,5	11,7

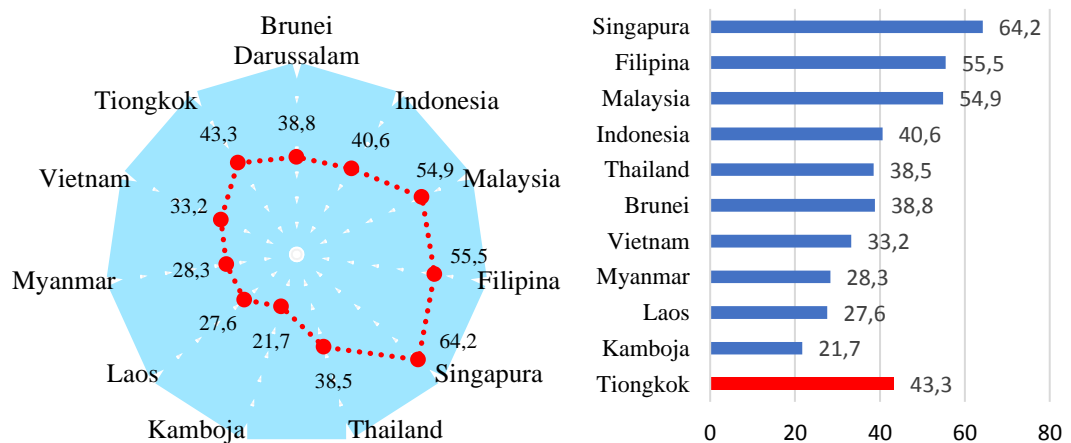
Sumber: Di olah dari berbagai faktor dan sumber

#### 4.2.2 Modal Manusia

Modal manusia menentukan pergerakan ekonomi negara melalui produktivitas dan kreativitas yang ditunjukkan oleh masyarakat negara tersebut. Oleh sebab itu, modal manusia menjadi faktor *kedua* pembangun keunggulan komparatif yang penting bagi suatu negara. Dalam penentuan indeks modal manusia, digunakan tiga indikator yaitu: *persentase populasi di atas 25 tahun yang mengenyam scondary education (di Indonesia setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA))*, *persentase populasi di atas 25 tahun yang mengenyam teritary education (dunia perkuliahan)*, dan *rata-rata waktu sekolah masyarakat*.

<sup>110</sup> Di olah dari berbagai indikator dan sumber yang telah dijelaskan.





Ket : Indeks Skala 1 – 100

Gambar 4.7 Indeks Modal Manusia Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>111</sup>

Indeks modal manusia pada tahun 2016 menunjukkan adanya ketimpangan modal manusia di antara negara-negara ACFTA. Singapura menjadi negara dengan nilai modal manusia tertinggi, sementara negara-negara ASEAN CLMV berurutan memiliki nilai modal manusia terendah. Ketimpangan modal manusia kemudian terlihat dari hampir seluruh negara-negara CLMV yang tidak mencapai setengah dari nilai Singapura. Lebih lanjut, modal manusia di negara-negara ASEAN dan Tiongkok juga menunjukkan kecilnya kepemilikan modal manusia dalam kerja sama ACFTA. Delapan dari sebelas negara-negara dalam kerja sama ini memiliki nilai modal manusia di bawah garis tengah yaitu 50 dari skala 1 – 100.

Selain itu, indeks dalam indikator modal manusia menunjukkan adanya karakteristik masing-masing negara dalam kepemilikan modal manusia. Malaysia, Tiongkok, dan Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang lebih banyak mengenyam pendidikan *secondary education*. Sementara Singapura, Filipina, dan Thailand lebih banyak memiliki masyarakat yang mengenyam bangu *teritary*

<sup>111</sup> Di olah dari data Human Capital Report 201 hrd.undp.org . Diakses pada 24 Desember 2017, pukul 01.30 WIB

*education*. Singapura, Malaysia, dan Filipina lebih lanjut juga merupakan negara-negara dengan rata-rata waktu sekolah masyarakat yang paling lama.

Tabel 4.13 Indeks indikator modal manusia negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>112</sup>

Negara	SE		TE		RT	
	Angka	Nilai	Angka	Nilai	Angka	Nilai
Singapura	44,1	44,1	31,0	62,0	11,6	86,5
Filipina	43,1	43,1	27,0	54,0	9,3	69,4
Malaysia	57,8	57,8	15,8	31,6	10,1	75,2
Indonesia	43,4	43,4	9,7	19,4	7,9	59,0
Thailand	24,2	24,2	16,2	32,4	7,9	59,0
Brunei	35,3	35,3	7,0	14,0	9,0	67,2
Vietnam	28,4	28,4	5,7	11,4	8,0	59,7
Myanmar	33,5	33,5	8,1	16,2	4,7	35,1
Laos	18,9	18,9	12,5	25,0	5,2	38,8
Kamboja	26,3	26,3	1,8	3,6	4,7	35,1
Tiongkok	59,5	59,5	6,9	13,8	7,6	56,7

Ket: SE : Persentase populasi di atas 25 tahun yang mengenyam *secondary education*  
 TE : Persentase populasi di atas 25 tahun yang mengenyam *teritary education*  
 R : Rata-rata waktu sekolah masyarakat  
 Angka : Angka aktual  
 Nilai : Indeks skala 1 – 100 (kolom B, nilai dikali 2 untuk standarisasi bobot indikator)  
 Sumber : di olah dari berbagai sumber

Modal manusia negara-negara anggota ACFTA juga mengalami perubahan nilai disetiap tahunnya. Singapura konsisten menjadi negara dengan nilai modal manusia tertinggi sementara negara-negara CLMV konsisten berurutan menjadi negara-negara dengan nilai modal manusia terendah (kecuali Vietnam di tahun 2010). Tiongkok disisi lain stabil di posisi ke-empat negara-negara anggota ACFTA. Perkembangan nilai modal manusia pada periode 2010, 2014, dan 2016 juga menunjukkan adanya penurunan kesenjangan nilai yang terjadi di antara anggota ACFTA. Perubahan nilai positif dalam periode tersebut didominasi oleh sebagian negara-negara CLMV. Delapan negara-negara ACFTA juga mengalami

<sup>112</sup> Data 2010 diambil dari data set Barro R. & J. W. Lee dalam barrolee.com , data 2014 dan 2016 dan rata-rata waktu sekolah (2010, 2014, dan 2016) diambil dari Human Capital Report hrd.undp.org . Diakses pada 24 Desember 2017, pukul 01.30 WIB

kenaikan yang beragam. Hal ini penting dan mengindikasikan modal manusia yang semakin baik dalam kerja sama kawasan ini.

Tabel 4.14 Indeks Modal Manusia Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>113</sup>

Negara	Modal Manusia			% Perubahan 2010-2016
	2010	2014	2016	
Singapore	65,8	64,2	64,2	-2,7
Philippines	52,4	55,5	55,5	5,9
Malaysia	53,1	54,9	54,9	3,4
Indonesia	35,0	40,6	40,6	15,9
Brunei	47,4	38,8	38,8	-18,1
Thailand	35,3	38,5	38,5	9,3
Vietnam	42,5	32,7	33,2	-21,9
Myanmar	19,1	28,3	28,3	47,7
Lao PDR	23,1	27,6	27,7	19,5
Cambodia	16,9	21,7	21,7	28,6
Tiongkok	40,7	43,3	43,3	6,6

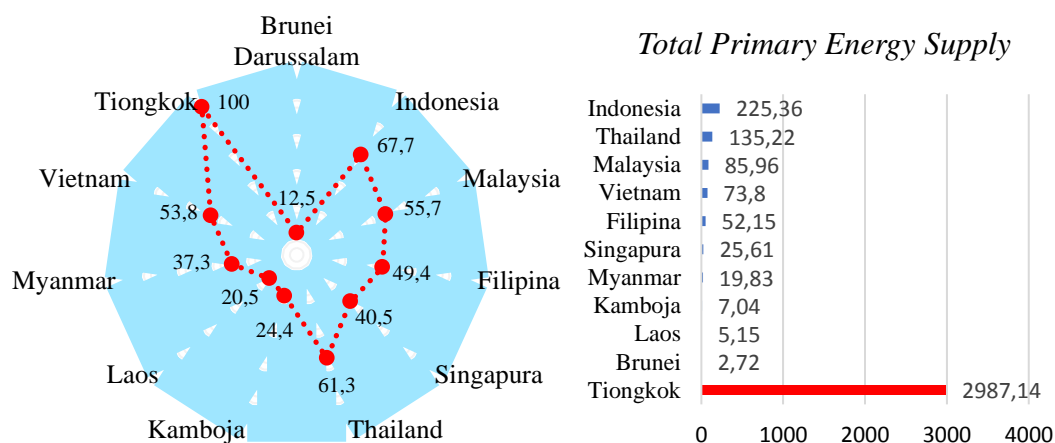
Sumber: di olah dari data Barro & Lee serta Human Capital Report

### 4.2.3 Energi

Energi menjadi faktor *ketiga* pembangun keunggulan komparatif karena berkaitan dengan produksi hampir seluruh komoditas dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat di suatu negara. Penghitungan indeks energi dalam penelitian ini menggunakan indikator *total primary energy supply* (TPES) negara-negara ACFTA yang kemudian diskalakan.<sup>114</sup> Nilai indikator tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara energi Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, total energi Tiongkok nyaris mencapai 5 kali lipat dari total penjumlahan energi negara-negara ASEAN. Hal tersebut diperparah dengan ketimpangan energi di kawasan ASEAN sendiri dimana total energi Indonesia nyaris mencapai 100 kali lipat dari total energi Brunei.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Indikator ini di olah dengan rumus *Log* sebelum di skalakan.



Gambar 4.8 Indeks (Skala 1 – 100) dan Data nilai TPES (Satuan Mtoe) Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2015<sup>115</sup>

Perubahan total energi suplai negara-negara ACFTA juga terjadi setiap tahunnya. Perubahan energi pada tahun 2010 – 2015 dalam kerja sama ini terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Indeks Energi Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>116</sup>

Negara	Energy							
	Total Primary energy Supply - TPES (Mtoe)							
	2010		2012		2014		2015	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Indonesia	210,62	68,3	210,67	67,4	224,53	67,8	225,36	67,7
Thailand	117,84	60,7	126,2	60,9	134,87	61,4	135,22	61,3
Malaysia	73,38	54,8	77,86	54,8	89,7	56,3	85,96	55,7
Vietnam	58,91	52,0	59,84	51,5	66,86	52,6	73,8	53,8
Filipina	40,4	47,2	43,25	47,4	40,78	46,4	52,15	49,4
Singapura	25,42	41,3	25,69	40,9	26,07	40,8	25,61	40,5
Myanmar	13,52	33,2	14,99	34,1	15,52	34,3	19,83	37,3
Kamboja	5,33	21,4	5,79	22,1	6,39	23,2	7,04	24,4
Laos	2,38	11,1	2,42	11,1	3,14	14,3	5,15	20,5
Brunei	3,24	15,0	3,83	16,9	3,55	15,7	2,72	12,5
Tiongkok	2536,28	100	2818,57	100	2953,52	100	2987,14	100

Ket:

Jumlah : Angka aktual sesuai dengan satuan

Nilai : Indeks skala rasio 1 - 100

Sumber : Di olah dari data iea.org dan aseanenergy.org

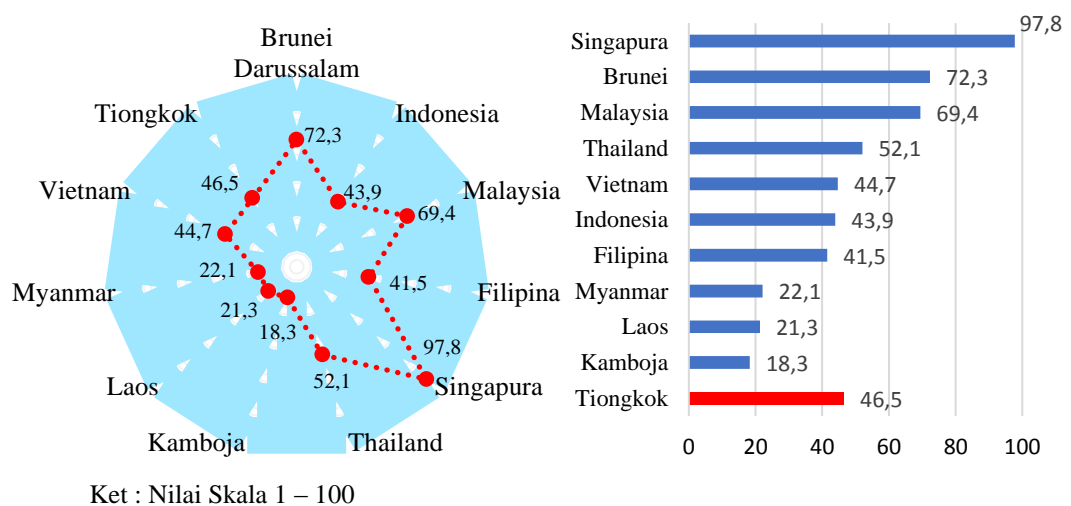
<sup>115</sup> di olah dari data iea.org dan aseanenergy.org

<sup>116</sup> Di olah dari data: iea.org dan aseanenergy.org , diakses pada 24 Desember 2017, pukul 01.35 WIB

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa besarnya ketimpangan energi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok telah terjadi sejak awal periode 2010 – 2015. Total energi Tiongkok stabil meningkat pada periode tersebut dan selalu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Meskipun hampir seluruh negara-negara ASEAN juga turut mengalami peningkatan, namun ketimpangan energi yang terjadi turut semakin meningkat pada periode tersebut.

#### 4.2.4 Iklim Bisnis

Iklim bisnis berkaitan dengan kemudahan dalam pelaksanaan proses perekonomian di suatu kawasan dan menjadikannya sebagai faktor *keempat* pembangun keunggulan komparatif di suatu negara. Penentuan indeks iklim bisnis dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu: *kualitas pengaturan (regulatory quality)*, *pengendalian hukum (rule of law)*, dan *kontrol korupsi (control of corruption)*.



Gambar 4.9 Indeks Iklim Bisnis Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>117</sup>

<sup>117</sup> Di olah dari data *World Government Index*, diakses melalui [worldbank.org](http://worldbank.org) pada 24 Desember 2017, pukul 01.40 WIB

Pada tahun 2016, indeks iklim bisnis di negara-negara ACFTA kembali menunjukkan adanya ketimpangan nilai yang sangat besar. Ketimpangan terlihat dari total nilai Singapura yang lebih dari empat kali lipat dibandingkan tiga negara dengan nilai terendah. Selain itu, tujuh negara anggota ACFTA juga memiliki nilai tidak lebih dari 50, sementara nilai Singapura hampir mencapai nilai sempurna atau mendekati 100.

Tabel 4.16 Indeks indikator iklim bisnis negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>118</sup>

Negara	Iklim Bisnis															
	2010				2012				2014				2016			
	KP	PH	KK	Nilai	KP	PH	KK	Nilai	KP	PH	KK	Nilai	KP	PH	KK	Nilai
Singapura	98,1	91,9	98,6	96,2	100	94,4	97,2	97,2	100	93,3	96,2	96,5	100	96,2	97,1	97,8
Brunei	82,3	72,5	78,1	77,6	84,8	73,2	71,6	76,5	79,8	69,2	67,7	72,2	71,2	73,1	72,6	72,3
Malaysia	70,3	64,9	61	65,4	70,1	68,4	64	67,5	76	73,6	66,8	72,1	75,5	71,2	61,5	69,4
Thailand	56,5	48,3	46,2	50,3	58,8	50,2	44,1	51,0	61,5	48,6	38,9	49,7	60,1	55,3	40,9	52,1
Vietnam	28,7	32,7	31,4	30,9	28	35,2	36	33,1	30,8	41,8	40,9	37,8	35,1	57,2	41,8	44,7
Indonesia	36,6	31,3	24,8	30,9	43,6	34,3	31,3	36,4	50	42,8	33,7	42,2	50	38,9	42,8	43,9
Filipina	45	35,1	23,3	34,5	51,7	39	35,1	41,9	52,4	43,8	40,4	45,5	53,8	36,5	34,1	41,5
Myanmar	1	2,8	0,5	1,4	2,4	6,1	13,7	7,4	6,3	8,2	20,2	11,6	18,8	16,8	30,8	22,1
Laos	17,7	16,6	8,6	14,3	23,2	22,1	15,6	20,3	21,6	25,5	21,2	22,8	24,5	24	15,4	21,3
Kamboja	35,9	12,8	7,1	18,6	39,8	16,9	13,3	23,3	35,6	15,9	11,5	21,0	34,1	12,5	8,2	18,3
Tiongkok	44,5	40,8	33,3	39,5	44,1	35,7	40,3	40,0	43,8	38,9	35,7	39,5	44,2	46,2	49	46,5

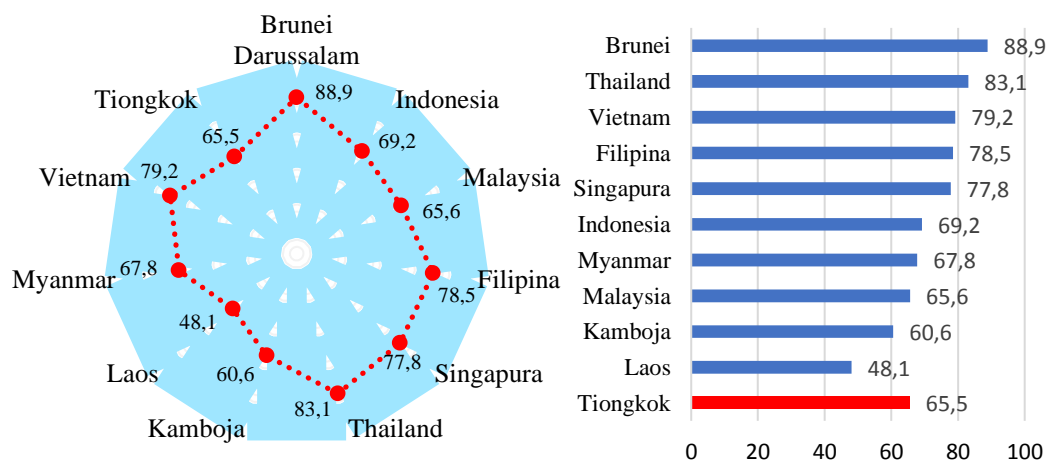
Ket: KP : Kualitas Pengaturan  
 PH : Pengendalian Hukum  
 KK : Kontrol Korupsi  
 Nilai : Indeks skala 1 – 100 (rata-rata indikator)  
 Sumber : Di olah dari data *World Government Index*, [worldbank.org](http://worldbank.org)

Berdasarkan ketiga indikator yang digunakan, kualitas iklim bisnis negara-negara ACFTA tercatat mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada periode 2010 – 2016, Singapura menjadi negara yang konsisten menempati posisi pertama. Sebagian besar negara-negara anggota ACFTA mengalami peningkatan nilai dimana Myanmar menjadi negara dengan peningkatan paling pesat. Peningkatan tersebut kemudian turut mengurangi kesenjangan nilai yang sangat besar di tahun 2010.

<sup>118</sup> *Ibid.*

#### 4.2.5 Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja

Kebebasan biaya tambahan tenaga kerja menjadi faktor *kelima* pembangun keunggulan komparatif suatu negara. Dalam menentukan indeks faktor ini, penelitian ini menggunakan 3 indikator, yaitu: *Biaya tambahan kerja malam (% gaji per-jam)*, *biaya tambahan kerja akhir pekan (% gaji per-jam)*, dan *pesangon pemecatan (kali gaji mingguan)*. Dengan demikian, semakin rendah nilai ketiga indikator tersebut, maka semakin tinggi kebebasan biaya tambahan tenaga kerja yang dimiliki suatu negara.



Ket : Nilai Skala 1 – 100

Gambar 4.10 Indeks Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>119</sup>

Indeks kebebasan biaya tambahan tenaga kerja negara anggota ACFTA di tahun 2016 menunjukkan kesenjangan nilai yang tidak sebesar faktor-faktor sebelumnya. Perbedaan yang cukup besar hanya terjadi pada nilai Brunei (tertinggi) yang hampir dua kali lipat dari nilai Laos (terendah). Sementara negara-negara

<sup>119</sup> Di olah dari data *Doing Business Report*, melalui *doingbusiness.org* pada 24 Desember 2017, pukul 01.49 WIB.

ACFTA lainnya berada di kisaran 60 – 80 an. Di sisi lain, sebagian negara-negara CLMV masih berada di empat negara terendah (Laos, Kamboja, dan Myanmar).

Tabel 4.17 Indeks Indikator Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>120</sup>

Negara	Tingkat Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja											
	2010			2012			2014			2016		
	KM	KA	PP	KM	KA	PP	KM	KA	PP	KM	KA	PP
Brunei	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0
Thailand	0	0	31,7	0	0	31,7	0	0	31,7	0	0	31,7
Vietnam	30	100	23,1	30	100	24,6	30	0	24,6	30	0	24,6
Filipina	10	30	23,1	10	30	23,1	10	30	23,1	10	30	23,1
Singapura	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0
Indonesia	0	0	34,7	0	0	57,8	0	0	57,8	0	0	57,8
Myanmar	0	100	15,3	0	100	15,9	0	100	15,9	0	100	18,8
Malaysia	0	0	17,2	0	0	17,2	0	0	17,2	0	100	22,8
Kamboja	30	100	10,7	30	100	11,4	30	100	11,4	130	0	11,4
Laos	15	150	40,7	15	150	40,7	15	150	40,7	15	150	27,7
Tiongkok	39	100	23,1	39	100	23,1	39	100	23,1	0	100	23,1

Ket: KM : Biaya tambahan kerja malam (% jam kerja biasa)  
 KA : Biaya tambahan kerja akhir pekan (% jam kerja biasa)  
 PP : Pesangon pemecatan (kali gaji mingguan)  
 Sumber: di olah dari data *Doing Business Report*

Indikator yang digunakan dalam faktor ini juga menunjukkan adanya karakteristik masing-masing negara anggota ACFTA. Brunei dan Singapura menjadi negara yang hanya memberikan bonus kerja akhir pekan. Thailand, Indonesia, dan Malaysia hanya memberikan pesangon pemecatan (kecuali kebijakan Malaysia di 2016). Myanmar hanya tidak memberikan bonus kerja malam. Sementara Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Tiongkok memberikan biaya tambahan bagi tenaga kerja di setiap indikator.

Selain itu, perubahan juga kerap terjadi dalam kebebasan biaya tambahan tenaga kerja di negara-negara ACFTA. Pada periode 2010 – 2016, Brunei merupakan negara paling stabil dan selalu menjadi negara dengan kebebasan biaya

<sup>120</sup> *Ibid.*



tambahan paling tinggi. Vietnam kemudian menjadi negara dengan kenaikan tingkat kebebasan terbesar. Sebaliknya, Malaysia justru mengalami tingkat kebebasan yang cukup besar. Perubahan yang terjadi pada negara-negara ACFTA juga dapat di kelompokkan sebagai berikut: 2 negara (Brunei dan Singapura) tidak mengalami perubahan; 3 negara (Vietnam, Laos, dan Tiongkok) mengalami kenaikan; dan 6 negara (Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Malaysia, dan Kamboja) mengalami penurunan.

Tabel 4.18 Indeks Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>121</sup>

Negara	Kebebasan Biaya Tambahan Tenaga Kerja				% Perubahan 2010-2016
	2010	2012	2014	2016	
Brunei D.	88,9	88,9	88,9	88,9	0
Thailand	84,8	84,8	84,8	83,1	-2,0
Vietnam	60,0	61,0	83,2	79,2	32,0
Filipina	80,0	80,6	80,6	78,5	-1,9
Singapura	77,8	77,8	77,8	77,8	0
Indonesia	83,3	72,3	72,3	69,2	-17,0
Myanmar	70,4	70,2	70,2	67,8	-3,8
Malaysia	91,7	91,8	91,8	65,6	-28,5
Kamboja	66,0	67,3	67,3	60,6	-8,2
Laos	43,8	44,7	44,7	48,1	9,8
Tiongkok	58,0	60,2	60,2	65,5	12,9

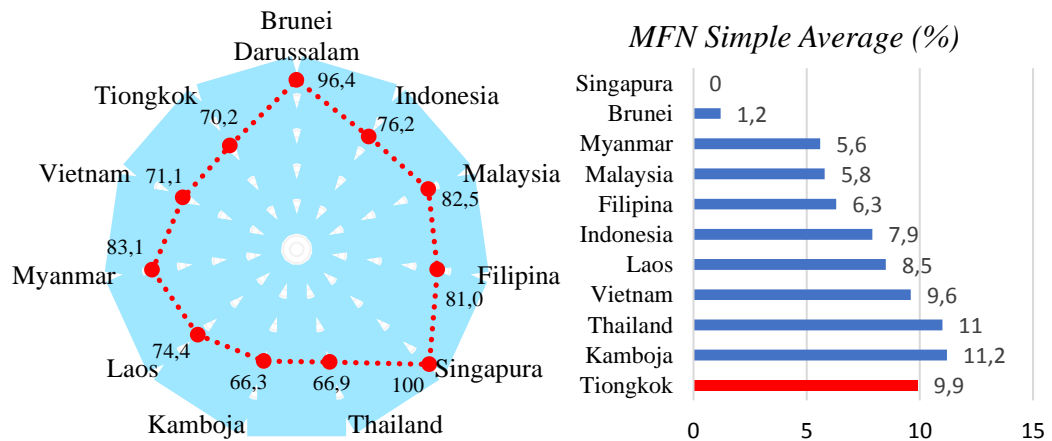
\*Pengelolaan nilai akhir dijelaskan dalam lampiran  
Sumber: di olah dari data *Doing Business Report*

#### 4.2.6 Kebebasan Hambatan Tarif Impor

Kebebasan hambatan tarif impor menjadi faktor *keenam* pembangun keunggulan komparatif karena berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh bahan baku industri dari luar negeri. Penghitungan indeks faktor ini kemudian menggunakan indikator *Most Favoured Nations (MFN) simple average*

<sup>121</sup> *Ibid.*

(rata-rata tarif BEA Cukai sederhana) yang diterapkan oleh negara-negara ACFTA terhadap dunia dan mencakup seluruh produk.



Gambar 4.11 Indeks (Skala 1 – 100) Kebebasan Hambatan Tarif Impor dan *MFN simple average* Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>122</sup>

Penghitungan yang dilakukan kemudian menemukan bahwa faktor ini kembali tidak memperlihatkan kesenjangan nilai sebesar faktor-faktor sebelumnya. Pada tahun 2016, Singapura menjadi pemilik nilai kebebasan tarif terbesar dengan tidak menerapkan *MFN simple average* terhadap barang-barang yang masuk. Sebaliknya Kamboja memiliki nilai terendah di antara negara-negara ACFTA dengan menerapkan *MFN simple average* tertinggi. Meski demikian, selisih nilai yang didapat memperlihatkan nilai yang ternyata tidak jauh berbeda.

Seperti faktor-faktor sebelumnya, perubahan nilai juga kerap terjadi pada kebebasan hambatan tarif impor negara-negara ACFTA. Meski demikian, pada tahun 2010 – 2016 tidak terdapat perubahan berarti yang terjadi. Singapura konsisten menjadi negara dengan nilai kebebasan tertinggi. Sebaliknya sebagian besar negara CLMV konsisten berada di posisi terendah.

<sup>122</sup> Di olah dari data *World Tariff Profiles* 2011, 2013, 2015, dan 2017. [Wto.org/statistics](http://Wto.org/statistics) dan data [wits.worldbank.org](http://wits.worldbank.org). Diakses pada 02 Februari 2018, pukul 03.23 WIB

Tabel 4.19 Indeks Kebebasan Hambatan Tarif Impor Negara-negara ASEAN dan Tiongkok<sup>123</sup>

Negara	Kebebasan Hambatan Tarif Impor							
	2010		2012		2014		2016	
	MSA (%)	Nilai	MSA (%)	Nilai	MSA (%)	Nilai	MSA (%)	Nilai
Singapura	0	100	0,2	99,4	0,2	99,4	0	100
Brunei	2,5	93,0	2,5	93,0	1,2	96,6	1,2	96,4
Myanmar	5,56	84,5	5,6	84,4	5,6	84,1	5,6	83,1
Malaysia	8	77,7	6,5	81,9	6,1	82,6	5,8	82,5
Filipina	6,3	82,5	6,2	82,7	6,3	82,1	6,3	81,0
Indonesia	6,8	81,1	7	80,5	6,9	80,3	7,9	76,2
Laos	10	72,1	10	72,1	10	71,5	8,5	74,4
Vietnam	9,8	72,7	9,5	73,5	9,5	72,9	9,6	71,1
Thailand	9,9	72,4	9,8	72,7	11,6	67,0	11	66,9
Kamboja	12,03	66,5	10,9	69,6	11,2	68,1	11,2	66,3
Tiongkok	9,6	73,3	9,6	73,3	9,6	72,7	9,9	70,2

Ket: MSA : *MFN Simple Average*

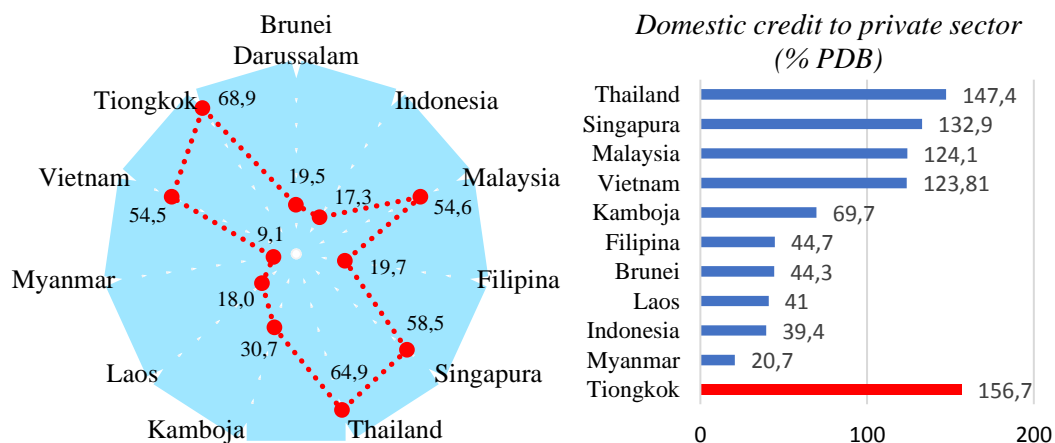
Nilai : Nilai skala 1 – 100 (Cara olah nilai dijelaskan dalam lampiran)

Sumber : *World Tariff Profiles* 2011, 2013, 2015, dan 2017 dan worldbank

#### 4.2.7 Ketersediaan Kredit

Ketersediaan kredit berkaitan dengan sumber daya finansial yang tersedia bagi usaha di dalam negeri suatu negara dan menjadi faktor *ketujuh* pembangun keunggulan komparatif. Dalam menghitung indeks ketersediaan kredit, penelitian ini menggunakan indikator *domestic credit to private sector (% PDB)* (DCPS) yang kemudian diskalakan. Penghitungan yang dilakukan kemudian menunjukkan adanya ketimpangan nilai yang cukup besar. Ketimpangan nilai terlihat dari total nilai *domestic credit to private sector* Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia dan Vietnam yang melebihi 120% dari total PDB negara-negara tersebut. Sementara kelompok negara-negara ACFTA lain hanya memiliki nilai yang tidak mencapai angka 45% dari total PDB masing-masing.

<sup>123</sup> *Ibid.*



Gambar 4.12 Indeks (Skala 1 – 100) Ketersediaan Kredit dan *Domestic Credit to Private Sector* (% PDB) Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>124</sup>

Perubahan nilai ketersediaan kredit negara-negara ACFTA juga mengalami perubahan pada tahun 2010 – 2016. Perubahan yang terjadi di periode tersebut cenderung menunjukkan kekonsistensian peningkatan di setiap negara. Meski demikian kesenjangan nilai rata-rata ketersediaan kredit negara-negara ASEAN ke Tiongkok turut mengalami peningkatan.

Tabel 4.20 Indeks Ketersediaan Kredit Negara-negara ASEAN dan Tiongkok 2016<sup>125</sup>

Negara	Ketersediaan Kredit							
	2010		2012		2014		2016	
	Angka	Nilai	Angka	Nilai	Angka	Nilai	Angka	Nilai
Thailand	115,7	49,0	136,2	54,6	146,2	58,5	147,4	64,9
Singapura	96,2	40,7	115,3	46,3	130,9	52,3	132,9	58,5
Malaysia	107,1	45,3	114,1	45,8	120,6	48,2	124,1	54,6
Vietnam	114,7	48,6	94,8	38,0	100,3	40,1	123,81	54,5
Kamboja	27,6	11,7	38,8	15,6	54,1	21,6	69,7	30,7
Filipina	29,6	12,5	33,4	13,4	39,2	15,7	44,7	19,7
Brunei	36,9	15,6	28	11,2	33,2	13,3	44,3	19,5
Laos	20,9	8,9	29,3	11,8	34,1	13,6	41	18,0
Indonesia	27,3	11,6	33,4	13,4	36,4	14,6	39,4	17,3
Myanmar	4,8	2,0	9,3	3,7	15,5	6,2	20,7	9,1
Tiongkok	126,3	53,5	128,5	51,5	140,1	56,0	156,7	68,9

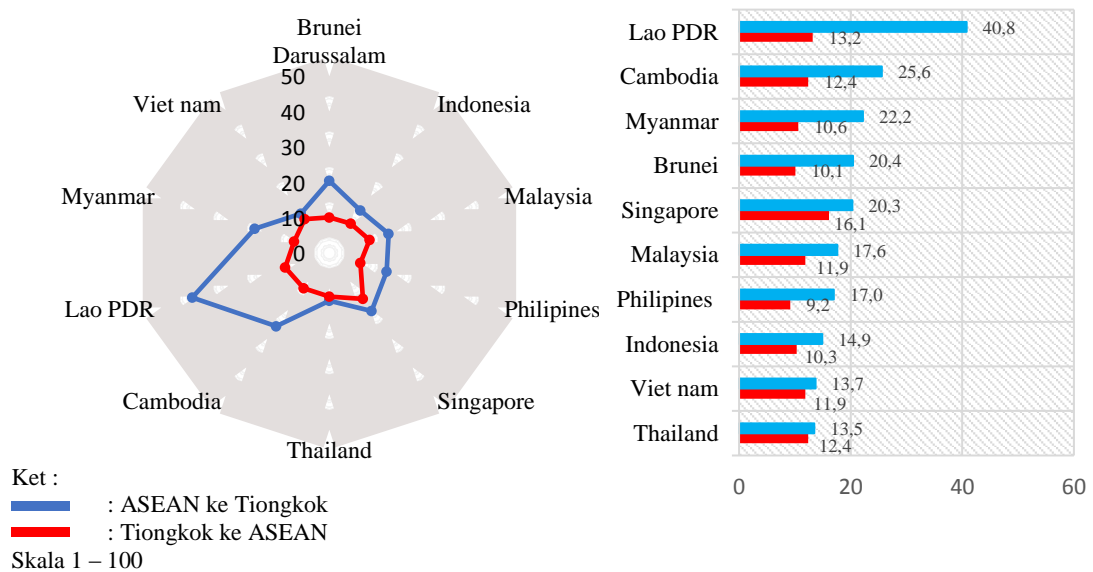
Ket: Angka : Angka *domestic credit to private sector* (% PDB)  
 Nilai : Indeks skala rasio 1 - 100 (sistem pengolahan nilai dijelaskan dalam lampiran)  
 Sumber : Di olah dari data [iea.org](http://iea.org) dan [aseanenergy.org](http://aseanenergy.org)

<sup>124</sup> Di olah dari data *World Tariff Profiles* 2011, 2013, 2015, dan 2017. [Wto.org/statistics](http://Wto.org/statistics) dan data [wits.worldbank.org](http://wits.worldbank.org) . Diakses pada 02 Februari 2018, pukul 03.23 WIB

<sup>125</sup> Di olah dari data [worldbank.org](http://worldbank.org) pada 24 Desember 2017, pukul 02.35 WIB.

### 4.3 Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya

Ketergantungan menciptakan sebuah situasi dimana perekonomian negara-negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan ekonomi negara-negara lain. Sehingga, negara yang lebih dominan mampu menciptakan aksi dalam memperluas ekonominya dan menjadi mandiri, sementara negara-negara yang lebih bergantung hanya dapat membuat aksi sebagai refleksi dari perluasan negara dominan.<sup>126</sup>



Gambar 4.13 Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2015<sup>127</sup>

Di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok, keadaan ketergantungan memperlihatkan ketergantungan ASEAN ke Tiongkok lebih tinggi dibandingkan sebaliknya. Laos, Kamboja, dan Myanmar merupakan negara-negara ASEAN yang memiliki ketergantungan tertinggi ke Tiongkok. Sementara Thailand, Vietnam, dan Indonesia menjadi negara dengan ketergantungan terendah. Di sisi lain, ketergantungan Tiongkok ke negara-negara ASEAN cenderung merata dengan

<sup>126</sup> Theotonio Dos Santos, *Op. Cit.*

<sup>127</sup> Di olah dari berbagai faktor dan sumber yang dijelaskan di halaman berikutnya

Singapura, Laos, dan Cambodia menjadi negara pemegang ketergantungan Tiongkok tertinggi.

Ketgantungan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi juga terlihat dari selisih tarik-menarik ketergantungan di antara keduanya. Seluruh negara ASEAN memiliki nilai negatif yang berarti lebih bergantung ke Tiongkok dibanding sebaliknya. Thailand, Vietnam, dan Singapura menjadi negara-negara dengan selisih ketergantungan paling baik, sementara negara-negara CLMV (kecuali Vietnam) menjadi negara-negara dengan selisih ketergantungan paling negatif. Lebih lanjut, rata-rata nilai ketergantungan ASEAN ke Tiongkok bahkan hampir dua kali lipat dibanding sebaliknya.

Tabel 4.21 Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2015<sup>128</sup>

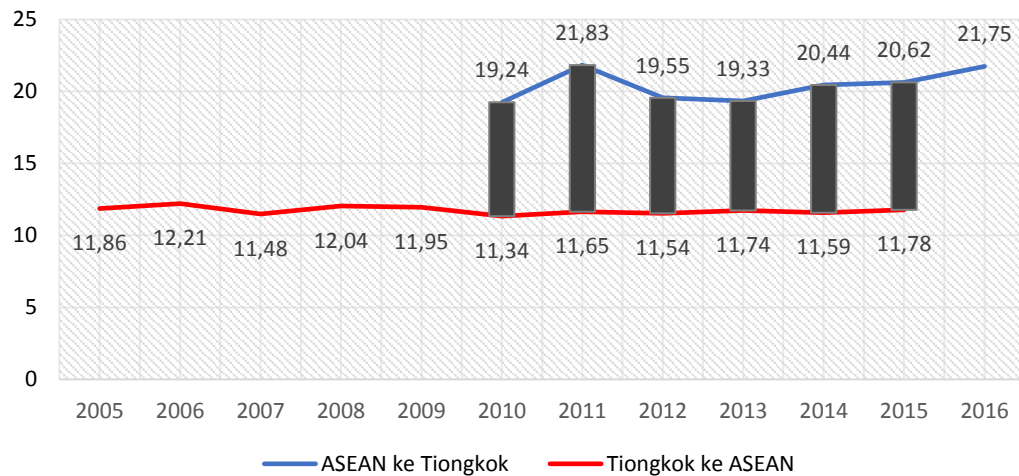
Negara	Nilai Ketergantungan		
	ASEAN ke Tiongkok	Tiongkok ke ASEAN	Selisih Ketergantungan
Lao PDR	40,8	13,2	-27,6
Cambodia	25,6	12,4	-13,2
Myanmar	22,2	10,6	-11,7
Singapore	20,3	16,1	-4,2
Brunei	20,4	10,1	-10,3
Malaysia	17,6	11,9	-5,7
Philippines	17,0	9,2	-7,8
Indonesia	14,9	10,3	-4,6
Vietnam	13,7	11,9	-1,8
Thailand	13,5	12,4	-1,1
Rata-rata	20,6	11,8	-8,8

Sumber: Di olah dari berbagai faktor dan sumber yang dijelaskan di halaman berikutnya

Nilai ketergantungan negara-negara ASEAN dan Tiongkok juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Meski demikian, ketergantungan ASEAN ke Tiongkok cenderung semakin besar pada periode 2010 - 2016. Hal sebaliknya terjadi pada

<sup>128</sup> *Ibid.*

ketergantungan Tiongkok ke negara-negara ASEAN yang cukup stabil pada periode 2005-2015.



Gambar 4.14 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>129</sup>

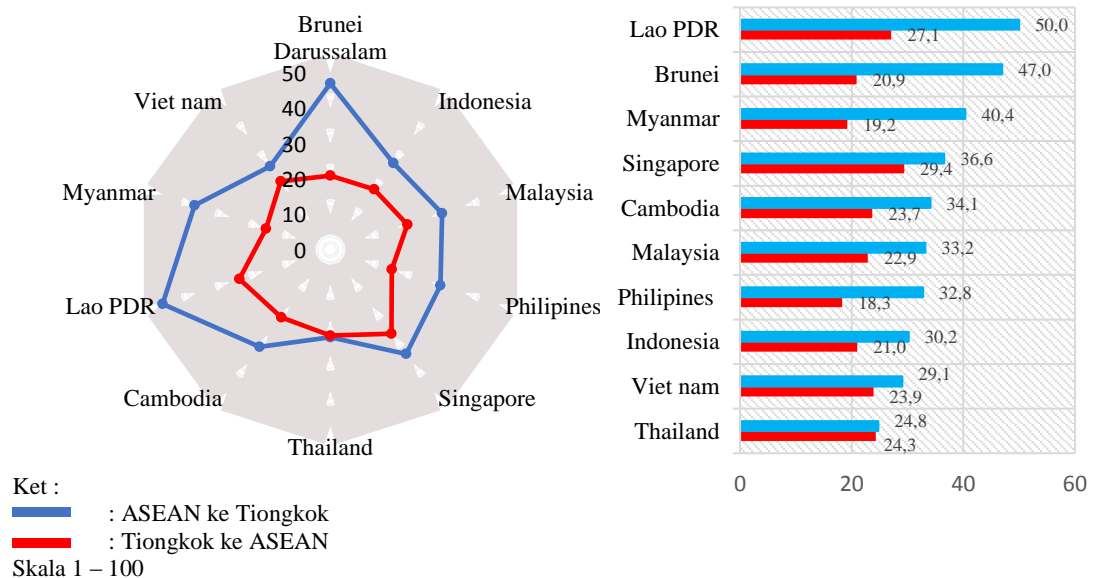
Dalam menghitung nilai ketergantungan, penelitian ini menggunakan beberapa faktor dan indikator yang berbasis kepada ketergantungan ekonomi suatu negara. Adapun faktor-faktor tersebut adalah *ketergantungan perdagangan* dan *ketergantungan investasi* yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.3.1 Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya

Perdagangan menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dari hubungan antar negara khususnya di bidang ekonomi. Perdagangan kemudian menjadi salah satu *input* terbesar bagi suatu negara dalam menggerakkan perekonomiannya. Oleh karena itu, ketergantungan perdagangan menjadi hal yang penting untuk digaris bawahi dalam melihat seberapa besar suatu negara bergantung kepada negara lain. Ketergantungan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2016 menunjukkan gejala ketergantungan ASEAN ke Tiongkok yang lebih

<sup>129</sup> *Ibid.*

tinggi dibanding sebaliknya. Ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok tertinggi dimiliki oleh Laos, Brunei dan Myanmar, sementara terendah berada di Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di sisi lain, ketergantungan perdagangan Tiongkok ke ASEAN tertinggi kepada Singapura dan terendah kepada Filipina.



Gambar 4.15 Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>130</sup>

Ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi juga ditunjukkan dari selisih tarik-menarik nilai ketergantungan perdagangan di antara kedua pihak. Seluruh negara-negara ASEAN memiliki nilai negatif, yang berarti ketergantungan perdagangan ke Tiongkok lebih besar dibandingkan sebaliknya. Thailand, Vietnam, dan Singapura menjadi negara-negara dengan selisih ketergantungan perdagangan baik, sementara Brunei, Laos, dan Myanmar menjadi negara-negara dengan selisih ketergantungan perdagangan paling negatif. Lebih lanjut, rata-rata nilai ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok juga jauh lebih besar dibandingkan Tiongkok ke ASEAN.

<sup>130</sup> Di olah dari data aseanstats.org, diakses pada 19 Desember 2017 pukul 01.21 WIB

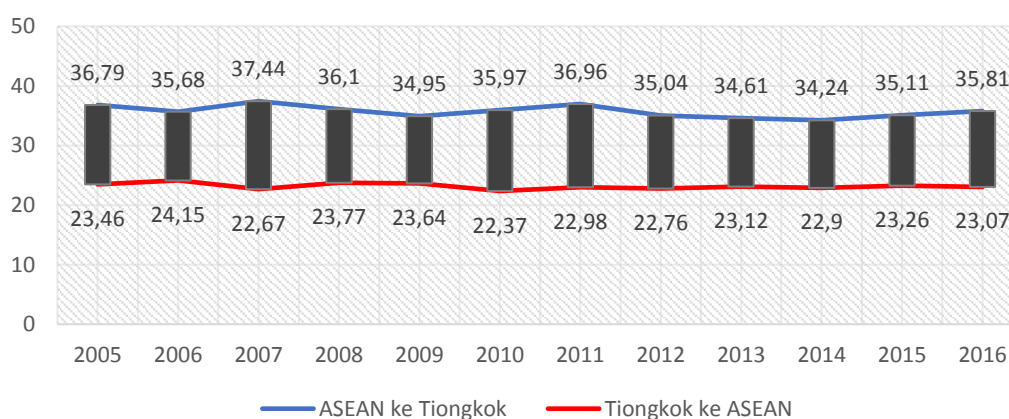


Tabel 4.22 Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>131</sup>

Negara	Ketergantungan Perdagangan		
	ASEAN ke Tiongkok	Tiongkok ke ASEAN	Selisih Ketergantungan
Lao PDR	49,96	27,1	-22,86
Brunei	47,02	20,91	-26,11
Myanmar	40,4	19,16	-21,24
Singapore	36,55	29,4	-7,15
Cambodia	34,05	23,7	-10,35
Malaysia	33,23	22,89	-10,34
Philippines	32,77	18,25	-14,52
Indonesia	30,24	21,04	-9,2
Vietnam	29,09	23,88	-5,21
Thailand	24,8	24,33	-0,47
Rata-rata	35,81	23,06	-12,75

Sumber: Di olah dari data aseanstats.org

Selain itu, nilai ketergantungan perdagangan di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dalam periode 2005 – 2016, perubahan yang terjadi cenderung bersifat stabil dan menunjukkan nilai ketergantungan perdagangan ASEAN lebih besar dibandingkan sebaliknya. Hal ini memperlihatkan bahwa ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok konsisten lebih tinggi bertahan pada periode tersebut.



Gambar 4.16 Perbandingan Rata-rata Indeks Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>132</sup>

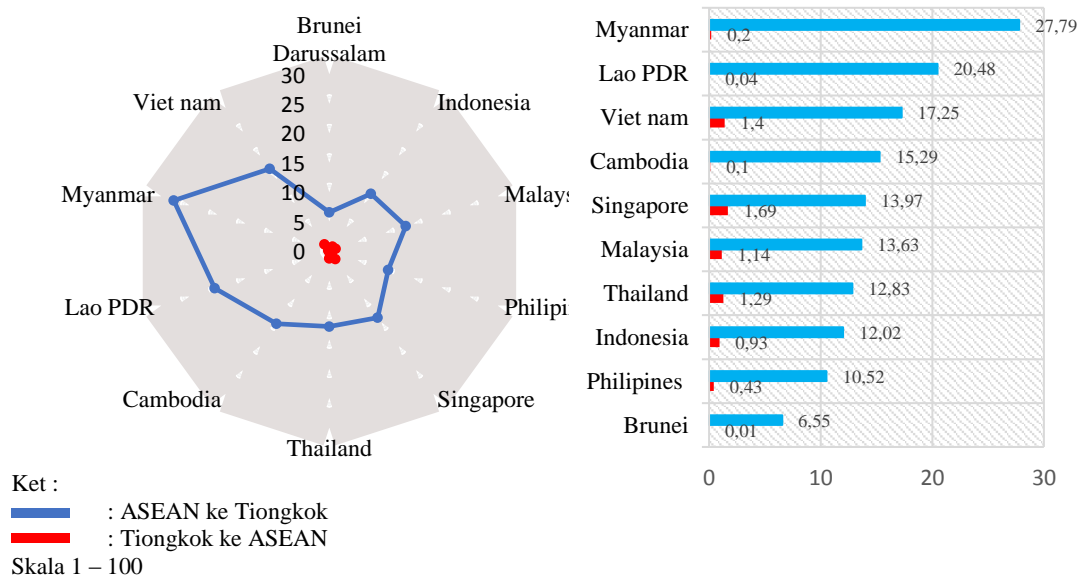
<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

Ketergantungan perdagangan kemudian ditentukan dari dua faktor yaitu: *magnitude of trade dependence* (besaran ketergantungan perdagangan) dan *form of trade dependence* (bentuk ketergantungan perdagangan) yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.3.1.1 Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya

Besaran ketergantungan perdagangan suatu negara dihitung berdasarkan beberapa indikator, yaitu: *persentase total ekspor ke negara tujuan atas total ekspor ke seluruh dunia*, *persentase total ekspor ke negara tujuan atas total PDB*, dan *persentase total impor dari negara tujuan atas total impor dari seluruh dunia*. Dengan demikian, nilai besaran ketergantungan perdagangan berkaitan dengan aspek besarnya kontribusi perdagangan dengan suatu negara terhadap perdagangan dengan seluruh dunia dan total perekonomian negara.



Gambar 4.17 Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>133</sup>

<sup>133</sup> *Ibid.*

Keadaan nilai besaran ketergantungan perdagangan kembali menunjukkan ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok yang jauh lebih tinggi dibanding sebaliknya. Pada tahun 2016, nilai besaran ketergantungan perdagangan negara-negara ASEAN ke Tiongkok tertinggi terfokus di negara-negara CLMV. Brunei, Filipina, dan Indonesia berurutan justru menjadi negara dengan besaran ketergantungan ke Tiongkok terendah. Di sisi lain, nilai besaran ketergantungan perdagangan Tiongkok ke ASEAN lebih stabil dan menunjukkan nilai yang sangat rendah. Brunei dan negara-negara CLMV (kecuali Vietnam) menjadi negara-negara dengan ketergantungan besaran perdagangan Tiongkok ke ASEAN terendah. Sementara Singapura, Vietnam, dan Thailand menjadi negara-negara pemilik terbesar.

Tabel 4.23 Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>134</sup>

Negara	Besaran Ketergantungan Perdagangan		
	ASEAN ke Tiongkok	Tiongkok ke ASEAN	Selisih Ketergantungan
Myanmar	27,79	0,2	-27,59
Lao PDR	20,48	0,04	-20,44
Vietnam	17,25	1,4	-15,85
Cambodia	15,29	0,1	-15,19
Singapore	13,97	1,69	-12,28
Malaysia	13,63	1,14	-12,49
Thailand	12,83	1,29	-11,54
Indonesia	12,02	0,93	-11,09
Philippines	10,52	0,43	-10,09
Brunei	6,55	0,01	-6,54
Rata-rata	15,033	0,723	-14,31

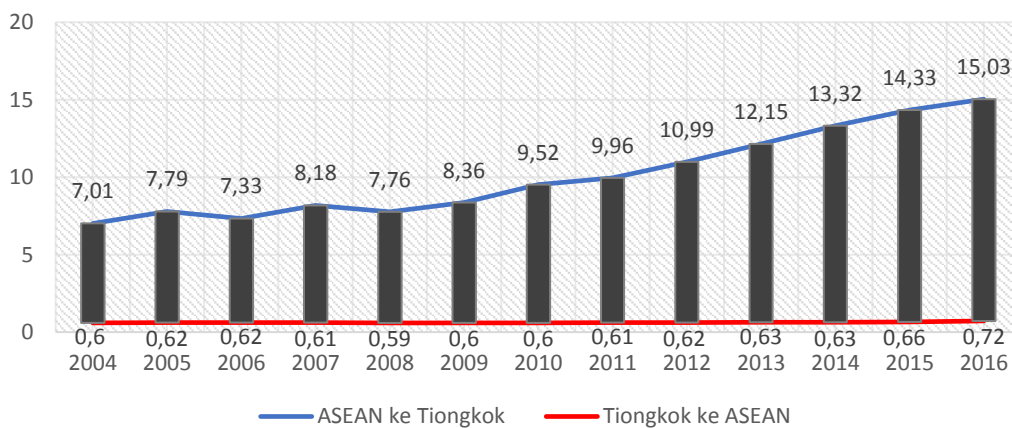
Sumber: Di olah dari data aseanstats.org

Selain itu, besaran ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi dibandingkan sebaliknya juga terlihat dari nilai selisih di antara

<sup>134</sup> *Ibid.*

keduanya. Seluruh negara-negara ASEAN memiliki nilai negatif yang menunjukkan ketergantungan ke Tiongkok lebih tinggi dari sebaliknya. Negara-negara CLMV kembali menjadi negara dengan nilai selisih paling negatif. Sementara Brunei menunjukkan selisih nilai paling mendekati baik.

Selanjutnya, besaran ketergantungan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada periode 2004 – 2016, perubahan yang terjadi menunjukkan semakin besarnya ketergantungan ASEAN ke Tiongkok. Pada periode tersebut, besaran ketergantungan perdagangan negara-negara ASEAN ke Tiongkok meningkat sekitar dua kali lipat, sedangkan Tiongkok ke ASEAN cenderung bersifat stabil. Peningkatan besaran ketergantungan perdagangan ASEAN ke Tiongkok pun lebih pesat terjadi pasca 2010, dimana kerja sama ACFTA dinyatakan mulai berlaku maksimal untuk ASEAN 6 dan Tiongkok.

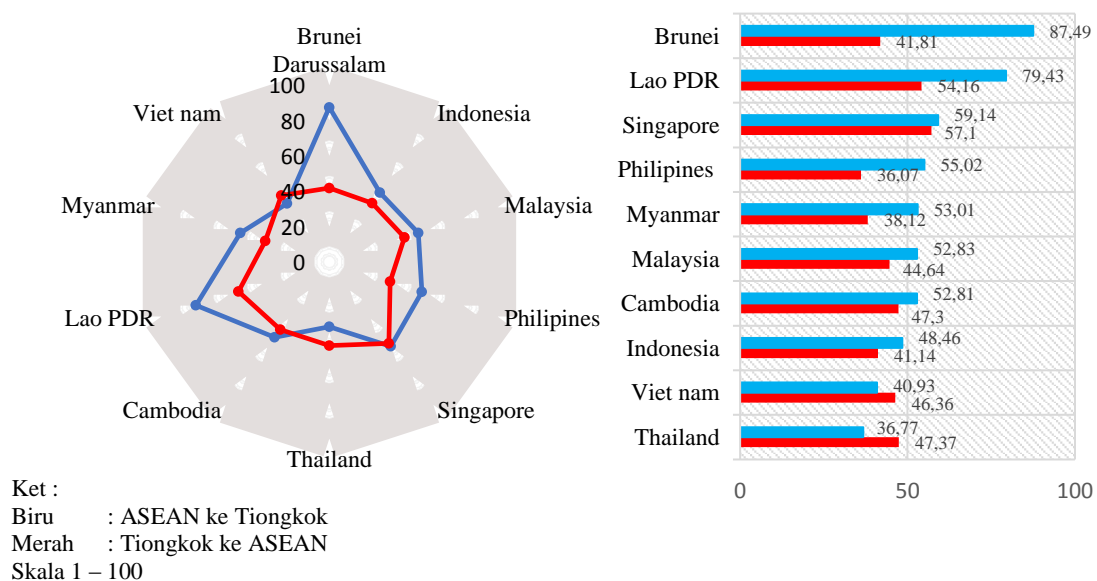


Gambar 4.18 Perbandingan Rata-rata Indeks Besaran Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>135</sup>

<sup>135</sup> *Ibid.*

#### 4.3.1.2 Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya

Bentuk ketergantungan perdagangan suatu negara dihitung berdasarkan beberapa indikator, yaitu: *persentase produk ekspor terbesar atas total seluruh ekspor*, dan *persentase total lima produk terbesar atas seluruh ekspor*. Dengan demikian, bentuk ketergantungan perdagangan berkaitan dengan aspek spesialisasi dan konsentrasi komoditas. Negara dengan spesialisasi dan konsentrasi komoditas yang besar, akan lebih bergantung terhadap satu sektor perdagangan. Sebaliknya, negara dengan spesialisasi dan konsentrasi komoditas yang merata, lebih tidak bergantung terhadap suatu sektor karena pemerataan memberikan lebih banyak pilihan dalam perdagangan.



Gambar 4.19 Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>136</sup>

Di antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok, keadaan bentuk ketergantungan perdagangan lagi-lagi memperlihatkan ketergantungan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi. Pada tahun 2016, Brunei menjadi negara dengan nilai

<sup>136</sup> *Ibid.*

bentuk ketergantungan perdagangan ke Tiongkok tertinggi disusul Laos dan Singapura. Sementara Thailand, Vietnam, dan Indonesia menjadi negara-negara ASEAN dengan nilai terendah. Bentuk ketergantungan perdagangan Tiongkok ke ASEAN tertinggi berada di Singapura, Laos, dan Thailand, sementara Filipina, Myanmar, dan Indonesia menjadi yang terendah.

Selisih bentuk ketergantungan perdagangan di antara kedua pihak juga menjadi landasan terlihatnya ketergantungan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi dibanding sebaliknya. Delapan dari sepuluh negara-negara ASEAN menunjukkan nilai negatif yang berarti lebih bergantung ke Tiongkok. Faktor ini lebih lanjut memperlihatkan ketimpangan yang terjadi cenderung lebih baik dari pada sebagian besar faktor-faktor ketergantungan lainnya. Hal tersebut disimpulkan karena sebaran selisih ketergantungan antara ASEAN dan Tiongkok nyaris tidak jauh berbeda di sebagian besar negara.

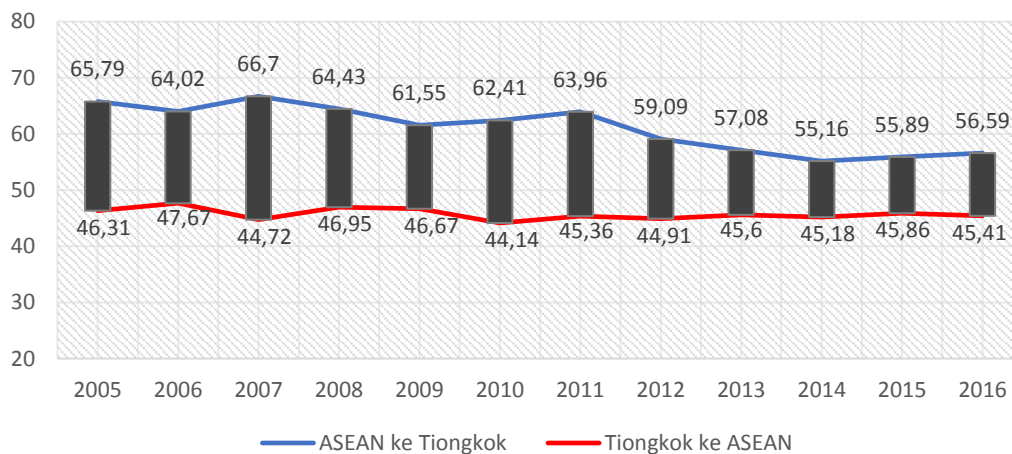
Tabel 4.24 Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>137</sup>

Negara	Bentuk Ketergantungan Perdagangan		
	ASEAN ke Tiongkok	Tiongkok ke ASEAN	Selisih Ketergantungan
Brunei	87,49	41,81	-45,68
Lao PDR	79,43	54,16	-25,27
Singapore	59,14	57,1	-2,04
Philippines	55,02	36,07	-18,95
Myanmar	53,01	38,12	-14,89
Malaysia	52,83	44,64	-8,19
Cambodia	52,81	47,3	-5,51
Indonesia	48,46	41,14	-7,32
Vietnam	40,93	46,36	5,43
Thailand	36,77	47,37	10,6
Rata-rata	56,58	45,4	-11,18

Sumber: Di olah dari data aseanstats.org

<sup>137</sup> *Ibid.*

Perubahan nilai bentuk ketergantungan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2005 – 2016 menunjukkan penurunan nilai di pihak ASEAN ke Tiongkok. Penurunan ini juga terlihat paling besar terjadi pasca tahun 2010 sampai 2016 dimana kerja sama pasar bebas dalam ACFTA mulai berlaku secara efektif untuk ASEAN 6 – Tiongkok. Di sisi lain, nilai bentuk ketergantungan perdagangan Tiongkok ke ASEAN relatif stabil pada periode yang sama.



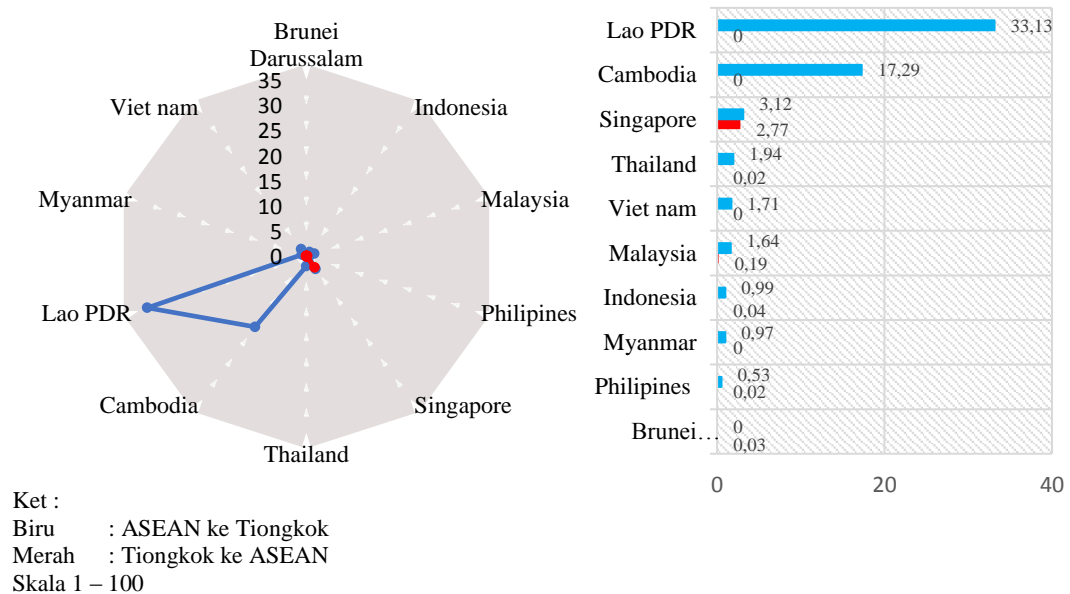
Gambar 4.20 Perbandingan Rata-rata Indeks Bentuk Ketergantungan Perdagangan Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>138</sup>

#### 4.3.2 Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya

Investasi menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian, karena memberikan ketersediaan dana atau sumber daya lainnya untuk berjalannya pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, ketergantungan investasi menjadi penting untuk di garis bawahi dalam melihat fenomena ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya. Dalam menghitung nilai investasi dalam penelitian ini, digunakan dua indikator yaitu: *persentase total investasi dari suatu negara*

<sup>138</sup> *Ibid.*

terhadap total investasi dari dunia, dan persentase total investasi dari suatu negara terhadap total PDB.



Gambar 4.21 Indeks Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>139</sup>

Pada tahun 2015, ketergantungan investasi di antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok kembali menunjukkan nilai ketergantungan ASEAN ke Tiongkok yang lebih tinggi dibandingkan sebaliknya. Meskipun demikian, ketergantungan investasi ternyata menjadi faktor yang paling memperlihatkan kesetaraan nilai ketergantungan di antara kedua pihak. Ketergantungan investasi yang tinggi dari ASEAN ke Tiongkok hanya terjadi pada Laos dan Kamboja. Sementara negara-negara lain memiliki ketergantungan investasi yang relatif rendah. Di sisi lain, ketergantungan investasi Tiongkok ke ASEAN juga tercatat sangat rendah dan merata ke seluruh negara-negara ASEAN.

Ketergantungan investasi ASEAN ke Tiongkok kemudian juga terlihat dari selisih nilai ketergantungan investasi di antara kedua pihak. Nilai selisih paling

<sup>139</sup> Di olah dari data aseanstats.org dan stats.gov.cn, di akses pada 19 Desember 2017 pukul 02.10 WIB



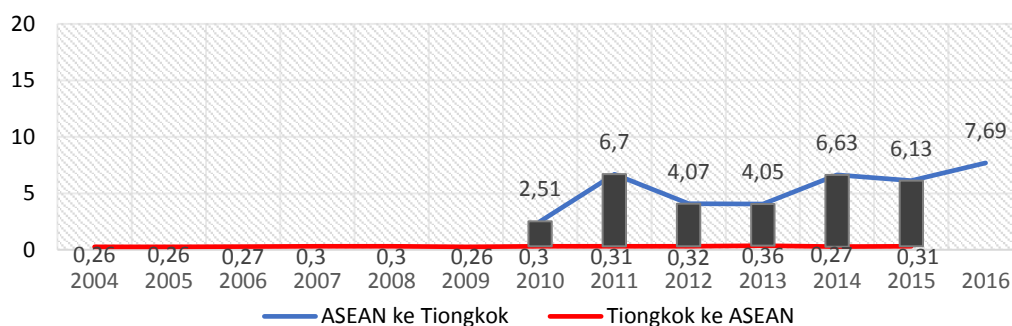
negatif berada di Laos dan Kamboja, serta jauh lebih negatif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Rata-rata nilai ketergantungan investasi di antara dua pihak juga masih menunjukkan adanya dominasi Tiongkok.

Tabel 4.25 Indeks Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya 2016<sup>140</sup>

Negara	Ketergantungan Inveatasi		
	ASEAN ke Tiongkok	Tiongkok ke ASEAN	Selisih Ketergantungan
Lao PDR	33,13	0	-33,13
Cambodia	17,29	0	-17,29
Singapore	3,12	2,77	-0,35
Thailand	1,94	0,02	-1,92
Vietnam	1,71	0	-1,71
Malaysia	1,64	0,19	-1,45
Indonesia	0,99	0,04	-0,95
Myanmar	0,97	0	-0,97
Philipines	0,53	0,02	-0,51
Brunei	0	0,03	0,03
Rata-rata	6,12	0,3	-5,82

Sumber: Di olah dari data aseanstats.org dan stats.gov.cn

Selanjutnya, perubahan nilai ketergantungan investasi yang terjadi pada periode 2010 – 2016 adanya penurunan dan kenaikan. Namun, perubahan cenderung mengarah pada semakin besarnya ketergantungan investasi ASEAN ke Tiongkok. Di sisi lain, ketergantungan Tiongkok ke ASEAN pada periode 2004 – 2015 cenderung stabil dan lebih rendah dibandingkan sebaliknya.



Gambar 422 Perbandingan Rata-rata Bentuk Ketergantungan Investasi Negara-negara ASEAN ke Tiongkok dan Sebaliknya<sup>141</sup>

<sup>140</sup> *Ibid.*.

<sup>141</sup> *Ibid.*

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, disimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya:

1. Keunggulan komparatif berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Dari enam faktor pembangun keunggulan komparatif yang di uji, empat di antaranya berpengaruh signifikan secara parsial, yaitu: *endowment*, iklim bisnis, kebebasan biaya tambahan tenaga kerja, dan ketersediaan kredit. Sementara faktor modal manusia dan kebebasan hambatan tarif impor tidak berpengaruh signifikan.
2. *Endowment* berpengaruh signifikan secara negatif atau bertolak belakang terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dengan nilai  $\beta$  sebesar -0,676. (*sig.* = 0,035, T hitung > T tabel / -2,242 > 2,068). *endowment* yang dimiliki rata-rata negara ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan Tiongkok dengan rasio perbandingan 1 : 25.
3. Iklim bisnis berpengaruh signifikan dengan arah positif atau searah terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dengan

nilai  $\beta$  sebesar 0,243. (*sig.* = 0,012,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  /  $2,715 > 2,068$ ). Iklim bisnis yang dimiliki oleh rata-rata negara ASEAN lebih baik dibandingkan Tiongkok dengan rasio perbandingan 48 : 46.

4. Kebebasan biaya tambahan tenaga kerja berpengaruh signifikan secara negatif atau bertolak belakang terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dengan nilai  $\beta$  sebesar -0,336. (*sig.* = 0,000,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  /  $-4,201 > 2,068$ ). Indeks kebebasan biaya tambahan tenaga kerja yang dimiliki rata-rata negara ASEAN lebih tinggi dibandingkan Tiongkok dengan rasio perbandingan 71 : 65.
5. Ketersediaan kredit berpengaruh signifikan secara negatif atau bertolak belakang terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok dengan nilai  $\beta$  sebesar -0,213. (*sig.* = 0,014,  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $-2,677 > 2,068$ ). Indeks ketersediaan kredit rata-rata negara ASEAN lebih rendah dibandingkan Tiongkok dengan rasio perbandingan 1 : 2.
6. Modal manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. (*sig.* = 0,188,  $T_{hitung} < T_{tabel}$  /  $-1.358 < 2,068$ ). Indeks modal manusia yang dimiliki rata-rata negara ASEAN lebih rendah dibandingkan Tiongkok dengan rasio perbandingan 40 : 43.
7. Kebebasan hambatan tarif impor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. (*sig.* = 0,206,  $T_{hitung} < T_{tabel}$  /  $-1.300 < 2,068$ ). Indeks kebebasan hambatan tarif impor yang dimiliki rata-rata negara ASEAN lebih baik dari Tiongkok dengan rasio perbandingan 15 : 14.

8. Logika paham libelarisme interdependensi dalam sistem perekonomian internasional terbukti benar adanya. Hal tersebut khususnya terkait keunggulan komparatif yang idealnya dikedepankan oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi kerja sama dan persaingan yang lebih erat dalam pasar bebas. Keunggulan komparatif terbukti tidak hanya membuat negara-negara ASEAN mendapatkan keuntungan dan mitra ekonomi yang lebih luas, tetapi juga mampu menekan ketergantungan terhadap Tiongkok.

## **6.2 Saran**

Hasil, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini kemudian menghasilkan beberapa saran dan rekomendasi yang diberikan bagi keilmuan hubungan internasional maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerja sama ACFTA, diantaranya:

1. Keunggulan komparatif mampu mempengaruhi ketergantungan negara terhadap negara lainnya dengan meningkatkan potensi keuntungan dan mitra hubungan ekonomi, sehingga ketergantungan dapat tersebar dan lebih rendah ke suatu negara pembanding. Hal ini lebih lanjut dapat mengurangi keterbelakangan negara dengan maksimalisasi keuntungan dan berkurangnya ketergantungan negara terhadap negara lain.
2. Negara-negara ASEAN dalam merespon dinamika ACFTA, disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait peningkatan kerja sama yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan ketimpangan keuntungan yang terjadi antara rata-rata negara ASEAN dan Tiongkok semakin besar setiap tahunnya. Negara-negara ASEAN juga disarankan lebih meningkatkan

hubungan dengan Tiongkok melalui mekanisme dan bidang-bidang lain, terutama terkait dengan kerja sama peningkatan faktor-faktor pembangun keunggulan komparatif yang dapat membuat persaingan berjalan dengan lebih baik.

3. Untuk mengantisipasi ketergantungan terhadap Tiongkok, negara-negara ASEAN secara umum direkomendasikan untuk mengambil kebijakan terkait faktor-faktor pembangun keunggulan komparatifnya, diantaranya:

- Pemanfaatan *endowment* perlu lebih dimaksimalkan oleh negara-negara ASEAN, yang dapat dilakukan dengan; pengambil alihan kembali lahan-lahan yang telah disewakan kepada investor asing dan atau penguatan kontrak sewa lahan; penyesuaian lebih lanjut terhadap distribusi tenaga kerja; peningkatan lapangan kerja yang dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi investasi masuk; dan peningkatan kerja sama negara-negara ASEAN untuk saling membantu dalam meningkatkan produksi sumber daya alam terkait energi.
- Meskipun pengaruh iklim bisnis memiliki arah yang positif atau searah. Penelitian ini tidak menyarankan pengurangan iklim bisnis di negara-negara ASEAN, tetapi peningkatan kualitas kebijakan, kontrol korupsi, dan pengendalian hukum sebagai indikator iklim bisnis perlu di jaga karena berpotensi mengurangi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi.

- Terkait kebebasan biaya tambahan tenaga kerja, negara disarankan melakukan beberapa kebijakan seperti; penyesuaian distribusi tenaga kerja terhadap potensi yang dimiliki negara; peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pembekalan pelatihan yang rutin; dan peningkatan teknologi industri sehingga tenaga kerja dapat terbantu dalam produksi yang lebih efisien.
- Penyediaan kredit terhadap pengusaha perlu ditingkatkan oleh negara-negara ASEAN yang dapat dilakukan dengan; penciptaan regulasi yang mendukung ketersediaan kredit seperti dukungan terhadap bank-bank lokal; penciptaan regulasi yang mengarah pada kemudahan dalam mendapatkan kredit seperti bunga pinjaman yang rendah, proses yang lebih sederhana dan akses yang mudah di jangkau; serta peningkatan kesadaran masyarakat terkait kredit usaha yang dapat dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya.
- Pemanfaatan modal manusia negara-negara ASEAN masih sangat perlu ditingkatkan dalam menghadapi persaingan dengan Tiongkok, yang dapat dilakukan dengan; penciptaan regulasi yang membantu berkembangnya ekonomi kreatif di negara-negara ASEAN; melakukan kerja sama antar negara-negara ASEAN terkait pemanfaatan ekonomi kreatif agar pemerataan pemanfaatan dapat dikembangkan; serta meningkatkan penyuluhan dan pelatihan terkait pemanfaatan kreatifitas dalam unit usaha di masyarakat.

- Kebebasan hambatan tarif impor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok. Oleh sebab itu, negara-negara ASEAN harus lebih cermat dalam meninjau kebijakan tarif impor sebagai upaya melindungi industri dalam negeri.
4. Para akademisi keilmuan Hubungan Internasional khususnya para pengkaji fenomena Ekonomi dan Politik Global disarankan mulai menggali kajian-kajian baru terkait keunggulan komparatif dan ketergantungan. Hal ini dinilai penting mengingat sulitnya peneliti dalam menemukan literatur masa kini yang membahas penyebab ketergantungan suatu negara, baik literatur dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Padahal, fenomena ketergantungan masih menjadi masalah negara-negara berkembang dan secara nyata hadir dalam sis internasional.
  5. Peneliti selanjutnya disarankan lebih melibatkan pihak-pihak terpercaya dengan akses data yang lebih baik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperluas analisis yang dilakukan. Selain itu, peneliti selanjutnya dalam mengkaji pengaruh keunggulan komparatif terhadap ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok, disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang belum dilibatkan dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk memperkaya dan lebih membongkar fenomena ketergantungan negara-negara ASEAN ke Tiongkok, sehingga solusi terkait hal tersebut dapat dijelaskan dengan lebih terperinci, luas, dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods: 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Campbell, Dan dan Campbell, Sherlock. 2008. *Introduktion to Regression and Data Analysis*. Charlottesville: StabLab Workshop
- Dougherty, James E. dan. Pfaltzgraff, Jr., Robert L. 2001. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Fifth Edition*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Drozdz, Jolanta dan Miskinis, Algirdas. 2011. *Benefits and Threats of Free Trade*. Vilnius University: Ekonomia Economics.
- Field, Andy. 2013. *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. London: Sage Publication.
- Hong, Zhao. 2016. *China's One Belt One Road : An Overview of the Debate*. Singapore: Yusof Ishak Institute, ISEAS Publishing.
- Jacson, Robert dan Sorensen, George. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Jupp, Victor. 2006. *The Sage Dictionary of Social Research Methods*. London: SAGE Pubication Ltd.
- Negishi, Takashi. 2014. *Development of International Trade Theory: Second Enhanced Edition*. Tokyo: Springer.
- Neuman, W. Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seven Edition*. Edinburgh: Pearson.



O. Keohane, Robert. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.

Smith, Adam. 1976. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Oxford: Oxford University Press.

Steans, Jill dan kawan-kawan. 2010. *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, Third Edition*. London: Pearson education.

Viotti, Paul R. dan Kauppi, Mark. V. 2012. *International Relations Theory: Fifth Edition*. Glenview: Pearson Education, Inc.

Walliman, Nicholas. 2011. *Research Methods: The Basics*. London: Routledge.

#### **Jurnal dan Penelitian :**

Adele N. F., Regine. 2012. Protectionism and Free Trade: A Country's Glory or Doom?. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 3, No. 5. [www.ijtef.org](http://www.ijtef.org)

*Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*. Asean.org

*Agreement on Trade of Services of The framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the Peoples's Republic of China*. Asean.org

*Annex 1, Modality for Tariff Reduction and Elimination for tariff Lines Placed in the Normal Track*. Asean.org.

*Annex 2, Modality for Tariff Reduction and Elimination for tariff Lines Placed in the Sensitive Track*. Asean.org.

*Annex 3. Rules Of Origin For The Asean-China Free Trade Area*. Asean.org

*ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation Report. 2001, Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century*. Asean.org

Bender, Siegfried dan Li, Kui-Wai. 2002. The Changing Trade and Revealed Comparative Advantages of Asian and Latin American Manufactures Exports. *Cender Discussion Paper No. 843*. New Haven: Yale University.

*BP Statistical Review of World Energy*. 2011, 2013, 2015, and 2017. Bp.com

Chase-Dunn, Christopher. 1975. The effect of International Dependence on Development and Inequality: A Cross-National Study. *American Sociological Review Vol. 40 No. 6*. Washington D.C.: American Sociological Association.

Coxhead, Ian. 2007. A New Resource Curse? Impacts of China's Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia. *Journal of World Development Vol. 35 No. 7*. Amsterdam: Elsevier.

Deardoff, Alan V. 1998. Benefits and Cost of Following Comparative Advantage. *Research Seminar in International Economics Discussion Paper No. 423*. Michigan: University of Michigan.

Delacroix, Jacques dan Ragin, Charles C. 1981. A Cross-nation Study of Economic Dependency, State Efficacy, and Underdevelopment. *American Journal of Sociology Vol. 86 NO. 6*. Chicago: American Journal of Sociology.

Doing Business Report. 2011, 2013, 2015, 2017. Wasington DC: Worldbank.

Dos Santos, Theotonio. 1970. The Structure of Dependence. *The American Economic Review Vol. 60, No. 2*. Tennessee: American Economic Association.

E. Kalu, Nkemjika. 2012. *Understanding Africa's China Policy: A Test of Dependency Theory and a Study of African Motivations in Increasing Engagement with China*. Lincoln: University of Nebraska-Lincoln.

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 1.*

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 3*

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Articles 6.*

- Friyatno, Supena., Saptana, dan Sumaryanto. 2012. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Komoditas Kentang dan Kubis di Wonosobo Jawa Tengah. *Jurnal SOCA (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness. Vol 2 No. 1*. Bali: Universitas Udayana.
- Glien, Joseph A. dan Glien, Rosemary R. 2003. Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Likert Type Scale. *Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education*. Columbus : The Ohio State University.
- Hett, Cornelia dan kawan-kawan. 2015. Land Deals In Laos: First Insights From A New Nationwide Initiative To Assess The Quality Of Investments In Land. *Cornference Paper No. 18*. Chiang Mai. University of Chiang Mai.
- Herbert, Anne L. 1996. Cooperation in International Relation: A Comparison of Keohane, Haas and Franck. *Berkeley Journal of International Law Vol. 14 Issue 1*. California: University of California.
- Huang, Jie dan Stomezynski, Kazimer M. 2004. The Dimensionality and Measurement of Economic Dependency. *International Journal of Sociology Vol. 33 No. 4*. Abingdon: Taylor and Francis Group.
- Hunt, Shelby D. dan Morgan, Robert M. 1995. The Comparative Advantage Theory of Competition. *Journal of Marketing Vol. 59 No. 2*. Chicago: The American Marketing Association.
- Kaufman, Robert R., Chernotsky, Harry I., dan Geller, Daniel S. 1975. A Preliminary Test of the Theory of Dependency. *Journal of Comparative Politics Vol. 7 No. 3*. New York: City University of New York.
- Kelley, Donna., Snger, Slavica., dan Herrington, Mike. 2016. *Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 Global Report*. Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
- Kowalski, Przemyslaw. 2011. Comparative Advantage and Trade Performance: Policy Implication. *OECD Trade Policy Paper No. 121*. OECD Publishing.
- Lumina, Cephas. 2008, Free Trade or Just Trade? The World Trade Organisation. Human Rights and Development (Part 1). *African Journals Online (AJOL), Vol. 12, No, 2*. Grahamstown: African Journals Online.
- Lunn, Jon dan Lang, Arabela. 2016. The South China Sea Dispute: July 2016 Update. *Briefing paper No. 7481*, House of Commons Library.

- Mantau, Zulkifli. 2009. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Tani Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara. Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.
- Mille, Meredith 2015, China's Relation with Southeast Asia. *Testimony for the U.S.-China Economic and Security Review Commission*. Seatle: The National Bureau of Asian Reasearch
- Milner, Helen. 1992. Review of International Theories of Cooperation among Nations and Saving the Mediterranean. *Journal of World Politics Vol. 44 No. 3*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shujiro Urata. 2002. Globalization and the Growth in Free Trade Agreement. *Asia-Pacific Review Vol.9 No.1*. Oxford: Routledge.
- Sigit Setiawan. 2012. ASEAN-CHINA FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan China. Jakarta: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI.
- Siggel, Eckhard .2006. International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and proposal for Measurement. *Journal of Industry, Competition, and Trade, Vol. 6 Issue 2*. US: Springer.
- Siitonen, lauri. 1990. Political Theories of Development Cooperation – A study of Theories of International Cooperation. *Wider Working Papers No. 86*. Helsinki: World Institute for Development Economics Research of the United Nations University.
- Sunkel, Osvaldo. 1972. Big Business “Dependencia”: A Latin American View. *Journal of Foreign Affairs Vol. 50 No.3*. Tampa: Foreign Affairs.
- Suryadi, Beni dan Velauthan, Sanjayan. Coal's Role in ASEAN Energy. dalam: Baruya, Paul. 2016. Fueling Increased Electricity Production in the Emerngng Economics of Asia. *Cornerstone Volume 4 Issue 1*. Beijing: World Coal Association.
- Sen, Susanda. 2010. International Trade Theory and Policy: A Review of The Literature. *Working Paper No. 635*, New York: Levy Economics Institute of Bard College.
- Transparency Internatioal. 2017. *Transparency International Corruption Perception Index 2017*.

Wibowo, Ali Fikri. 2011. *Pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area (AFCTA) dan Hubungan Ekonomi ASEAN-Cina (2003-2009)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

World Economic Forum. *Human Capital Report 2015 and 2017. United Nation of Development Programme*.

World Tariff Profile. 2011, 2013, 2015, and 2017. Wto.org

**Situs resmi dan berita :**

ACFTA : [www.asean-cn.org](http://www.asean-cn.org)  
ADB : <https://aric.adb.org/fta>  
ASEAN : [www.asean.org](http://www.asean.org), [www.aseanstats.org](http://www.aseanstats.org), [aseanenergy.org](http://aseanenergy.org)  
Asia Times : [www.atimes.com](http://www.atimes.com)  
Barro R. & J. W. Lee : [Barrolee.com](http://Barrolee.com)  
China's Government : [Stats.gov.com](http://Stats.gov.com)  
CNN : [www.edition.cnn.com](http://www.edition.cnn.com)  
Emerging Market : [www.emergingmarkets.asia](http://www.emergingmarkets.asia)  
FAO : [www.fao.org](http://www.fao.org)  
IEA : [iea.org](http://iea.org)  
IJTEF : [www.ijtef.org](http://www.ijtef.org)  
Index Mundi : [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com)  
Indonesian Investment : [www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com)  
Kementerian Malaysia : [www.dosm.gov.my](http://www.dosm.gov.my)  
Sunstar : [www.sunstar.com](http://www.sunstar.com)  
The Guardian : [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)  
Transparency International : [www.transparency.org](http://www.transparency.org)  
Kemendagri : [www.kemendag.go.id/](http://www.kemendag.go.id/)  
Statista : [www.statista.com](http://www.statista.com)  
UNDP : [hrd.undp.org](http://hrd.undp.org)  
World Bank : <http://wits.worldbank.org>, [worldbank.org](http://worldbank.org)  
WTO : <http://rtais.wto.org>, [wto.org](http://wto.org).  
ODM : <https://opendevelopmentmyanmar.net>